



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
ROADMAP SANITASI PROVINSI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam *sustainable development goals* melalui pembangunan sanitasi secara menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu berdasarkan dokumen *roadmap* sanitasi di Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, Pemerintah Daerah menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi Provinsi yang mengacu pada Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi Nasional dan berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Roadmap* Sanitasi Provinsi Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217);
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROADMAP SANITASI PROVINSI TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi.
6. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah

domestik secara terpadu dan berkelanjutan.

7. Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang selanjutnya disebut Dokumen RSP adalah dokumen perencanaan Sanitasi Daerah yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
8. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan Sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan Sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di Daerah, serta pengawasan yang komprehensif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pembangunan dan pengelolaan Sanitasi;
- b. acuan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Sanitasi; dan
- c. pedoman percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan yang memuat strategi kebijakan dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi sesuai dengan jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di Daerah; dan
- b. mencapai target akses Sanitasi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB III
DOKUMEN *ROADMAP* SANITASI PROVINSI

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (2) Ruang lingkup Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendahuluan
 - b. profil Sanitasi Daerah;
 - c. isu strategis, tujuan dan sasaran;
 - d. strategi dan kebijakan;
 - e. rencana aksi pengelolaan sanitasi;
 - f. program kegiatan, sub kegiatan dan indikasi pendanaan; dan
 - g. penutup
- (3) Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam dokumen perencanaan Daerah, yaitu:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - d. Rencana Kerja Perangkat Daerah
- (4) Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi, Pemerintah Daerah memperhatikan pemenuhan standar teknis pada pembangunan dan penyediaan infrastruktur Sanitasi.
- (2) Selain harus memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kualitas hasil olahan infrastruktur Sanitasi harus memenuhi standar baku mutu lingkungan.
- (3) Penetapan standar teknis dan standar baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi dilakukan oleh

Perangkat Daerah terkait.

- (2) Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara optimal, terpadu dan berkelanjutan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai program sesuai pencapaian target meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga; dan
 - b. air limbah domestik.
- (4) Optimalisasi pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pokja PPKP.
- (5) Pembentukan Pokja PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Pokja PPKP;
 - c. Perangkat Daerah terkait Kabupaten/Kota di Daerah;
 - d. Kelompok Kerja Sanitasi di dalam Daerah;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - f. pihak lain yang terkait.

Pasal 8

- (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dalam penyusunan dan

pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi dilaksanakan secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja PPKP.
- (3) Kegiatan Pokja PPKP dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan kampanye, edukasi dan advokasi;
 - b. mengevaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan melakukan kunjungan lapangan dan menggunakan instrumen berbasis elektronik yaitu situs web resmi NAWASIS (*National Water and Sanitation Information Services*) sebagai perangkat pemantauan dan evaluasi;
 - c. menyiapkan laporan 1 (satu) tahun sekali untuk disampaikan kepada Gubernur mengenai perkembangan pelaksanaan Program PPSP; dan
 - d. hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan kemajuan pelaksanaan Program PPSP dilaporkan melalui website <https://portal.nawasis.info> sebagai perangkat monitoring dan evaluasi

Pasal 10

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan perencanaan pembangunan Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pokja PPKP.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dan pelaksanaan Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan internal Pemerintah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~ 9 ~

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 November 2025
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 24 November 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizai Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG ROADMAP SANITASI PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2025-2029

ROADMAP SANITASI PROVINSI TAHUN 2025-2029

1. Latar Belakang

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program yang dicanangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, untuk mewujudkan akses sanitasi layak dan aman bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pembangunan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan), merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *(tidak termasuk pasal yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)*).

Kewenangan Pemerintah Provinsi dimuat dalam lampiran undang-undang tersebut, yang terdiri dari:

- (1) pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional; dan
- (2) pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional

(sumber : lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, huruf C Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, angka 3 (halaman 10, sheet 323) : pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, angka 4 (halaman 11, sheet 324 : pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional).

Dalam rangka mencapai target sanitasi layak dan aman 100% pada tahun 2030 sebagaimana termaktub dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, serta amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk hal tersebut dibutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal:

- (1) meningkatkan peran fasilitasi dalam Pembangunan sanitasi secara terpadu dan menyeluruh di kabupaten/kota;
- (2) memaksimalkan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di wilayahnya dalam pembangunan sanitasi;
- (3) memprioritaskan alokasi pembiayaan pembangunan sanitasi melalui APBD provinsi.

2. Landasan Hukum dan Dukungan Peraturan

Dasar pelaksanaan penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi adalah Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024.

Penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi juga didukung dengan berbagai peraturan dan kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi, sebagaimana diuraikan pada point mengingat dalam peraturan ini.

3. Ruang Lingkup

Dokumen Pemutakhiran *Roadmap* Sanitasi Provinsi Gorontalo sesuai dengan Permendagri 87 Tahun 2022 dibatasi hanya pada dua bidang, yaitu Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (sesuai Pasal 4, angka (1) dan Pasal 6 angka (1).

Masing-masing bidang dikaji secara menyeluruh untuk lima (5) aspek yaitu :

- 1) **Aspek Regulasi**, yaitu pengkajian kelengkapan peraturan perundang-undangan di daerah yang mengatur pengelolaan dan retribusi sanitasi seperti adanya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota tentang pengelolaan masing-masing komponen sanitasi.
- 2) **Aspek Kelembagaan**, yaitu pengkajian mengenai kondisi kelembagaan operator layanan sanitasi, baik yang berada pada pemerintah daerah maupun masyarakat.
- 3) **Aspek Infrastruktur**, yaitu pengkajian terhadap kelengkapan infrastruktur sanitasi yang terbangun dilihat dari sistem pengelolaan rantai layanan sanitasinya.
- 4) **Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat**, yaitu pengkajian mengenai kegiatan-kegiatan perubahan perilaku terkait sanitasi yang dilakukan secara rutin oleh perangkat daerah.
- 5) **Aspek Pendanaan**, yaitu pengkajian terhadap pendanaan pemerintah, non pemerintah, dan retribusi yang dilakukan untuk keberlanjutan pengelolaan pembangunan sanitasi.

4. Target Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo

Target dan sebaran arget akses sanitasi ditentukan berdasarkan kesepakatan pokja terkait pencapaian eksisting masing-masing kabupaten/kota,, sebagaimana dituangkan pada tabel dibawah ini.

Tabel-1
Target Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo

No.	Komponen	Akses Sanitasi -Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
A.	Target Akses Sanitasi (air limbah domestik)					
1.	Layak	92,50%	94,38%	96,25%	98,13%	100,00%
2	Aman	4,88%	8,27%	11,22%	14,16%	17,27%
2.a	SPALD Setempat	4,03%	6,87%	9,31%	11,75%	14,33%
2.b	SPALD Terpusat	0,83%	1,41%	1,91%	2,41%	3,04%
2.b.1	SPALD Terpusat perkotaan dan permukiman berbasis institusi	0,66%	1,13%	1,53%	1,93%	2,43%
2.b.2	SPALD Terpusat permukiman berbasis masyarakat	0,13%	0,23%	0,31%	0,39%	0,49%
3	BABs	7,23%	5,52%	4,31%	3,11%	1,90%
B.	Target Akses Sanitasi persampahan)					
5	Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah	50,05%	56,62%	63,19%	69,75%	85,00%
5.a	Sampah residu tersisa di LUR (Lahan Urug	30,03%	32,77%	35,50%	38,23%	49,18%

No.	Komponen	Akses Sanitasi -Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Residu)					
5.b	Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	20,02%	23,85%	27,69%	31,53%	35,82%
5.b.1	sampah terdaur ulang	6,12%	7,58%	9,04%	10,51%	12,09%

Sumber : Hasil perhitungan berdasarkan capaian sanitasi eksisting, dengan sumber data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, DPUPRKP Provinsi Gorontalo dan OPD Provinsi terkait

Tabel-2
Rekapitulasi Nilai Profil Pengelolaan Persampahan
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Lokasi	NILAI PERATURAN	NILAI KELEMBAGAAN	NILAI INFRASTRUKTUR						NILAI PERILAKU MASYARAKAT	NILAI PENDANAAN	NILAI PROFIL PERNGELOLAN PERSAMPAHAN
			NILAI TPA	NILAI TPST/ PDU	NILAI BANK SAMPAH	NILAI TPS 3R	NILAI INFORMAL	NILAI ANGKUTAN			
Kabupaten Boalemo	66,67%	25,00%	13,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,83%	10,00%	4,40%	30,00%
Kabupaten Gorontalo	66,67%	12,50%	13,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,88%	10,00%	8,00%	32,53%
Kabupaten Pohuwato	66,67%	20,00%	13,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	16,81%	10,00%	4,40%	46,11%
Kabupaten Bone Bolango	66,67%	31,25%	13,33%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	7,05%	10,00%	4,40%	39,06%
Kabupaten Gorontalo Utara	100%	25,00%	13,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,15%	10,00%	4,40%	31,18%
Kota Gorontalo	66,67%	33,33%	40,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	67,83%	10,00%	4,40%	53,17%
Total	66,67%	24,51%	17,78%	5,56%	11,11%	16,67%	16,67%	19,59%	10,00%	5,00%	38,67%

Sumber : Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Tabel-3
Rekapitulasi Nilai Profil Pengelolaan Air Limbah Domestik
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Lokasi	score peraturan	score Kelembagaan	Nilai Infrastruktur Eksisting			Score infrastruktur eksisting	Score Perilaku Masyarakat	Score Pendanaan	Score Total Air Limbah
			score SPALD-T	Score SPALD-S	score angkutan				
Boalemo	10,00%	9,25%	2,67%	11,11%	5,33%	19,11%	10,00%	4,27%	52,63%
Gorontalo	10,00%	9,25%	2,67%	8,59%	5,33%	16,59%	10,00%	2,29%	48,13%
Pohuwato	10,00%	5,89%	2,67%	4,91%	0,00%	7,57%	10,00%	0,00%	33,47%
Bone Bolango	10,00%	6,96%	2,67%	5,03%	0,00%	7,70%	10,00%	0,00%	34,66%
Gorontalo Utara	10,00%	9,25%	2,67%	13,53%	5,33%	18,17%	10,00%	14,00%	61,42%
Kota Gorontalo	10,00%	7,13%	2,67%	9,73%	5,33%	17,73%	10,00%	4,25%	49,10%
Rata-rata	10,00%	7,96%	2,67%	8,82%	3,56%	14,48%	10,00%	4,13%	46,57%

Sumber : Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Note : Pendanaan retribusi terinput dalam sistem, sehingga nilainya >

5. Pengelolaan Sanitasi Oleh Provinsi Gorontalo

Kondisi eksisting pengelolaan sanitasi kewenangan Provinsi dijelaskan pada tabel dibawah ini

Tabel-4
Kondisi Eksisting Pengelolaan Sanitasi Kewenangan Provinsi

No.	Uraian	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	Ketersediaan Peraturan	- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah - Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga - Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat - Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah (pasal 53, angka 1 huruf b)	- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo terkait Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Gorontalo (proses legalisasi) - Peraturan Gubernur Gorontalo No. 66 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 - Peraturan Gubernur Gorontalo No. 39 Tahun 2015 tentang road map sanitasi Tahun 2015-2019
2	Kondisi Kelembagaan	- Operator : UPTD TPA Regional Talumelito - Regulator : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Operator : Belum Ada operator IPAL regional di Provinsi Gorontalo - Regulator : Belum ada
3	Kondisi Infrastruktur	<u>Yang sudah beroperasi</u> - Kabupaten/Kota : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango - Lokasi TPA : Desa Talumelito Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo - Operator Layanan : UPTD TPA Regional Talumelito - Sistem Operasi : <i>controlled landfill</i>	<u>Yang sudah beroperasi</u> - Kabupaten/Kota : belum ada - Lokasi IPAL : belum ada - Operator Layanan : belum ada - Sistem Operasi : belum ada - Kapasitas : belum ada

No.	Uraian	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Air Limbah Domestik
		Kapasitas : 21,05 hektar, 19.430 m³.	
		<u>Yang Direncanakan</u>	<u>Yang Direncanakan</u>
		- Lokasi : TPA Talumelito - FS : disusun tahun 2023 - DED : Tahun 2022 (Revitalisasi Kawasan TPA Talumelito) - AMDAL : belum disusun - LARAP : belum disusun	- Lokasi : belum ada - FSi IPAL : belum ada - DED : belum ada - AMDAL : belum ada - LARAP : belum ada
4	Kerjasama	- Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pembangunan fasilitas pengolahan limbah medis di Provinsi Gorontalo dengan insinerator kapasitas 200 kg/jam, hibah 1 unit truk hino dengan box pendingin. - Kerjasama JICA dengan Bappeda Provinsi Gorontalo dalam kolaborasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat desa yang berada di pesisir danau Limboto.	- Kerjasama city to city dengan Prefektur Ehime Jepang terkait manajemen lingkungan dan pengolahan limbah pabrik kelapa - Dinas Lingkungan Hidup dengan PT. Mondylia Amerta untuk mengembangkan sistem pemantauan air secara kontinu, otomatis dan online (<i>data real time</i>) di Danau Limbot
5	Pendanaan	Pendanaan APBD Provinsi sebesar Rp. 300.000.000 pada tahun 2022 untuk penyusunan DED Revitalisasi Kawasan TPA Talumelito	Pendanaan APBD Provinsi untuk air limbah domestik sebesar Rp. 3.507.683.992 dari Tahun 2019-2024

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP, Tahun 2024

6. Permasalahan Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/kota

Permasalahan pengelolaan sanitasi oleh Kabupaten/kota diuraikan pada tabel dibawah ini

Tabel-5
Permasalahan Regulasi Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Regulasi	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
1.	Boalemo	• Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah • Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah	• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat • Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah
2.	Gorontalo	• Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah • Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah	• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat • Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah
3.	Pohuwato	• Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah sudah berumur 8 tahun sehingga harus disusun Peraturan Daerah yang baru menyesuaikan dengan rencana program jangka menengah nasional Tahun 2025-2029 • Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah • Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah	• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat • Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah
4.	Bone Bolango	• Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah • Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah	• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat • Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah
5.	Gorontalo Utara	• Belum lengkapnya peraturan daerah yang secara pokok mengatur institusi, ketentuan umum kebersihan serta retribusi sampah • Belum ada peraturan daerah terkait pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar-pelanggar dalam pengelolaan sampah • Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah	• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat • Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Regulasi	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
		Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah	
6.	Kota Gorontalo	- Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah - Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah	- Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat - Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

Tabel-6
Permasalahan Kelembagaan Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Kelembagaan	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
1.	Boalemo	Institusi pengelola sampah masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan sampah (belum terpisah operator dan regulator)	- UPTD - Peningkatan SDM UPTD
2.	Gorontalo	Institusi pengelola sampah masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan sampah (belum terpisah operator dan regulator)	- UPTD - Peningkatan SDM UPTD
3.	Pohuwato	Institusi pengelola sampah masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan sampah (belum terpisah operator dan regulator)	Institusi pengelola Air limbah domestik masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan air limbah (belum terpisah operator dan regulator)
4.	Bone Bolango	Institusi pengelola sampah masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan sampah (belum terpisah operator dan regulator)	Institusi pengelola Air limbah domestik masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan air limbah (belum terpisah operator dan regulator)
5.	Gorontalo Utara	- Institusi pengelola sampah masih berbentuk dinas yang memiliki kelemahan dalam pengelolaan anggaran operasi dan pemeliharaan - Kurang dapat mengembangkan SDM dalam pengelola berbentuk dinas karena terbentuk aturan kepegawaian	- UPTD - Peningkatan SDM UPTD
6.	Kota Gorontalo	Institusi pengelola sampah masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan sampah (belum terpisah operator dan regulator)	Institusi pengelola Air limbah domestik masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan air limbah (belum terpisah operator dan regulator)

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

Tabel-7
Permasalahan Infrastruktur Sanitasi Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Infrastruktur	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
1.	Boalemo	• Daya tampung TPA Polohungo kurang mampu menampung sampah yang dihasilkan penduduk kabupaten Boalemo • Armada pengangkutan sampah kurang, sehingga sebagian wilayah layanan tidak terlayani optimal • Instalasi Pengolahan Lindi rusak dan tidak terawat • Belum menerapkan metode pengolahan sampah <i>sanitary landfill</i> • Dari 2 unit TPS 3 R, 2 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah tidak optimal • Belum mempunyai Bank Sampah Induk, bank sampah unit dan komposting skala RW • Belum mempunyai Pusat Daur Ulang (PDU) • Belum mempunyai sektor informal (lapak dan pengepul)	• IPLT Desa Polohungo Kecamatan Dulupi • Belum ada penjaga di lokasi IPLT • Sudah mulai ditumbuhi rumput liar • <i>Screen chamber</i> tidak terpasang • 5 m3 dengan 2 truk tinja • Operasional dan pemeliharaan tidak dilakukan sesuai SOP
2.	Gorontalo	• Dari 1 unit TPS 3 R, 1 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah tidak optimal • Belum mempunyai komposting skala RT RW dan rumah kompos • Belum mempunyai Pusat Daur Ulang (PDU) • Belum mempunyai sektor informal (lapak dan pengepul)	• IPLT Desa Pone Kecamatan Limboto Barat, mempunyai permasalahan seperti areal IPLT ditanami jagung, pipa outlet <i>settling thickening</i> terputus, sehingga kapasitas IPLT sebesar 12 m³/hari tidak dapat dipergunakan • Truk Tinja 2 buah dengan kapasitas 8 m³,
3.	Pohuwato	• Daya tampung TPA Delo Indah kurang mampu menampung sampah yang dihasilkan penduduk kabupaten Pohuwato • Jalan operasional berupa jalan tanah • Kolam lindi tidak berfungsi dan rusak • Geomembran robek • Belum menerapkan metode pengolahan sampah <i>sanitary landfill</i> • Dari 8 unit TPS 3 R, 1 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah tidak optimal	• SPAL Domestik setempat dengan septiktank tidak dapat dikatakan aman karena tidak ada proses penyedotan tinja ke IPLT karena IPLT belum terbangun.

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Infrastruktur	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
		• Belum mempunyai komposting skala RT RW	
4.	Bone Bolango	• TPA Lonuo belum berfungsi karena belum adanya alat berat • Dari 3 unit TPS 3 R, 3 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah tidak optimal • Belum mempunyai Bank Sampah Induk, bank sampah unit dan komposting skala RW • Belum mempunyai Pusat Daur Ulang (PDU)	• SPAL Domestik setempat dengan septiktank tidak dapat dikatakan aman karena tidak ada proses penyedotan tinja ke IPLT karena IPLT belum terbangun.
5.	Gorontalo Utara	• Daya tampung TPA Molantadu Kecamatan Tomilito kurang mampu menampung sampah yang dihasilkan penduduk kabupaten Gorontalo Utara • Alat berat tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya • Saluran dan unit pengolahan lindi tidak berfungsi baik • Beberapa titik geomembran robek • Sel landfill terisi tanaman air • TPA belum dilengkapi jembatan timbang, pagar keliling, sarana listrik dan air bersih • Armada pengangkutan sampah kurang, sehingga sebagian wilayah layanan tidak terlayani optimal • TPST Bukit Ru'ya belum berfungsi optimal terkait dengan pemilahan dan daur ulang sampah • Dari 3 unit TPS 3 R, 3 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah tidak optimal • Belum mempunyai Bank Sampah Induk, bank sampah unit dan komposting skala RW • Belum mempunyai Pusat Daur Ulang (PDU)	• Mobil tinja bantuan DAK Tahun 2019 tidak berfungsi optimal • IPLT Mootinelo Kecamatan Kwandang belum berfungsi maksimal • Scrren chamber tidak terpasang • Jalan akses belum ada pengerasan • Belum ada petugas di IPLT • Kapasitas 8 m³ dengan 3 truk tinja • Operasional dan pemeliharaan tidak dilakukan sesuai SOP
6.	Kota Gorontalo	• Dari 10 unit TPS 3 R, 6 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah berkurang • Belum mempunyai Pusat Daur Ulang (PDU)	• IPLT Kecamatan Kota Utara • Masih ada kegiatan lain di sekitar lokasi IPLT • Pembuangan langsung ke bak pengering lumpur • Kapasitas 10 m³ dengan 2 truk kapasitas 5000 L • Operasional dan pemeliharaan tidak dilakukan sesuai SOP

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

Tabel-8
Permasalahan Perilaku Masyarakat Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Kelembagaan	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
1.	Boalemo	Implementasi program 3 R sangat rendah	Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL
2.	Gorontalo		Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL
3.	Pohuwato		Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL
4.	Bone Bolango		Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL
5.	Gorontalo Utara	Masyarakat belum seluruhnya menerapkan pola pengolahan 3 R di sumber sampah rumah tangga	Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL
6.	Kota Gorontalo		Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

Tabel-9
Permasalahan Pendanaan Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Kelembagaan	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
1.	Boalemo	- Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 0,086% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah - Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah - Realisasi Retribusi baru mencapai 11% dari target yang ditetapkan	Rendahnya biaya operasi dan pemeliharaan IPLT
2.	Gorontalo	- Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 0,173% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah - Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah - Realisasi Retribusi baru mencapai 76% dari target yang ditetapkan	Rendahnya biaya operasi dan pemeliharaan IPLT
3.	Pohuwato	- Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 0,4% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah - Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah - Realisasi Retribusi baru mencapai 8% dari target yang ditetapkan	

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Kelembagaan	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
4.	Bone Bolango	- Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 0,183% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah - Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah - Realisasi Retribusi baru mencapai 42% dari target yang ditetapkan	
5.	Gorontalo Utara	- Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 0,02% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah - Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah - Realisasi Retribusi baru mencapai 8% dari target yang ditetapkan	Rendahnya biaya operasi dan pemeliharaan IPLT
6.	Kota Gorontalo	- Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 57% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah - Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah - Realisasi Retribusi baru mencapai 11% dari target yang ditetapkan	Rendahnya biaya operasi dan pemeliharaan IPLT

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

7. Permasalahan Pengelolaan Sanitasi Provinsi

Permasalahan pengelolaan sanitasi oleh Provinsi diuraikan pada tabel dibawah ini

Tabel-10
Permasalahan Pengelolaan Persampahan Provinsi

No	Aspek	Permasalahan
1.	Peraturan	• Peraturan terkait pengelolaan sampah yang disusun pada Tahun 2013 sudah selayaknya diperbaharui dengan peraturan sejenis di tahun 2025. • Belum disusunnya peraturan kepala daerah terkait pengurangan sampah dan penanganan sampah pada wilayah kewenangan provinsi • Belum tersusunnya Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Provinsi Gorontalo • Belum lengkapnya norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • Pemerintah provinsi belum menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dapat diakses masyarakat • Diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah tidak dilaksanakan secara kontinu • Belum disusunnya peraturan terkait penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
2.	Kelembagaam	• Kurangnya Pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah khususnya karyawan dan petugas pada UPTD TPA Regional Talumelito • Belum terjalinya penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait lembaga pengelola TPA regional Talumelito • Belum kontinunya peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; • Belum ada sistem informasi terintegrasi antara UPTD dengan Provinsi dan Pusat • Belum terdapat sinergi antara OPD pengelola sampah dengan kelurahan dan kecamatan serta masyarakat, serta belum dijalankannya insentif dan disinsentif secara terprogram dan konsisten
3.	Infrastruktur	• Belum terdapat kepastian dalam pengembangan landfill TPA Regional Talumelito terkait penuhnya sampah pada lahan penimbunan eksisting • Belum terdapat upaya pembatasan timbulan sampah dari kabupaten/kota yang menjadi wilayah layanan TPA Sampah Regional Talumelito • Belum menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya • Belum adanya produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin

No	Aspek	Permasalahan
		• Belum meratanya sarana pendauran ulang sampah • Belum seluruh masyarakat melakukan pemanfaatan kembali sampah • Kurangnya penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah • Kurangnya fasilitasi pemerintah daerah dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan • Kurangnya fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan sampah • Belum adanya penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • Belum adanya penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna • Belum seluruh desa/kelurahan memiliki unit pengelola sampah (bank sampah) dan terdapat unit pengelola sampah (bank sampah) yang tidak aktif melakukan pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce reuse, recycle) • Belum semua unit pengelola sampah mempunyai bentuk pemilahan sampah yang dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali;
4.	Perilaku Masyarakat	• Program sosialisasi dan edukasi dari pemerintah kepada masyarakat/pengelola sampah mandiri/jasa pengelola sampah/badan usaha/instansi pemerintah belum optimal dilaksanakan. • Pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pertama dalam hal pengurangan dan penanganan sampah belum diatur secara jelas, sifatnya hanya himbauan. Pembentukan kelompok swadaya masyarakat untuk kepengurusan bank sampah juga tidak dengan jelas diatur tugas dan fungsinya • Kurangnya pendekatan komprehensif yang melibatkan masyarakat, pemerintah baik ditingkat lokal, provinsi dan nasional maupun sektor swasta • Kurangnya penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi • Belum terdapat partisipasi dalam mengurangi sampah dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan daerah. Pihak swasta atau pihak lainnya diharapkan mengikuti ketentuan dalam pengelolaan sampah yang ditimbulkannya. • Minimnya pembinaan berkelanjutan dari pemerintah kepada masyarakat akan pentingnya pembentukan bank sampah di setiap desa/kelurahan • Belum tersosialisasinya kegiatan pemilahan menjadi tanggungjawab dari setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya serta pemerintah kabupaten/kota
5.	Pendanaan	• Prosentase pendanaan untuk pengelolaan persampahan masih berkisar antara 0,1%-2% dari APBD Provinsi, sehingga menyulitkan operasional pengelolaan sampah • Kurangnya langkah-langkah penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan

No	Aspek	Permasalahan
		anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • Belum adanya penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

Tabel-11
Permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi

No	Aspek	Permasalahan
1.	Peraturan	• Belum ada peraturan daerah terkait air limbah domestik, yang ada tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Pengelola IPAL Regional belum ada di Provinsi Gorontalo, akan tetapi naskah akademik terkait pengelolaan SPAL di Provinsi Gorontalo dapat dipersiapkan.
2.	Kelembagaan	• Pemerintah Daerah yang menjadi garda terdepan pengelolaan air limbah (sanitasi) masih belum dilengkapi dengan kebijakan dan pengaturan soal organisasi dan tata kerja institusi atau lembaga yang bertugas mengelola prasarana dan sarana yang ada. • Perangkat pengaturan masih jauh dari operasional sehingga pengelolaan, terutama pemeliharaan, prasarana dan sarana menjadi terbatas.
3.	Infrastruktur	• Belum adanya IPAL Regional yang melayani wilayah perkotaan di Provinsi Gorontalo, hal ini dapat difahami dengan kondisi kepadatan penduduk yang < 15.000 jiwa/km². • Data-data yang reliable dan valid atas prasarana dan sarana air limbah sangat terbatas sehingga sulit untuk melakukan identifikasi kebutuhan peningkatan pelayanan • Perhatian yang terbatas kepada air limbah juga ditandai dengan keterbatasan pilihan teknologi alternatif sehingga aplikasinya pada masalah dan lingkungan yang beragam, misalnya untuk jenis buangan padat dan cair, dari kawasan industri maupun rumah tangga, menjadi jauh dari optimal
4.	Perilaku Masyarakat	• akses masyarakat pada fasilitas sanitasi yang layak cukup tinggi, sayangnya tingkat aksesibilitas ini tidak memperhitungkan kepemilikan atau tingkat penggunaan jamban itu sendiri. • Sanitasi juga masih menjadi masalah pelik, terutama di daerah perdesaan, karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Hal ini menyebabkan banyaknya jamban yang tidak digunakan sebagaimana mestinya karena ketidaktahuan masyarakat. Sayangnya LSM yang bergerak di bidang sanitasi masih sangat sedikit. • Keterlibatan dan komitmen pemangku-kepentingan (stakeholder) termasuk pemerintah, para wakil rakyat, dunia usaha, dan warga masih jauh dari kemampuan untuk bersama-sama berembuk dan bertindak sesuai kesepakatan peran dan kewajiban untuk mengelola air limbah
5.	Pendanaan	• Minimnya kepedulian pemerintah dan wakil rakyat akan persoalan sanitasi tercermin dari alokasi anggaran yang sangat sedikit untuk pembangunan fasilitas sanitasi dasar. Padahal, bahaya kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas air baku karena kurangnya perhatian pada masalah sanitasi dapat menyebabkan upaya perbaikan yang 10 kali lebih mahal daripada biaya pencegahannya

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

8. Visi dan Misi Pembangunan Sanitasi

a) Visi Sanitasi Provinsi Gorontalo

Visi

"Terwujudnya Sanitasi Layak, Aman dan Berkelanjutan di Provinsi Gorontalo "

b) Misi Sanitasi Provinsi Gorontalo

Pengelolaan Sampah

- 1). Mewujudkan perubahan perilaku yang hygiene dan sanitasi dengan gerakan BASNOL (gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol), dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi aman yang merupakan bagian dari sanitasi layak dengan pendekatan STBM yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan
- 2). Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah dengan sistem setempat (*on-site*) dan sistem terpusat (*off-site*)
- 3). Mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh air limbah permukiman
- 4). Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha agar lebih berperan aktif dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman
- 5). Menyiapkan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman
- 6). Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan pengelolaan air limbah permukiman dengan prinsip *good corporate governance*
- 7). Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman

Pengelolaan Air Limbah

- 1). Meningkatkan perubahan perilaku terutama persepsi dan tanggungjawab masyarakat terhadap pengelolaan sampah
- 2). Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan dengan mengedepankan tanggungjawab individu.
- 3). Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan
- 4). Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha/swasta
- 5). Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan prinsip *good and corporate governance*, yang berupa:
 - a) Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan persampahan
 - b) Penyelenggaraan pengelolaan persampahan yang transparan, partisipatif, serta akuntabel dalam pengelolaannya
 - c) Pelibatan semua stakeholder dalam pengelolaan persampahan

- d) Pengelolaan persampahan secara efektif, efisien dan profesional
 - e) Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan pengelola persampahan
 - f) Peningkatan jumlah sampah pada Bank Sampah induk dan Bank Sampah Unit
 - g) Mewujudkan pengelolaan sampah organik langsung dari sumbernya
- 6). Memobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan sistem pengelolaan persampahan:
- a) Peningkatan prioritas dan alokasi pendanaan bagi penyelenggaraan pelayanan persampahan
 - b) Pengembangan potensi pendanaan untuk pengelolaan persampahan, baik melalui anggaran kabupaten/kota, provinsi, pusat dana luar negeri, termasuk kerjasama dengan dunia usaha/swasta
 - c) Pengembangan dan perkuatan bagi kota-kota yang belum mampu menyediakan pelayanan minimal
 - d) Membentuk wadah promosi dan publikasi produk daur ulang melalui galeri produk daur ulang sampah
 - e) Merencanakan rumah pintar belajar sampah (trash Play House), yaitu gerakan produktif pengelolaan sampah terintegrasi di kawasan strategis destinasi wisata
 - f) Mengembangkan solusi dan peningkatan nilai tambah pengelolaan sampah yang terintegrasi melalui 4R (Reduce, Reuse, Recycle, dan Replace) secara produktif dan inovatif serta berdampak ekonomis bagi masyarakat;
 - g) Diversifikasi bisnis TPS3R untuk menghasilkan pendapatan serta nilai tambah dalam pengelolaan sampah bagi Komunitas, Masyarakat dan Desa;
- 7). Menegakkan hukum dan melengkapi peraturan perundangan:
- a) Penegakan hukum dan pemberlakuan sanksi bagi pelanggaran penyelenggaraan persampahan sebagai upaya pembinaan bagi masyarakat, aparat dan stakeholder terkait
 - b) Melengkapi/meningkatkan produk hukum yang diperlukan bagi penyelenggaraan pengelolaan persampahan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota

9. Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran

Isu strategis dalam roadmap sanitasi Provinsi Gorontalo untuk pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan persampahan diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel-12
Isu Strategis Sanitasi dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
Pengelolaan Air limbah Domestik	Aspek Standar dan Regulasi (Peraturan)	1 Inisiatif pembentukan Perda Air Limbah Domestik di 6 (enam) kabupaten/kota
		2 Inisiatif kelengkapan pengaturan kepala daerah/kebijakan lainnya yang mengatur teknis operasional SPALD-S dan SPALD-T di 6 Kab/kota sesuai amanat Perda
		3 Komitmen tinjau ulang dan/atau pembentukan perda retribusi sedot tinja berdasarkan kesesuaian dan pengaturan terkini
		4 Kesiapan kabupaten/kota dalam menyediakan dokumen perencanaan teknis yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai rujukan rencana perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik
		5 Belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan air limbah permukiman
		6 masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan-peraturan yang terkait dengan pencemaran air limbah
		7 belum lengkapnya Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan air limbah
		8 pengawasan dan penerapan aturan terhadap oknum yang melakukan pencemaran lingkungan
	Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola	1 lemahnya fungsi kelembagaan di daerah dalam melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman
		2 Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah permukiman
		3 kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman masih belum terampil
		4 Perlu ditingkatkannya koordinasi antar instansi terkait dalam penetapan kebijakan di bidang air limbah permukiman
		5 Tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar pembangunan ekologi, sosial dan lingkungan hidup
		6 Tuntutan penerapan <i>good governance</i> melalui demokratisasi yang menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan
		8 Tuntutan Rencana Aksi Nasional dalam menghadapi perubahan iklim

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis	
	Aspek Infrastruktur dan Teknologi	1	Akses masyarakat terhadap prasarana sanitasi dasar di perkotaan dan pedesaan
		2	Tingkat pelayanan pengelolaan air limbah permukiman di perkotaan melalui sistem setempat (on site) yang aman dan melalui sistem terpusat (off site)
		3	Sebagian besar fasilitas pengolahan air limbah setempat masih belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan
		4	Masih adanya masyarakat buang air besar sembarangan
		5	Sub sistem pengolahan setempat yang belum memenuhi kriteria teknis
		6	Sub sistem pengangkutan belum memadai dibandingkan dengan volume air limbah dan lumpur tinja
		7	Kapasitas dan teknologi dalam Sub sistem pengolahan lumpur tinja kurang sesuai dengan karakteristik air limbah yang dihasilkan
		8	Terbatasnya lahan untuk sub sistem pengolahan setempat skala komunal (2-10 rumah tinggal)
		9	Belum adanya peraturan penyedotan lumpur tinja swasta
		10	terdapat infrastruktur sanitasi yang sudah terbangun, tetapi terkendala operasionalisasinya
		11	Tidak adanya Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2), karena sementara masih mempergunakan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3)
		12	Kualitas air limbah yang dianalisis masih diatas baku mutu untuk parameter total coliform, COD dan BOD (untuk IPLT Dulomo Kota Gorontalo) serta untuk IPAL Komunal di Komplek Gah 42
		13	Tidak ada pengukuran kualitas efluen
		14	Kurangnya media untuk upaya komunikasi tentang air limbah kepada masyarakat
		15	Pengelolaan air limbah domestik menggunakan SPALD Terpusat belum sesuai dengan kondisi wilayah dan keadaan penduduk terkait topografi wilayah dan retribusi IPAL Komunal berbasis masyarakat
	Aspek Partisipasi Masyarakat	1	Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah permukiman
		2	terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang berbasis masyarakat
		3	potensi yang ada dalam masyarakat dan dunia usaha belum sepenuhnya diberdayakan oleh pemerintah
		4	Belum adanya komunitas sosial untuk menggerakkan masyarakat agar peduli lingkungan
		5	Praktek pengurasan lumpur tinja sangat rendah setiap tahun
	Aspek Pendanaan	1	rendahnya tarif pelayanan air limbah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya biaya operasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
		2 terbatasnya sumber pendanaan pemerintah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tingginya biaya investasi awal pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat
		3 kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah, dan belum optimalnya pengalihan potensi pendanaan dari masyarakat dan dunia usaha/swasta/koperasi
		4 rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah untuk pengelolaan dan pengembangan air limbah permukiman
		5 rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan air limbah permukiman baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah
		6 Belum optimalnya penggalian sumber dana untuk investasi dan biaya operasi pemeliharaan terutama dari pihak swasta yang harus sinergis dengan penerapan pemulihan biaya (cost recovery) secara bertahap merupakan tantangan yang harus segera diketahui solusinya secara "win-win solution"
		7 pembagian porsi antara dana APBN dan APBD yang akan dialokasikan dalam pengembangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah belum terlihat secara tegas
		8 Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tingginya biaya investasi awal pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat (% APBD murni untuk sanitasi sebesar < 1%)
		9 Rendahnya skala prioritas penanganan air limbah permukiman baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah

Sumber : Analisis Konsultan, 2024

Tabel-13
Isu Strategis Sanitasi dalam Pengelolaan Persampahan

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
Pengelolaan Persampahan	Aspek Standar dan Regulasi (Peraturan)	1 Masih lemahnya penegakan hukum sebagai upaya preventif dalam pengendalian lingkungan hidup
		Pengoperasian TPA dengan <i>sanitary Landfil</i> belum berjalan
		Pengelola kawasan pada umumnya belum menyediakan fasilitas pemilahan sampah (pasal 45 Undang-undang 18 Tahun 2008)
		Pelaporan pengelolaan sampah kepada Kementerian/Lembaga (pasal 41 Permendagri No. 33 Tahun 2010)
		2 Penerapan sanksi hukum bagi pelanggar belum menjadi prioritas

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
		Kebijakan berupa peraturan perundang-undangan terakut belum terinformasikan secara sistematis
		Belum disusunnya peraturan terkait sanksi hukum pelanggaran sampah
		3 Belum ada peraturan terkait pengurangan sampah dan penanganan sampah
		4 Meningkatnya komitmen tinjau ulang dan/atau pembentukan perda retribusi pengangkutan sampah berdasarkan kesesuaian dan pengaturan terkini
		5 Meningkatnya kesiapan Kabupaten/Kota dalam menyediakan dokumen perencanaan teknis yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai rujukan rencana perangkat daerah yang membidangi persampahan
		6 Peraturan yang secara khusus mengatur tentang tatacara pelaksanaan pemberian kompensasi, insentif, disinsentif untuk pengelolaan sampah
		7 Belum ada peraturan yang mengatur tentang pengalokasian anggaran untuk pengelolaan sampah
		8 Pemasaran produk daur ulang dan kompos dari sampah belum diatur dalam peraturan daerah
		9 Peraturan terkait industri dan pelaku daur ulang sampah
	Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola	1 Sarana prasarana TPA belum lengkap, sehingga kelembagaan daerah tidak bersedia menerima infrastruktur yang dibangun
		2 Peranan lembaga/institusi pengelola sampah sebagaimana yang ada sekarang ini di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, masih menyatu antara peran operator dan regulator yaitu SKPD Dinas.
		3 Keterpaduan antara kementerian/lembaga dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah belum diterapkan sesuai amanat Undang-undang (dalam masalah sampah dan produk kemasan, dalam masalah penutupan dan/atau rehabilitasi TPA)
	Aspek Infrastruktur dan Teknologi	1 Belum diterapkannya pengurangan sampah dari sumber (produsen) yaitu dengan menerapkan <i>EPR (extended producer responsibility)</i> /kewajiban produsen
		Upaya masyarakat dalam daur ulang sampah masih terhambat dalam pemasaran hasil produk
		Sampah belum dipilah sesuai jenis sampah
		Sistem pewadahan masih tercampur
		Jumlah dan kualitas wadah sampah terbatas
		2 Pengumpulan
		Pengumpulan sampah organik belum dilakukan setiap hari
		Pengumpulan sampah dengan sarana prasarana pengumpul yang belum tersekat dan terpilah
		Masih sulitnya pengadaan lokasi lahan untuk TPS 3R
		Masyarakat cenderung resisten terhadap pembangunan TPS3R

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
		Alat pengumpul sampah masih menggunakan gerobak dorong
		Kuantitas dan kualitas TPS3R masih rendah
		Belum ditetapkan lokasi, jumlah dan luasan TPS dalam Rencana Detail Tata Ruang
		3 Pengangkutan
		Pengangkutan sampah organik belum dilakukan setiap hari
		Jadual pengangkutan sampah yang belum berkoordinasi dengan jadual pengumpulan oleh gerobak/gerobak motor sehingga menyebabkan antrian gerobak/gerobak motor di titik angkut sampah
		Kuantitas dan kualitas kendaraan pengangkut sampah belum mampu mengangkut volume sampah yang dihasilkan
		4 Pengolahan
		Keterbatasan lahan untuk TPST dan/atau <i>intermediate treatment facility (ITF)</i>
		Belum ada implementasi pengolahan sampah dengan teknologi tinggi di Provinsi Gorontalo sebagai <i>best practice</i>
		5 kapasitas pengelolaan sampah sangat terbatas, mengingat TPA sampah regional Talumelito sudah hampir habis kapasitasnya
		6. Pemrosesan Akhir
		Belum dilakukan penutupan TPA dengan <i>cover soil</i> secara rutin setiap hari sesuai amanat Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013
		Pelaksanaan UKL/UPL di TPA yang kurang disiplin menyebabkan pencemaran lingkungan ataupun resistensi masyarakat
		Sulit menyediakan lahan TPS sesuai kebutuhan
		Keterbatasan jenis dan jumlah alat berat di TPA
		Pengolahan air lindi di TPA masih belum memenuhi syarat teknis untuk dibuang ke badan air
		Pengolahan gas di TPA belum optimal yang menyebabkan terlepasnya gas metana ke udara bebas, yang berpotensi menjadi penyumbang terbesar efek gas rumah kaca (GRK) yang tidak sejalan dengan <i>clean development mechanism (CDM)</i>. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan amanat peraturan menteri No. 01 Tahun 2014 yang menyebutkan sistem pengoperasian TPA, pengolahan lindi dan penanganan gas.
		7 cakupan layanan pengelolaan sampah UPTD TPA Regional Talumelito hanya sampai kepada TPS/TPS3R/TST dan kawasan permukiman belum melakukan pengelolaan sampah sendiri

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis	
		8	Pengelola kawasan pada umumnya belum menyediakan fasilitas pemilahan sampah
		9	Sarana prasarana pendukung Tempat Pemrosesan Sampah kurang memadai
		10	Tidak adanya alat berat di TPA Kabupaten Bone Bolango
	Aspek Partisipasi Masyarakat	1	Perilaku yang tidak sesuai dengan pengelolaan sampah yang benar
			Kebiasaan belum memilah sampah dan/atau belum mewadahi sesuai jenis sampah (pasal 12 ayat 1 Undang-undang 18 Tahun 2008)
			Kedisiplinan masyarakat atau warga membuang sampah sesuai aturan yang berlaku
			Kebiasaan lain yang ada di masyarakat tetapi tidak sejalan dengan Undang-undang seperti ‘membakar sampah’
		2	Kedisiplinan dalam pengelolaan sampah (keberlanjutan program pengelolaan sampah)
		3	Pengetahuan masyarakat tentang sampah belum sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sampah yang benar
			Perilaku membuang sampah belum terpilah maupun membakar sampah
			Kegiatan membakar sampah dipandang masyarakat sebagai hal yang biasa dan aman
			Pengetahuan warga tentang 3 R
		4	Kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pengelolaan sampah masih rendah
	Aspek Pendanaan		Belum ditetapkan standar biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan, pengolahan dan pengolahan akhir dalam Rp.ton
			Rendahnya alokasi anggaran pengelolaan sampah, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota
			Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran pengelolaan sampah
			Belum dimanfaatkannya dana desa yang diamanatkan oleh Perpres No. 60 Tahun 2014
		1	Perbandingan jumlah pendapatan biaya jasa pelayanan terhadap anggaran biaya operasional pengelolaan sampah relatif kecil
		2	Penggunaan anggaran Dinas masih belum optimal, mengingat pengelolaan sampah di Provinsi Gorontalo sampai saat ini belum memenuhi standar operasional sistem <i>sanitary landfill</i>
		3	Tarif retribusi belum memperhitungkan biaya mulai dari sumber sampah sampai ke TPA
		4	Kerjasama Badan Usaha dalam pengelolaan sampah masih kurang
		5	Belum terkelolanya sumber-sumber pendanaan lain dari Badan Usaha seperti CSR

Sumber : Analisis Konsultan, 2024

10. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pengelolaan Persampah di Provinsi Gorontalo diuraikan pada tabel dibawah ini

Tabel-14
Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Dalam Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
1	ASPEK PERATURAN DAN KEBIJAKAN	<u>Tujuan:</u> Meningkatkan kelengkapan peraturan tentang air limbah domestik di Kabupaten/ Kota <u>Sasaran:</u> Terbentuknya peraturan daerah dan turunannya tentang pengelolaan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota	<u>Strategi-1</u> Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
			<u>Strategi-2</u> Menyebarkan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
			<u>Strategi-3</u> Menerapkan peraturan perundangan terkait air limbah domestik
			<u>Strategi-4</u> Memperkuat substansi dan penerapan peraturan peundang-undangan sebagai payung hukum penyelenggaraan SPAL Domestik di Provinsi dan Implementasi Sumber Daya Manusia Sanitasi
			<u>Strategi-5</u> Menerapkan dan menegakkan peraturan tentang pengelolaan air limbah
			<u>Strategi-6</u> Menyusun aturan yang mengikat pengembang perumahan sebagai partisipasi kepedulian terhadap sanitasi
2	ASPEK KELEMBAGAAN dan TATA KELOLA	<u>Tujuan:</u> Meningkatkan kapasitas kelembagaan layanan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota	<u>Strategi-1</u> Meningkatkan tata kelola dan kualitas penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan yang mendorong partisipasi dan kolaborasi di daerah

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
		<u>Sasaran:</u> Terbentuknya lembaga pengelola layanan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota	
			<u>Strategi-2</u> Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat;
			<u>Strategi-3</u> Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah;
			<u>Strategi-4</u> Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;
			<u>Strategi-5</u> Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.
			<u>Strategi-6</u> Peningkatan komitmen Kepala Daerah dalam pengelolaan air limbah
			<u>Strategi-7</u> Membentuk dan mengoptimalkan lembaga operator dan regulator
3.	ASPEK PENDANAAN YANG BERKELANJUTAN	<u>Tujuan:</u> Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang air limbah domestik <u>Sasaran:</u> Tercapainya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang air limbah domestik	<u>Strategi-1</u> Meningkatkan alokasi pendanaan APBN/APBD Provinsi dan mengkonsolidasi potensi pembiayaan dan program prioritas pembangunan lain untuk pembangunan pengelolaan air limbah
			<u>Strategi-2</u> Mengembangkan dan memobilisasi sumber pembiayaan dari masyarakat dan swasta untuk pembangunan infrastruktur serta penyediaan akses dan layanan pengelolaan air limbah
			<u>Strategi-3</u> Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman;
			<u>Strategi-4</u> Pembiayaan Bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama.

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
			<u>Strategi-5</u> Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.
			<u>Strategi-6</u> Menyiapkan penganggaran guna pembangunan /pengadaan sarana dan prasarana air limbah dari berbagai pihak
4.	ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT	<u>Tujuan:</u> Meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam BABS <u>Sasaran:</u> Tercapainya target 0% BABS	<u>Strategi-1</u> Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPAL Domestik dan peningkatan akses sanitasi aman
			<u>Strategi-2</u> Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;
			<u>Strategi-3</u> Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat di Permukiman dengan SPAL D Terpusat berbasis institusi dan SPALD Terpusat berbasis masyarakat
			<u>Strategi-4</u> Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
			<u>Strategi-5</u> Menciptakan ekosistem berbasis inovasi melibatkan sektor swasta dan pelaku bisnis untuk memperkuat pasar terkait penyediaan layanan sanitasi aman di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota
			<u>Strategi-6</u> Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;
			<u>Strategi-7</u> Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat di Kawasan perkotaan
			<u>Strategi-8</u> Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
			<u>Strategi-9</u> Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.
			<u>Strategi-10</u>

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
			Lebih sering melakukan komunikasi dan mengadakan program/kegiatan yang melibatkan swasta dan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di lingkungan permukiman
			<u>Strategi-11</u> Penyiapan tim yang rutin melakukan pemecuan dan promosi kesehatan
5.	ASPEK INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	<u>Tujuan:</u> Menyediakan infrastruktur layanan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan <u>Sasaran:</u> Tercapainya akses layak dan aman air limbah domestik	<u>Strategi-1</u> Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi
			<u>Strategi-2</u> Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi
			<u>Strategi-3</u> Pengembangan konsep <i>resource recovery</i> dan <i>circular economy</i>
			<u>Strategi-4</u> Penyusunan panduan di tingkat provinsi mengenai pengelolaan air limbah
			<u>Strategi-5</u> Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi melalui kerjasama dengan universitas
			<u>Strategi-6</u> Pembangunan infrastruktur Sanitasi
			<u>Strategi-7</u> Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap atau <i>incremental approach</i>
			<u>Strategi-8</u> Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi, yaitu <i>national water and sanitation information services</i> /layanan informasi air minum dan sanitasi nasional
			<u>Strategi-9</u> Menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kawasan Strategis Provinsi
			<u>Strategi-10</u> melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan air limbah
			<u>Strategi-11</u>

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
			Melaksanakan pilot proyek dalam pengelolaan air limbah dari sub sistem pengumpulan sampai pengolahan
			<u>Strategi-12</u> Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan kabupaten/kota
			<u>Strategi-13</u> meningkatkan cakupan pelayanan secara sederhana dan berkeadilan
			<u>Strategi-14</u> Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi
			<u>Strategi-15</u> Menyelenggarakan perencanaan di bidang air limbah secara menyeluruh dan terintegrasi

Sumber : Hasil Analisis Konsultan RSP, 2024

Tabel-15
Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Persampahan
Dalam Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
1	ASPEK PERATURAN DAN KEBIJAKAN	<u>Tujuan:</u> Meningkatkan kelengkapan peraturan tentang persampahan di Kabupaten/Kota <u>Sasaran:</u> Terbentuknya peraturan daerah dan turunannya tentang pengelolaan sampah di provinsi dan kabupaten/kota	<u>Strategi-1</u> Penyusunan regulasi di daerah mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
			<u>Strategi-2</u> Penyediaan mekanisme insentif bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur Sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan
			<u>Strategi-3</u> Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan Sanitasi oleh masyarakat/konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan sampah dengan menetapkan tarif jasa/retribusi layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berdasarkan klasifikasi pelanggan rumah tangga dan/atau pelanggan non-rumah tangga lainnya, serta

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
			melakukan tinjau ulang terkait penerapan tarif jasa/retribusi layanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
			<u>Strategi-4</u> melengkapi dan merevisi peraturan terkait perundang-undangan di tingkat provinsi dan daerah terkait pengelolaan sampah, penanganan sampah dan pengurangan sampah
			<u>Strategi-5</u> Menerapkan dan menegakkan peraturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
2	ASPEK KELEMBAGAAN dan TATA KELOLA	<u>Tujuan:</u> Meningkatkan kapasitas kelembagaan layanan persampahan di provinsi dan kabupaten/kota <u>Sasaran:</u> • Terbentuknya lembaga pengelola layanan persampahan di provinsi dan kabupaten/kota	<u>Strategi-1</u> Pengembangan sistem pengelolaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
			<u>Strategi-2</u> Pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan persampahan
			<u>Strategi-3</u> Penguatan peran dan kapasitas UPTD air limbah domestik regional sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan air limbah domestik
			<u>Strategi-4</u> Membentuk badan koordinasi pengelolaan sampah tingkat Provinsi dan peningkatan kerjasama antar OPD selain Pokja Sanitasi
			<u>Strategi-5</u> Menata fungsi Dinas/instansi pengelola sampah di tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai kondisi daerah
			<u>Strategi-6</u> Peningkatan komitmen Kepala Daerah dalam pengelolaan persampahan
3	ASPEK PENDANAAN YANG BERKELANJUTAN	<u>Tujuan:</u> Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang persampahan <u>Sasaran:</u> Tercapainya kerjasama	<u>Strategi-1</u> Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
		pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang persampahan	
			<u>Strategi-2</u> Pengembangan sanitasi melalui sistem pembiayaan yang inovatif dengan membentuk sistem pembiayaan untuk pengembangan layanan sanitasi
			<u>Strategi-3</u> Fasilitasi pemerintah Provinsi untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain yang konsen terhadap pengelolaan persampahan
			<u>Strategi-4</u> Menciptakan wirausaha sanitasi di daerah yang memiliki potensi
			<u>Strategi-5</u> Fasilitasi wirausaha sanitasi agar mampu menciptakan produk yang sesuai dengan standar
			<u>Strategi-6</u> Menerapkan dan mengembangkan skema investasi, dana operasional dan pemeliharaan dalam pengurangan sampah
			<u>Strategi-7</u> Melaksanakan <i>extended producer responsibility</i>
			<u>Strategi-8</u> Melaksanakan CSR
			<u>Strategi-9</u> Pengaturan kembali <i>tipping fee</i>
			<u>Strategi-10</u> Pengembangan Kerjasama dan Pola Pendanaan
4	ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT	<u>Tujuan:</u> Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengurangan sampah <u>Sasaran:</u> Tercapainya target pengurangan sampah oleh masyarakat	<u>Strategi-1</u> Pelaksanaan program perubahan perilaku terhadap pola kumpul angkut buang
			<u>Strategi-2</u> Penguatan program pemilahan sampah dalam skala rumah tangga
			<u>Strategi-3</u> Penguatan program minimisasi dan daur ulang sampah
			<u>Strategi-4</u> Penguatan kampanye pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
			rumah tangga
5	ASPEK INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	<u>Tujuan:</u> Menyediakan infrastruktur layanan persampahan di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan <u>Sasaran:</u> Tercapainya rumah tangga yang memiliki akses persampahan yang layak	<u>Strategi-1</u> Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi
			<u>Strategi-2</u> Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi
			<u>Strategi-3</u> Pengembangan konsep <i>resource recovery</i> dan <i>circular economy</i>
			<u>Strategi-4</u> Penyusunan panduan di tingkat provinsi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
			<u>Strategi-5</u> Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi melalui kerjasama dengan universitas
			<u>Strategi-6</u> Pembangunan infrastruktur Sanitasi
			<u>Strategi-7</u> Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap atau <i>incremental approach</i>
			<u>Strategi-8</u> Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi, yaitu <i>national water and sanitation information services</i> /layanan informasi air minum dan sanitasi nasional
			<u>Strategi-9</u> Menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
			<u>Strategi-10</u> Meningkatkan pengurangan sampah pada tahapan implementasi
			<u>Strategi-11</u> melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
			<u>Strategi-12</u> Melaksanakan pilot proyek dalam pengelolaan sampah dari sub sistem

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
			pemilahan/pewadahan sampai pemrosesan akhir
			<u>Strategi-13</u> Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan kabupaten/kota
			<u>Strategi-14</u> meningkatkan cakupan pelayanan secara sederhana dan berkeadilan
			<u>Strategi-15</u> Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi

Sumber : Hasil Analisis Konsultan RSP, 2024

11. Skenario Pengelolaan

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pengelolaan Persampahan di Provinsi Gorontalo dengan target akses aman Sanitasi Tahun 2030 diharapkan dapat dicapai melalui beberapa tujuan dan sasaran, yaitu:

- a) Pemenuhan akses sanitasi yang aman, berkelanjutan dan berketahanan iklim
- b) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular
- c) Pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman, seperti sanitasi aman dan pengelolaan persampahan

Tabel-16
Skenario Pencapaian Sasaran Jangka Menengah
Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Komponen	Akses Sanitasi -Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
A.	Target Akses Sanitasi (air limbah domestik)					
1.	Layak	92,50%	94,38%	96,25%	98,13%	100,00%
2	Aman	4,88%	8,27%	11,22%	14,16%	17,27%
2.a	SPALD Setempat	4,03%	6,87%	9,31%	11,75%	14,33%
2.b	SPALD Terpusat	0,83%	1,41%	1,91%	2,41%	3,04%
2.b.1	<i>SPALD Terpusat perkotaan dan permukiman berbasis institusi</i>	0,66%	1,13%	1,53%	1,93%	2,43%
2.b.2	<i>SPALD Terpusat permukiman berbasis masyarakat</i>	0,13%	0,23%	0,31%	0,39%	0,49%
3	BABs	7,23%	5,52%	4,31%	3,11%	1,90%
B.	Target Akses Sanitasi persampahan)					
5	Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah	50,05%	56,62%	63,19%	69,75%	85,00%
5.a	Sampah residu tersisa di LUR (Lahan Urug Residu)	30,03%	32,77%	35,50%	38,23%	49,18%
5.b	Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	20,02%	23,85%	27,69%	31,53%	35,82%
5.b.1	sampah terdaur ulang	6,12%	7,58%	9,04%	10,51%	12,09%

Sumber : Hasil perhitungan berdasarkan capaian sanitasi eksisting

12. Rencana Aksi Sanitasi

Perumusan rencana aksi dilakukan berdasarkan hasil analisis rekomendasi masing-masing aspek pengelolaan sanitasi sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya yang merujuk pada isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan;

Tabel-17
Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo (Pengelolaan Sampah)
Tahun 2025-2029

TUJUAN : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah di sumber, menurunkan timbulan sampah yang diangkut ke TPA, meningkatkan sampah yang diangkut ke pusat pengolahan sampah, meningkatkan sampah yang terolah menjadi bahan baku, meningkatkan sampah yang termanfaatkan menjadi energi

SASARAN : Rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah sebesar 62,98% pada Tahun 2029, sampah residu tersisa di LUR sebesar 34,79%, sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah = 31,52% dan sampah terdaur ulang = 12,79 % pada Tahun 2029

STRATEGI : Pemenuhan Akses aman dan layanan berkelanjutan

Kebijakan	Rencana Aksi
1. ASPEK STANDAR DAN REGULASI	
a. melengkapi dan merevisi peraturan terkait perundang-undangan di tingkat provinsi dan daerah terkait pengelolaan sampah, penanganan sampah dan pengurangan sampah	1 Penyusunan peraturan pelaksanaan yang diperlukan sebagai bentuk penjabaran dari Undang-undang atau peraturan yang berlaku terkait pengelolaan sampah di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota
	2 Penyusunan surat edaran gubernur tentang percepatan pengelolaan sampah
	3 Sinkronisasi produk hukum terkait pengelolaan sampah antar OPD Provinsi
b. Penyusunan sistem informasi pengelolaan persampahan Provinsi Gorontalo	1 Melengkapi dan merevisi produk hukum yang menghambat dalam pengelolaan sampah
	2 Penyusunan peraturan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan sanksi dalam pengelolaan dan pengolahan sampah
	3 Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pengalokasian dan pengaturan anggaran untuk pengelolaan

Kebijakan		Rencana Aksi	
			sampah
		4	Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan <i>EPR (extended producer Responsibility)</i> atau kewajiban produsen pengelolaan sampah
		5	Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan <i>CSR (corporate social responsibility)</i> untuk pengelolaan sampah
c.	Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1	Penyusunan peraturan tentang kompensasi, insentif dan disinsentif untuk pengelolaan sampah
		2	Penyusunan peraturan tentang industri daur ulang dan pemasaran
		3	Pengembangan SPM dan NSPK dalam kegiatan pengelolaan sampah di tingkat provinsi dan daerah
d.	Menerapkan dan menegakkan peraturan tentang pengelolaan sampah	1	Sosialisasi produk hukum dalam bentuk desiminasi terkait pengelolaan sampah melalui media komunikasi secara profesional dan kontinu
e.	Penguatan penegakan hukum	2	Penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah secara konsisten
f.	Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1	menyempurnakan atau melengkapi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah
		2	Menerapkan dan mengembangkan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah
		3	pengembangan standar/kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan sampah
		4	pengembangan standar/kriteria sarana dan prasarana dalam pengurangan sampah
		5	pengembangan SOP dalam pengurangan sampah
2	ASPEK KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA		
a.	Membentuk badan koordinasi pengelolaan sampah tingkat Provinsi dan peningkatan kerjasama antar OPD selain Pokja Sanitasi	1	Pembentukan badan koordinasi dengan penegasan tugas dan fungsi masing-masing terkait pengelolaan sampah
		2	Pembentukan badan koordinasi

Kebijakan	Rencana Aksi
	pengelolaan sampah provinsi
b. Menata fungsi Dinas/instansi pengelola sampah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kondisi daerah	1 Penyusunan nomenklatur pengelola sampah tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan indikator beban pengelolaan sampah provinsi/kabupaten/kota
c. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1 Penyusunan peran regulator dan operator dalam pengelolaan sampah
d. Peningkatan status dan kapasitas institusi pengelola persampahan	1 Pembentukan kelembagaan pengelola sampah di masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku
e. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder	1 Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan sampah
f. Memisahkan fungsi /unit regulator dan operator	1 meningkatkan kapasitas leadership, kelembagaan dan SDM dalam upaya pengurangan sampah
g. Peningkatan komitmen Kepala Daerah	1 Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
	2 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
	3 Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	4 Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi
	5 koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan
	6 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
h. Meningkatkan kualitas SDM bidang persampahan	1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
	2 Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
	3 Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
	4 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
	5 Perencanaan Kawasan Strategis

Kebijakan	Rencana Aksi
	Pariwisata Provinsi
	6 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
	7 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3 ASPEK PENDANAAN YANG BERKELANJUTAN	
a. Menerapkan dan mengembangkan skema investasi, dana operasional dan pemeliharaan dalam pengurangan sampah	1 Penetapan standar biaya investasi, operasional dan pemeliharaan pengelolaan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir dalam RP/ton
	2 mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah sebesar minimal 2% dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota
b. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan provinsi serta daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1. Mengalokasikan anggaran untuk pilot proyek pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan/pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten/Kota
	2 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran pengelolaan sampah
	3. pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan sampah
c. Melaksanakan extended producer responsibility	1 pemanfaatan program Extended Producer Responsibility (EPR)/kewajiban produsen dalam pengelolaan sampah
	2 Penyusunan dan penerapan peta jalan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah
	3 Pengaturan standarisasi produk daur ulang
d. Melaksanakan CSR	1 Pemanfaatan program corporate social responsibility / (CSR) untuk pengelolaan sampah
	2 memperkuat komitmen dunia usaha dalam pengurangan sampah melalui penerapan tanggungjawab produsen yang diperluas
	3 memperkuat keterlibatan dunia usaha dalam pengurangan sampah melalui kemitraan dengan pemerintah
e. Pengkajian ulang terkait <i>Tipping Fee</i> pada TPA Regional	1 Penetapan tipping fee sesuai dengan standar harga dalam pengelolaan sampah

Kebijakan		Rencana Aksi	
f.	Pengembangan Kerjasama dan Pola Pendanaan	1	Fasilitasi Kerjasama Persampahan Lintas Kabupaten/kota
		2	Kerjasama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Permukiman
		3	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		4	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Infrastruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
		5	Fasilitasi Kersa Sama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
		6	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga
		7	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
4	ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT		
a.	Perubahan paradigma pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku	1	Perubahan pola pikir dan peningkatan kapasitas penyelenggara dalam pengelolaan sampah
b.	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	2	Melakukan perubahan pola pikir dalam pengelolaan sampah melalui program rekayasa sosial
c.	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	3.	Pelatihan, training, seminar dan lomba inovasi pengelolaan sampah
d.	Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	4.	Kerjasama antar pelaku usaha dan stake holder pengelola sampah
		5	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat
		6	Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh
		7	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
		8	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
5	ASPEK INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI		
a	Menyusun Rencana Induk Sistem	1	Penyusunan rencana induk sistem

Kebijakan	Rencana Aksi
Pengelolaan Sampah	pengelolaan sampah
	2 Penyusunan reuiu rencana induk sistem pengelolaan sampah
	3 membangun sistem informasi pengurangan sampah
b Meningkatkan pengurangan sampah pada tahapan implementasi	1 pengembangan standar kompetensi pelaksana kegiatan pengurangan sampah
	2 pengembangan standar kriteria sarana/prasarana dalam pengurangan sampah
	3 Pengembangan SOP dalam pengurangan sampah
c. Mempercepat penyediaan dan pengoperasian infrastruktur yang berketahanan serta meningkatkan cakupan layanan sanitasi berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan	1 pembangunan sarana prasarana pengurangan sampah
	2 pembangunan sarana prasarana kegiatan pengurangan sampah secara individu
	3 penyediaan sarana prasarana kegiatan pengurangan sampah skala kawasan
	4 melakukan pemilahan, pewadahan dan pengolahan sampah di sumber
	5 menerapkan teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan sampah
	6 memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan sampah	1 penyusunan sistem perencanaan, implementasi, pengawasan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan sampah
	2 Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan
e. Melaksanakan pilot proyek dalam pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan/pewadahan sampai pemrosesan akhir	1 penyusunan kajian pilot proyek pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan sampai denan pemrosesan akhir
f. Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan di wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota	1 pelaksanaan pilot projec sub sistem pewadahan sampai pemrosesan akhir di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango
g. meningkatkan cakupan pelayanan secara sederhana dan berkeadilan	1 Pembangunan dan pengoperasian pengolahan (ITF) serta TPA Regional di kawasan strategis nasional (KSN) oleh pemerintah pusat
h. Pengembangan infrastruktur dan	1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan

Kebijakan	Rencana Aksi	
layanan sanitasi		Persampahan Regional
	2	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
	3	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
	4	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
	5	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
	6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan
	7	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
i. Meningkatkan TPA Regional Talumelito	1	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
j. Mengembangkan TPA ke arah <i>sanitary landfill/controlled landfill</i>	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
	3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
k. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk aplikasi teknologi penanganan sampah yang tepat guna dan berwawasan lingkungan	1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
	2	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
	3	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

Sumber : Analisis Konsultan RSP, 2024

5.3.1 Rencana Aksi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Rencana Aksi Sanitasi pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Gorontalo disesuaikan dengan tujuan, sasaran dan kebijakan, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel-18
Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo (Pengelolaan Air Limbah Domestik)
Tahun 2025-2029

TUJUAN	:	Pencapaian akses aman Tahun 2030
SASARAN	:	Rumah tangga dengan akses layak sebesar 100,00%, akses aman sebesar 17,27%, SPALD Setempat sebesar 14,33%, SPALD Terpusat sebesar 3,04%, SPALD Terpusat berbasis institusi sebesar 2,43% dan SPALD Terpusat berbasis masyarakat sebesar 0,49%, BABs sebesar 1,90%, desa stop BABs sebesar 53% dan desa STBM sebesar 11,23% pada Tahun 2029
STRATEGI	:	Peningkatan sarana prasarana SPALD-T dan SPALD-S, perkuatan fungsi regulator dan operator, melengkapi perangkat peraturan, peningkatan alokasi dana pembangunan air limbah, akses dan peningkatan peran masyarakat dan swasta

Kebijakan	Rencana Aksi
1 ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT	
a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;	1 Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan padat kumuh perkotaan yang belum terlayani dengan system pengelolaan air limbah terpusat;
b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;	1 Merehabilitasi atau merevitalisasi serta mengekstensifikasi sistem yang ada (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/ IPLT);
c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat di Permukiman dengan SPAL D Terpusat berbasis institusi dan SPALD Terpusat berbasis masyarakat	1 Menyelenggarakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) / CLTS (<i>Community Lead Total Sanitation</i>) di kawasan perdesaan;
	2 Mengoptimalkan kapasitas IPAL terpasang dan peningkatan operasional <i>sewerage</i> terpasang;
	3 Meningkatkan kapasitas pengolahan melalui pembangunan IPAL paket;
	4 Mengembangkan sistem setempat menjadi sistem terpusat secara bertahap di perkotaan

Kebijakan	Rencana Aksi
	dengan cara mengkombinasikan dan atau menambah dengan sistem yang telah ada secara bertahap.
d. Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;	1 Melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
e. Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.	1 Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman;
	2 Menyelenggarakan kegiatan percontohan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah;
	3 Menyelenggarakan sosialisasi kepada dunia usaha dan swasta mengenai potensi investasi di bidang pengelolaan air limbah permukiman;
	4 Mengembangkan pola investasi untuk penyelenggaraan pengelolaan system air limbah permukiman;
f. Menciptakan ekosistem berbasis inovasi melibatkan sektor swasta dan pelaku bisnis untuk memperkuat pasar terkait penyediaan layanan sanitasi aman di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota	1 Memberikan kemudahan dan insentif kepada dunia usaha yang berpartisipasi di dalam pengelolaan air limbah seperti pemberian ijin usaha dan keringanan pajak..
2 ASPEK STANDAR DAN REGULASI	
a. Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;	1 Menyiapkan undang-undang dan peraturan pendukungnya dalam pengelolaan air limbah permukiman;
	2 Penguatan substansi peraturan perundang-undangan penyelenggaraan SPAL Domestik yang ada sebagai payung hukum nasional pencapaian 30% akses aman 2030 namun sesuai target provinsi
	3 Penguatan kerangka regulasi (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Instruksi Kepala Daerah) sebagai pelaksanaan program di daerah
	4 Pengembangan NSPK untuk SPAL Domestik di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo
b. Menyebarluaskan informasi peraturan perundangan terkait	1 Mereview dan melengkapi Norma standar Pedoman dan Manual (NSPM) dalam

Kebijakan	Rencana Aksi
penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;	pengelolaan air limbah permukiman;
c. Menerapkan peraturan perundangan.	1 Mereview Standar Pelayanan Minimal dalam pengelolaan air limbah permukiman;
	2 Melaksanakan bantuan teknis penyusunan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
	3 Mendorong dan melaksanakan bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana induk prasarana dan sarana air limbah di kawasan perkotaan dan perdesaan;
	4 Fasilitasi/pendampingan implementasi pemenuhan SPM sanitasi, khususnya sanitasi aman secara berjenjang dari provinsi ke kabupaten/kota
	5 Pemantauan implementasi pemenuhan SPM sanitasi di daerah
d. Memperkuat substansi dan penerapan peraturan peundang-undangan sebagai payung hukum penyelenggaraan SPAL Domestik di Provinsi dan Implementasi Sumber Daya Manusia Sanitasi	1 Mensosialisasikan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
	2 Mengembangkan sistem informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
	3 Memberikan insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah dan Dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan pengelolaan air limbah permukiman;
	4 Mempersyaratkan pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat di kawasan permukiman baru bagi penyelenggara pembangunan Kawasan permukiman baru.
3 ASPEK KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA	
a. Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat;	1 Memberikan pendampingan pembentukan kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah permukiman komunal;
b. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah;	1 Memberikan pelatihan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah serta pengelolaan air limbah permukiman komunal;
c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;	1 Mendorong terbentuknya unit yang mengelola prasarana dan sarana air limbah permukiman di daerah, antara lain berupa Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum dan Dinas;

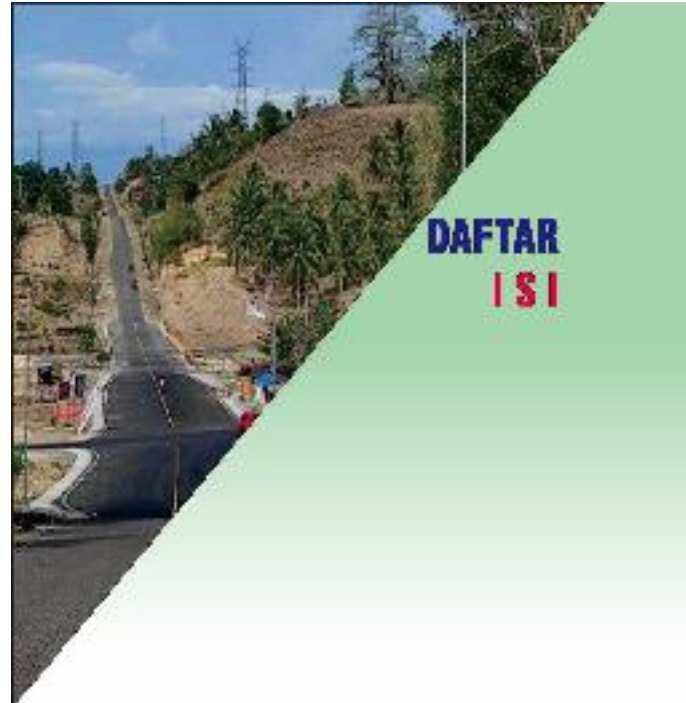
Kebijakan	Rencana Aksi
d. Mendorong peningkatan kemauan politik (<i>political will</i>) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.	1 Melaksanakan bantuan teknis penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah permukiman;
e. Meningkatkan tata kelola dan kualitas penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan yang mendorong partisipasi dan kolaborasi di daerah	1 Melaksanakan pelatihan kepada personil pengelola dibidang penyelenggaraan air limbah permukiman;
	2 Memfasilitasi koordinasi antar Lembaga dan antar daerah dalam kerjasama penyelenggaraan pengelolaan air limbah;
	3 Melaksanakan sosialisasi kepada lembaga eksekutif dan legislative mengenai pentingnya penyelenggaraan air limbah permukiman;
	4 Menyusun dan mensosialisasikan kisah sukses (<i>best practices</i>) tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman
4 ASPEK PENDANAAN YANG BERKELANJUTAN	
a. Meningkatkan alokasi pendanaan APBN/APBD Provinsi dan mengkonsolidasi potensi pembiayaan dan program prioritas pembangunan lain untuk pembangunan sanitasi	1 Memberikan dana stimulan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman untuk mendorong mobilisasi dana swadaya masyarakat;
b. Mengembangkan dan memobilisasi sumber pembiayaan dari masyarakat dan swasta untuk pembangunan infrastruktur serta penyediaan akses dan layanan	2 Mendorong peningkatan dan fasilitasi kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah;
c. Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman;	1 Pemerintah pusat memberikan investasi awal pembangunan system pengelolaan air limbah terpusat dan pengembangannya ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.
d. Pembiayaan Bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama.	1 Peningkatan alokasi APBN/APBD untuk memenuhi target akses aman nasional (SDGs) dan provinsi sesuai target yang ditetapkan
	2 Penguatan forum konsolidasi pendanaan sanitasi di tingkat provinsi
	3 Pengembangan kerangka regulasi di tingkat provinsi sebagai dasar alokasi APBD untuk pemenuhan target akses aman

Kebijakan	Rencana Aksi
e. Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.	1 Mobilisasi pendanaan non APBD seperti bantuan keuangan/hibah provinsi, hibah pusat dan DAK serta sumber pendanaan non negara: swasta/dunia usaha, lembaga karitatif dan hibah mitra pembangunan
	2 Pendanaan APBD untuk pemenuhan kriteria kesiapan mengakses pendanaan non APBD
5 ASPEK INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	
a. Mempercepat penyediaan dan pengoperasian infrastruktur yang berketahanan serta meningkatkan cakupan layanan sanitasi berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan	1. Percepatan pembangunan sarana/prasarana akses sanitasi aman : IPLT, SPALD T permukiman berbasis institusi dan masyarakat, serta sarana pendukungnya di wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo
	2. Peningkatan insentif penyediaan sarana/prasarana sanitasi di tingkat rumah tangga
	3. Peningkatan pemanfaatan sarana/prasarana terbangun di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo
	4. Pembuatan integrasi penyediaan sanitasi aman dalam pelaksanaan program STBM, termasuk penyediaan dukungan bagi rumah tangga untuk terhubung dengan jaringan perpipaan (khususnya untuk kawasan padat penduduk di perkotaan) ataupun septik tank yang sesuai standar
	5. Pemanfaatan IoT (<i>internet of things</i>) dalam pengelolaan pemanfaatan infrastruktur sanitasi

Sumber : Analisis Konsultan RSP, 2024

GUBERNUR GORONTALO,

GUSNAR ISMAIL



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1	-	1
1.2	Tujuan, manfaat dan Sasaran.....	1	-	4
1.3	Landasan Hukum dan Dukungan Peraturan.....	1	-	6
1.4	Ruang Lingkup	1	-	12
1.5	Sistematika Penulisan Laporan	1	-	13

BAB 2 PROFIL SANITASI PROVINSI

2.1	Gambaran Umum	2	-	1
2.1.1	Gambaran Wilayah Provinsi	2	-	1
2.1.2	Akses Sanitasi Layak dan Aman Provinsi	2	-	23
2.2	Pengelolaan Sanitasi Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.....	2	-	43
2.2.1	Umum	2	-	43
2.3	Pengelolaan Sanitasi Oleh Pemerintah Provinsi	2	-	75
2.3.1	Pengelolaan Persampahan.....	2	-	80
2.3.2	Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	2	-	82
2.4	Permasalahan Pengelolaan Sanitasi.....	2	-	86
2.4.1	Pengelolaan Sanitasi oleh Pemerintah Kabupaten/kota	2	-	86
2.4.2	Pengelolaan Sanitasi Oleh Pemerintah Provinsi.....	2	-	95
2.5	Visi dan Misi Pembangunan Sanitasi	2	-	99

BAB 3 ISU STRATEGIS, TUJUAN DAN SASARAN

3.1	Isu Strategis Pengelolaan Sanitasi	3	-	2
3.2	Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Sanitasi.....	3	-	14

BAB 4 KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1	Strategi Pengelolaan Sanitasi	4	-	1
	4.1.1 Strategi Pengelolaan Persampahan.....	4	-	1
	4.1.2 Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	4	-	8
4.2	Kebijakan Pengelolaan Sanitasi.....	4	-	16
	4.2.1 Kebijakan Pengelolaan Persampahan.....	4	-	18
	4.2.2 Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik..	4	-	26

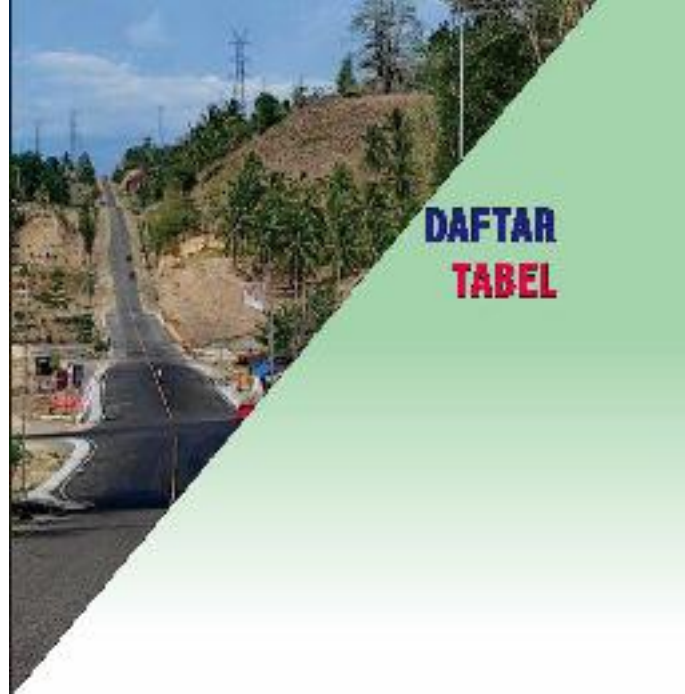
BAB 5 RENCANA AKSI PENGELOLAAN SANITASI

5.1	Skenario Pengelolaan	5	-	2
5.2	Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo.....	5	-	4
	5.2.1 Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan.....	5	-	4
	5.2.2 Rencana Aksi Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	5	-	13
5.3	Alokasi Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo	5	-	19

BAB 6 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN

6.1	Penyesuaian Rencana Aksi Terhadap Kodefikasi dan Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikasi Pendanaan	6	-	1
6.2	Penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Indikasi Pendanaan	6	-	7

BAB 7 PENUTUP



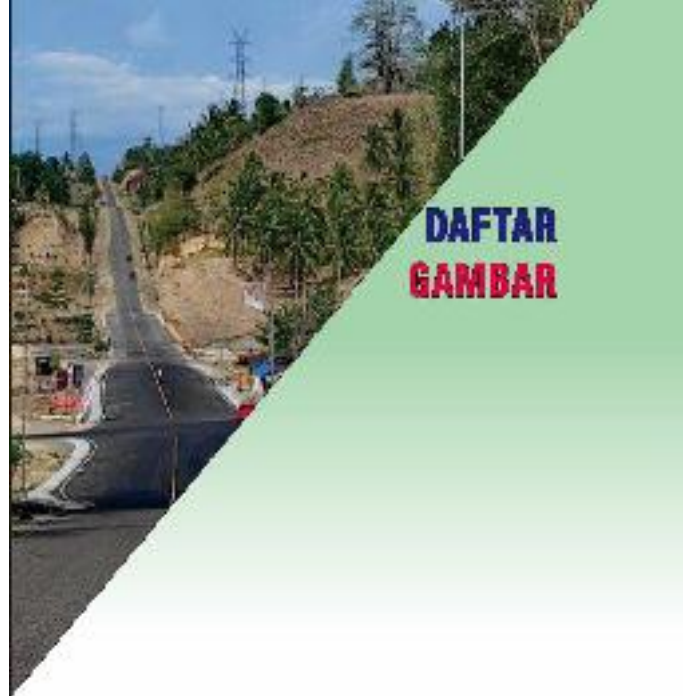
Tabel 2.1	Ibukota, Luas dan Prosentase Luas Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023	2	-	3
Tabel 2.2	Jumlah kecamatan, Desa/Kelurahan Masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023	2	-	4
Tabel 2.3	Data Dasar <i>Roadmap</i> Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023	2	-	7
Tabel 2.4	Rekapitulasi Data Dasar <i>Roadmap</i> Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023	2	-	12
Tabel 2.5	Nilai-nilai Standar yang Digunakan untuk Proses Perhitungan awal <i>Roadmap</i> Sanitasi Provinsi (RSP) Gorontalo Tahun 2024	2	-	13
Tabel 2.6	Hasil Perhitungan Awal sebagai Data Dasar <i>Roadmap</i> Sanitasi Provinsi (RSP) Gorontalo Tahun 2024	2	-	17
Tabel 2.7	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Awal Berdasarkan nilai-nilai Standar yang digunakan Dalam <i>Roadmap</i> Sanitasi Provinsi (RSP) Gorontalo Tahun 2024	2	-	22
Tabel 2.8	Target Akses Sanitasi Berdasarkan Draft RPJMN Tahun 2025-2029	2	-	23
Tabel 2.9	Target Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2030	2	-	24
Tabel 2.10	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Provinsi Gorontalo Tahun 2024	2	-	26
Tabel 2.11	Rekapitulasi Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Provinsi Gorontalo Tahun 2024	2	-	27
Tabel 2.12	Perbandingan Capaian dan Target Akses Sanitasi (air limbah domestik) Provinsi Gorontalo Tahun 2024	2	-	28

Tabel 2.13	Sebaran Target Akses Sanitasi (air limbah domestik) Berdasarkan Draft RPJMN Tahun 2025-2029	2	- 29
Tabel 2.14	Volume Sampah Tertangani Masing-masing Kabupaten/kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024 ..	2	- 30
Tabel 2.15	Volume Sampah Perkotaan Tertangani Masing-masing Kabupaten/kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024	2	- 31
Tabel 2.16	Capaian Target Akses Sanitasi (Penanganan Persampahan) Provinsi Gorontalo Tahun 2024	2	- 32
Tabel 2.17	Sarana dan Prasarana Dalam Proses Pengurangan Sampah Provinsi Gorontalo Tahun 2024	2	- 33
Tabel 2.18	Rekapitulasi Sampah yang Dikelola (Proses Pengurangan Sampah) Provinsi Gorontalo Tahun 2024	2	- 36
Tabel 2.19	Capaian Target Akses Sanitasi (Penanganan Persampahan) Provinsi Gorontalo Tahun 2024	2	- 37
Tabel 2.20	Target dan Sebaran Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029	2	- 38
Tabel 2.21	Target dan Sebaran Akses Sanitasi Kabupaten/kota Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029	2	- 39
Tabel 2.22	Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Pengaturan Pengelolaan Persampahan dan Air Limbah Domestik	2	- 44
Tabel 2.23	Nilai Peraturan dalam Profil Sanitasi Pengelolaan Persampahan Provinsi Gorontalo Tahun 2024	2	- 46
Tabel 2.24	Nilai Peraturan dalam Profil Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Gorontalo Tahun 2024	2	- 47
Tabel 2.25	Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Kelembagaan Pengelolaan Persampahan	2	- 48
Tabel 2.26	Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	2	- 50
Tabel 2.27	Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Infrastruktur Eksisting (Pengelolaan TPA) ...	2	- 52

Tabel 2.28	Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Infrastruktur Eksisting (TPST/Pusat Daur Ulang (PDU)	2	- 53
Tabel 2.29	Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Infrastruktur Eksisting (Bank Sampah Induk/unit)	2	- 54
Tabel 2.30	Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Infrastruktur Eksisting Aspek Infrastruktur Eksisting (TPS-3R)	2	- 55
Tabel 2.31	Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Infrastruktur Eksisting (Sektor Informal yang Telah Bekerjasama)	2	- 55
Tabel 2.32	Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Infrastruktur Eksisting (Pengangkutan Sampah)	2	- 56
Tabel 2.33	Instrumen Profil Sanitasi Aspek Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD-T) Provinsi Gorontalo Tahun 2024	2	- 58
Tabel 2.34	Instrumen Profil Sanitasi Aspek Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD-S) Provinsi Gorontalo Tahun 2024	2	- 59
Tabel 2.35	Instrumen Profil Sanitasi Aspek Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD-S) (BABs dan IPLT) Provinsi Gorontalo Tahun 2024	2	- 60
Tabel 2.36	Instrumen Profil Sanitasi Aspek Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah Domestik Pengangkutan	2	- 61
Tabel 2.37	Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Perilaku Masyarakat (pengelolaan persampahan dan air limbah domestik)	2	- 62
Tabel 2.38	Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Pendanaan Persampahan (pendanaan pemerintah)	2	- 65
Tabel 2.39	Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Aspek Pendanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (pendanaan pemerintah)	2	- 68
Tabel 2.40	Rekapitulasi Nilai Profil Pengelolaan Persampahan Provinsi Gorontalo Tahun 2024	2	- 71
Tabel 2.41	Rekapitulasi Nilai Profil Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Gorontalo Tahun 2024	2	- 73
Tabel 2.42	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	- 75

Tabel 2.43	Kewenangan Provinsi Berdasarkan Tata Ruang	2	- 76
Tabel 2.44	Kondisi Eksisting Pengelolaan Sanitasi Kewenangan Provinsi	2	- 78
Tabel 2.45	Peraturan Tentang Pengelolaan Persampahan	2	- 80
Tabel 2.46	Kelembagaan Persampahan Provinsi	2	- 80
Tabel 2.47	Infrastruktur Persampahan Provinsi	2	- 80
Tabel 2.48	Pendanaan Persampahan Provinsi	2	- 82
Tabel 2.49	Peraturan Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi	2	- 83
Tabel 2.50	Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik Provinsi	2	- 83
Tabel 2.51	Infrastruktur Air Limbah Provinsi.....	2	- 83
Tabel 2.52	Pendanaan Air Limbah Provinsi	2	- 85
Tabel 2.53	Permasalahan Regulasi Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/kota	2	- 87
Tabel 2.54	Permasalahan Kelembagaan Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/kota	2	- 88
Tabel 2.55	Permasalahan Infrastruktur Sanitasi Kabupaten/kota	2	- 90
Tabel 2.56	Permasalahan Perilaku Masyarakat Kabupaten/kota	2	- 93
Tabel 2.57	Permasalahan Pendanaan Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/kota	2	- 93
Tabel 2.58	Permasalahan Pengelolaan Persampahan Provinsi	2	- 95
Tabel 2.59	Permasalahan Pengelolaan Air Limbah Provinsi	2	- 98
Tabel 3.1	Isu Strategis Pengelolaan Sanitasi (ALD)	3	- 3
Tabel 3.2	Isu Strategis Sanitasi dalam Pengelolaan Sampah	3	- 8
Tabel 3.3	Sebaran Target Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 Berdasarkan data RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2026	3	- 15
Tabel 3.4	Target Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029	3	- 17
Tabel 3.5	Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Persampahan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 Berdasarkan Capaian Eksisting	3	- 18
Tabel 3.6	Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Air Limbah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 Berdasarkan Capaian Eksisting	3	- 19

Tabel 4.1	Penyusunan Strategi Sistem Pengelolaan Persampahan			
	Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029	4	-	1
Tabel 4.2	Penyusunan Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			
	Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029	4	-	14
Tabel 4.3	Kebijakan Sistem Pengelolaan Persampahan Dalam Roadmap Sanitasi			
	Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029	4	-	18
Tabel 4.4	Kebijakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Roadmap Sanitasi			
	Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029	4	-	26
Tabel 5.1	Skenario Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo			
	Tahun 2025-2029	5	-	3
Tabel 5.2	Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo (Pengelolaan Persampahan)			
	Tahun 2025-2029	5	-	4
Tabel 5.3	Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo (Pengelolaan Air Limbah Domestik)			
	Tahun 2025-2029	5	-	13
Tabel 5.4	Alokasi Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo (Pengelolaan Persampahan)			
	Tahun 2025-2029	5	-	20
Tabel 5.5	Alokasi Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo (Pengelolaan Air Limbah Domestik)			
	Tahun 2025-2029	5	-	45
Tabel 6.1	Kodifikasi dan Nomen Klatur	6	-	1
Tabel 6.2	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029	6	-	8



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Grafik Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Di Provinsi Gorontalo Tahun 2023	2	-	4
Gambar 2.2	Peta Administrasi Provinsi Gorontalo	2	-	5
Gambar 2.3	Grafik Prosentase Penanganan Sampah Di Provinsi Gorontalo Tahun 2024	2	-	31
Gambar 2.4	Grafik Prosentase Penanganan Sampah Perkotaan Di Provinsi Gorontalo Tahun 2024	2	-	32
Gambar 2.5	Profil Sanitasi Pengelolaan Persampahan Provinsi Gorontalo Tahun 2024	2	-	72
Gambar 2.6	Profil Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Gorontalo Tahun 2024	2	-	74
Gambar 2.7	Wilayah Pelayanan Penanganan Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024	2	-	77
Gambar 3.1	Perumusan Awal Isu Strategis Pemenuhan Akses Sanitasi	3	-	2
Gambar 3.2	Skenario Target Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo	3	-	14
Gambar 4.1	Hirarki dalam Pengelolaan Sampah	4	-	25



bab-1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program yang dicanangkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, untuk mewujudkan akses sanitasi layak dan aman bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pembangunan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan), merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *(tidak termasuk pasal yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)*).

Kewenangan Pemerintah Provinsi dimuat dalam lampiran undang-undang tersebut, yang terdiri dari:

- (1) pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional; dan
- (2) pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional

(sumber : lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, huruf C Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, angka 3 (halaman 10, sheet 323) : pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, angka 4 (halaman 11, sheet 324 : pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional).



Pelaksanaan program PPSP telah memasuki tahun ke-14 (empat belas) sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2010, dan berhasil meningkatkan pelayanan

sanitasi secara signifikan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia, dimana ringkasan program PPSP diuraikan dibawah ini.

- (1) PPSP-I, Tahun 2010-2014, sebanyak 444 kabupaten/kota yang ikut dalam program dan memiliki dokumen perencanaan SSK (pencapaian target MDG's sebesar 62,4% di akhir Tahun 2015
- (2) PPSP-II, Tahun 2015-2019 difokuskan pada implementasi dokumen perencanaan sanitasi yang telah disusun oleh kabupaten/kota serta mempercepat penyusunan dokumen pemutakhiran SSK dari 2 (dua) tahun menjadi 1 (satu) tahun dan mendukung pemenuhan target *universal access* sanitasi yang telah ditetapkan di RPJMN 2015-2019 dengan target 100% akses sanitasi (85% akses layak dan 15% akses dasar).
- (3) PPSP-III, Tahun 2020-2024, dilaksanakan dengan pendekatan percepatan peningkatan akses sanitasi dan kualitasnya, serta penyediaan layanan sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat melalui fasilitasi berjenjang dalam peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan komitmen Kepala Daerah dan mendukung pemenuhan target *universal access* sanitasi yang telah ditetapkan di RPJMN 2020-2024 dengan target 90% akses layak (termasuk 15% akses aman) untuk air limbah domestik dan 100% sampah perkotaan (20% pengurangan sampah dan 80% penanganan sampah).

Perlu peningkatan layanan sanitasi dalam rangka mencapai target sanitasi layak dan aman 100% pada tahun 2030 sebagaimana termaktub dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, serta amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk hal tersebut dibutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal:

- (1) meningkatkan peran fasilitasi dalam Pembangunan sanitasi secara terpadu dan menyeluruh di kabupaten/kota;
- (2) memaksimalkan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di wilayahnya dalam pembangunan sanitasi;
- (3) memprioritaskan alokasi pembiayaan pembangunan sanitasi melalui APBD provinsi.

Untuk memperoleh dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada paragraf kedua, diperlukan komitmen Pemerintah Provinsi agar melengkapi peraturan/kebijakan di bidang sanitasi sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu kebutuhan dukungan kebijakan tersebut adalah penyusunan dokumen perencanaan strategis sanitasi provinsi dalam bentuk Roadmap Sanitasi Provinsi.

Dalam dokumen RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah sebesar 70,00% (halaman 299), 75% pada Tahun 2025 dan 74% pada Tahun 2026.

Dengan target 100% akses sanitasi layak pada Tahun 2030 (draft RPJMN Tahun 2025–2029), terdapat GAP sebesar 30% (dihitung dari target 2030 dan eksisting Provinsi Gorontalo sebesar 70%), maka berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi perlu melakukan Pemuktahiran Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo yang telah disusun tahun 2014

1.2 Tujuan, Manfaat dan Sasaran

Penyusunan Pemuktahiran Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024, dimaksudkan untuk memastikan bahwa perencanaan dan implementasi sanitasi di provinsi Gorontalo, dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tujuan Pemuktahiran Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan Pembangunan sanitasi di wilayah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan rencana pengembangan sanitasi 5 (lima) tahun kedepan
- 2) Menetapkan arah kebijakan prioritas dalam menyelenggarakan pengelolaan Pembangunan sanitasi secara komphrehensif dan terintegrasi guna percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di wilayah Provinsi Gorontalo.

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Selanjutnya Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi dimanfaatkan untuk :

- 1) Menjadi rujukan pelaksanaan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi oleh pemerintah provinsi dan para pihak yang terlibat dalam pembangunan sanitasi di Provinsi.
- 2) Menjadi pedoman perangkat daerah provinsi dalam melakukan pendekatan strategi kebijakan dan koordinasi pembangunan sanitasi guna melakukan tugas pembinaan, pengawasan, dan pengaturan bagi pencapaian target layanan sanitasi berkelanjutan di Provinsi.
- 3) Menentukan prioritas dukungan pemerintah provinsi terhadap peningkatan berbagai aspek pembangunan sanitasi di wilayahnya, termasuk penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi kab/kotanya baik melalui bantuan keuangan provinsi maupun konsolidasi sumber pendanaan APBN, Hibah donor, CSR, Ziswaf / Dana Keagamaan, dan pendanaan alternatif lainnya.
- 4) Menjadi bahan dalam melakukan input terhadap penyempurnaan rencana daerah atau integrasi pengelolaan pembangunan sanitasi ke dalam dokumen perencanaan formal Provinsi.
- 5) Rujukan untuk meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan di provinsi terhadap pengarusutamaan pembangunan sanitasi.

Sedangkan sasaran pengguna Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo adalah semua pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dengan pembangunan sanitasi di wilayah Provinsi, yang meliputi :

- 1) Pemerintah Provinsi Gorontalo
- 2) Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo
- 3) Mitra pembangunan sanitasi di Provinsi Gorontalo
- 4) Pihak swasta, dunia usaha dan masyarakat.

1.3 Landasan Hukum dan Dukungan Peraturan

Dasar pelaksanaan penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi adalah Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024, sebagaimana tertuang dalam pasal 1, 2, 4, 9 dan 12.

Penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi juga didukung dengan berbagai peraturan dan kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi, di antaranya :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), yang dirubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (pasal-pasal yang dirubah : pasal 1, 6, 8-11, 14, 17-18, 20, 22-23, 25-26, 35, 37, 48, 60, 61-62, 65, 69-71, 73-74 tambahan pasal 14A, 34 A *pasal 24, 27, 49-54, 72 (dihapus)*,

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) yang dirubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (pasal-pasal yang dirubah : pasal 1, 24, 26-28,32, 34-35, 37, 39, 55, 59, 61, 63, 69, 71-73, 76,77, 82, 88, 109, 112-113, *pasal 29-31, 36, 38, 40, 79, 102, 93, 110 (dihapus)*,
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) yang diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Pasal-pasal yang diubah adalah Pasal 26, 29, 33, 35-36, 40, 42, 53, 55, 107, 109, 114, 134, 150, 151, 153 dan penambahan BAB IX A, Pasal 117 A, Pasal 117 B)

- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347)
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

- 11) Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5041).
- 12) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6219).
- 13) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
- 16) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 17) Intruksi presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Limbah Domestik

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

- 18) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006)
- 19) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470)
- 20) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456)
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024
- 24) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
- 25) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP)

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

- 26) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dicabut dengan [Permendesa PDTT No. 9 Tahun 2023](#) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- 27) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
- 28) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK. 07/2021 Tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagi Pengelolaan Sampah Di Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 231)
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
- 31) Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2018
- 32) Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

1.4 Ruang Lingkup

Lingkup Dokumen Pemutakhiran Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo sesuai dengan Permendagri 87 Tahun 2022 dibatasi hanya 2 (dua) bidang, yaitu Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (sesuai Pasal 4, angka (1) dan Pasal 6 angka (1)).

Masing-masing bidang dikaji secara menyeluruh untuk lima (5) aspek yaitu :

- 1) **Aspek Regulasi**, yaitu pengkajian kelengkapan peraturan perundang-undangan di daerah yang mengatur pengelolaan dan retribusi sanitasi seperti adanya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota tentang pengelolaan masing-masing komponen sanitasi.
- 2) **Aspek Kelembagaan**, yaitu pengkajian mengenai kondisi kelembagaan operator layanan sanitasi, baik yang berada pada pemerintah daerah maupun masyarakat.
- 3) **Aspek Infrastruktur**, yaitu pengkajian terhadap kelengkapan infrastruktur sanitasi yang terbangun dilihat dari sistem pengelolaan rantai layanan sanitasinya.
- 4) **Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat**, yaitu pengkajian mengenai kegiatan-kegiatan perubahan perilaku terkait sanitasi yang dilakukan secara rutin oleh perangkat daerah.
- 5) **Aspek Pendanaan**, yaitu pengkajian terhadap pendanaan pemerintah, non pemerintah, dan retribusi yang dilakukan untuk keberlanjutan pengelolaan pembangunan sanitasi.

Pengkajian kelima aspek yang melingkupi pengelolaan pembangunan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) menggunakan sumber data yang termutakhirkan guna menghasilkan dokumen roadmap sanitasi provinsi yang berlaku selama lima (5) tahun.

Berdasarkan Pasal 12 Permendagri 87 Tahun 2022, dokumen Roadmap Sanitasi paling sedikit memuat :

- 1) Profil Pembangunan Sanitasi Provinsi,
- 2) Target, tujuan dan sasaran Pembangunan Sanitasi provinsi
- 3) Strategi dan kebijakan Pembangunan Sanitasi Provinsi
- 4) Program kegiatan dan indikasi pendanaan Pembangunan Sanitasi provinsi
- 5) Pemantauan dan evaluasi capaian Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Laporan Akhir *Roadmap* Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024, terdiri dari 7 (tujuh) bab, yaitu :

Bab-1 Pendahuluan

Bab-1 dalam penyusunan Dokumen Pemutakhiran *Roadmap* Sanitasi Provinsi Gorontalo akan terdiri dari Latar Belakang, Tujuan, manfaat dan sasaran, landasan hukum dan dukungan peraturan, ruang lingkup dan sistematika Laporan Antara

Bab-2 Profil Sanitasi Provinsi

Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo yang diuraikan pada bab 2 akan menjelaskan tentang Gambaran umum (gambaran wilayah provinsi, akses sanitasi layak dan aman provinsi), pengelolaan sanitasi oleh pemerintah kabupaten/kota (umum, pengelolaan persampahan dan pengelolaan air limbah domestik), pengelolaan sanitasi oleh pemerintah provinsi

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

(pengelolaan persampahan dan pengelolaan air limbah domestik), permasalahan pengelolaan sanitasi (pengelolaan sanitasi oleh pemerintah kabupaten/kota dan pengelolaan sanitasi oleh pemerintah provinsi) dan bagian terakhir menguraikan tentang Visi dan Misi Pembangunan Sanitasi.

Bab-3 Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran

Bab-3 dalam penyusunan Dokumen Pemutakhiran *Roadmap* Sanitasi Provinsi Gorontalo akan menuraikan isu strategis pengelolaan sanitasi, tujuan dan sasaran pengelolaan sanitasi

Bab-4 Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan Strategi dalam bab 4 Road Map Sanitasi Provinsi Gorontalo akan menguraikan strategi pengelolaan persampahan, strategi pengelolaan air limbah domestik, kebijakan pengelolaan persampahan dan kebijakan pengelolaan air limbah Domestik

Bab-5 Rencana Aksi Pengelolaan Sanitasi

Dalam Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, bab 5 rencana aksi pengelolaan sanitasi akan menguraikan tentang skenario pengelolaan, rencana aksi dan alokasi rencana aksi pengelolaan sanitasi

Bab-6 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikasi Pendanaan

Bab 6 dalam pekerjaan ini akan menguraikan tentang penyesuaian rencana aksi terhadap kodefikasi dan Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikasi Pendanaan, serta penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikasi pendanaan

Bab-7 Penutup

Kesimpulan dan rekomendasi akan menjadi bagian akhir dari pekerjaan *road map* sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024.

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029



Dinas LHK Provinsi Gorontalo
Aksi gerebek sampah, wilayah pesisir pantai wisata Tamendao,
Leato Utara, Dumbo Raya Kota Gorontalo
Sumber foto :
Info Publik,
Oleh MC PROV GORONTALO,
Jumat, 23 Februari 2024 | 16:58 WIB –
Redaktur: Kusnadi



bab-2

PROFIL SANITASI PROVINSI

2.1 Gambaran Umum

2.1.1 Gambaran Wilayah Provinsi

Geografis dan Administratif

Provinsi Gorontalo terletak antara 0°19' - 0°57' Lintang Utara dan 121°23'

- 125°14' Bujur

Timur, dimana lokasi ini berbatasan langsung dengan 2 (dua) provinsi lain, diantaranya Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan



Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur, sementara di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.

Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu

- a) Kabupaten Boalemo (Undang-undang No. 38 Tahun 2000)
- b) Kabupaten Gorontalo (Undang-undang No. 38 Tahun 2000)
- c) Kabupaten Pohuwato (Undang-undang No. 6 Tahun 2003)
- d) Kabupaten Bone Bolango (Undang-undang No. 6 Tahun 2003)
- e) Kabupaten Gorontalo Utara (Undang-undang No. 11 Tahun 2007)
- f) Kota Gorontalo (Undang-undang No. 38 Tahun 2000)

Terkait perbedaan luas wilayah Provinsi Gorontalo masing-masing Kabupaten/kota dalam laporan ini diuraikan beberapa peraturan dan informasi yang akurat terkait luas wilayah, diantaranya :

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

- a) Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022, luas daerah Provinsi Gorontalo sebesar 12.025,147 km² atau sebesar 0,64% dari luas wilayah Indonesia.
- b) Badan Pusat Statistik, Provinsi Gorontalo Dalam Angka Tahun 2024, tabel 1.1.1 halaman 12 , *sheet 64*, menjelaskan bahwa luas Provinsi Gorontalo adalah 12.025,147 km², yang terdiri dari :

KABUPATEN/ KOTA	LUAS (km ²)
Kabupaten Boalemo	1.830,865
Kabupaten Bone Bolango	1.888,998
Kabupaten Gorontalo	2.160,364
Kabupaten Gorontalo Utara	1.703,628
Kabupaten Pohuwato	4.370,359
Kota Gorontalo	70,393
TOTAL	12.025,147

- c) Perda Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Gorontalo Tahun 2012-2032 : luas wilayah Kabupaten Gorontalo tidak disebutkan.

Luas wilayah Kabupaten Gorontalo sebesar **2.125,47 km²** teruraikan dalam Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023, halaman 8.

- d) Perda Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Bone Bolango Tahun 2012-2032 (pasal 2, angka 1 halaman 7), menjelaskan bahwa luas Kabupaten Bone Bolango adalah 188.766,70 hektar atau **1.887,67 km²**.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031, penjelasan RTRW halaman 79, menguraikan bahwa luas Kabupaten Boalemo adalah **2.362,58 km²**.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Pohuwato Tahun 2012-2032 tidak menjelaskan tentang luas wilayah.

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Luas Kabupaten Pohuwato berdasarkan Perda 3/2012 RTRW Kabupaten Boalemo adalah $6.606,89 \text{ km}^2 - 2.362,58 \text{ km}^2 = \mathbf{4.244,31 \text{ km}^2}$ (hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato

- g) Perda Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Gorontalo Tahun 2019-2039 (pasal 5, angka 2 halaman 9), menjelaskan bahwa luas wilayah Kota Gorontalo adalah 7.959,00 hektar atau **79,59 km²**.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031, tidak menjelaskan tentang luas wilayah Kabupaten.
Luas wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar **1.777,02 km²** teruraikan dalam Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023, halaman 10.

Berdasarkan data di atas maka luas masing-masing kabupaten kota ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-1
Ibukota, Luas dan Prosentase Luas
Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023

KABUPATEN/ KOTA	IBUKOTA	LUAS (km ²)	%
Kabupaten Boalemo	Tilamuta	2.362,58	18,94%
Kabupaten Bone Bolango	Suwawa	1.887,67	15,13%
Kabupaten Gorontalo	Limboto	2.125,47	17,04%
Kabupaten Gorontalo Utara	Kwandang	1.777,02	14,24%
Kabupaten Pohuwato	Marisa	4.244,31	34,02%
Kota Gorontalo	Gorontalo	79,59	0,64%
TOTAL		12.476,64	100%

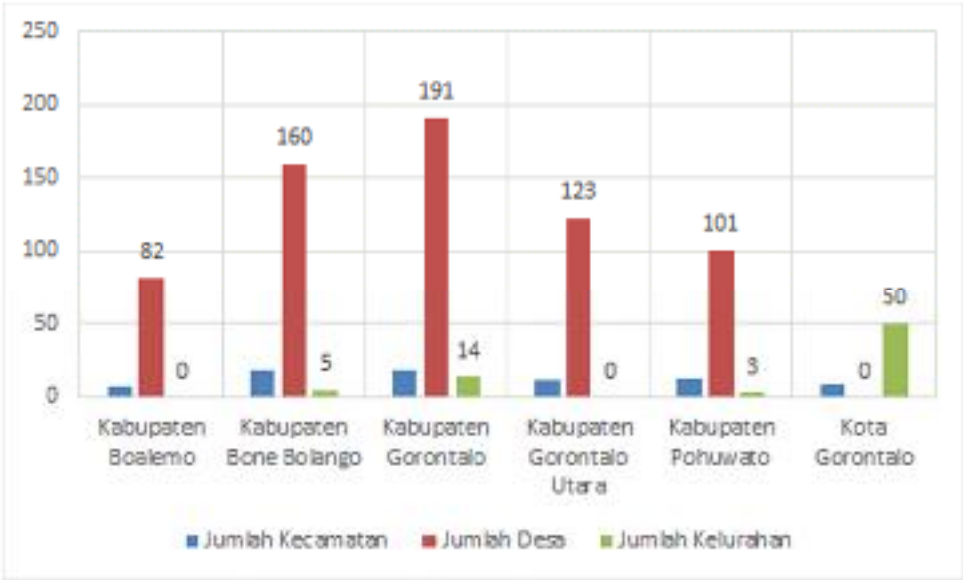
Sumber : RTRW Kabupaten/kota,
Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato, Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007, tentang pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara, Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2000, tentang pembentukan Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo memiliki 77 kecamatan, 657 desa dan 72 kelurahan yang tersebar di semua kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2-2
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
Kabupaten Boalemo	7	82	0
Kabupaten Bone Bolango	18	160	5
Kabupaten Gorontalo	19	191	14
Kabupaten Gorontalo Utara	11	123	0
Kabupaten Pohuwato	13	101	3
Kota Gorontalo	9	0	50
Jumlah	77	657	72

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negri Republik Indonesia, 2024



Gambar 2.1
Grafik Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Di Provinsi Gorontalo Tahun 2023 (sumber : Tabel 2.2)



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPUPR-PKP)
Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe, Wongkaditi, Kota Utara Kota Gorontalo

PEKERJAAN

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP) PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025-2029

JUDUL GAMBAR

PETA ADMINISTRASI PROVINSI GORONTALO



SKALA 1:450,000



SISTEM KOORDINAT REFERENSI:
Proyeksi: Universal Transverse Mercator (UTM)
Datum: Asia 1960 and Asia 1974
Datum: World Geodetic System 1984 (WGS 84)
Zona: UTM 48

LEGENDA

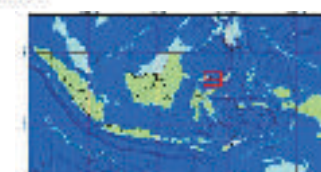
Area Provinsi	Jalan nasional
Area Kabupaten	Jalan lokal
Area Kecamatan	Jalan tol
Batas Negara	Jalan Rel Kereta
Batas Provinsi	Garis Pantai
Garis Administrasi	Sungai
Jalan Tol	Anak Sungai
Jalan Arteri	DAM/Weir

KEDALAMAN LAUT



KABUPATEN/KOTA

KOTA GORONTALO
BOALEMO
SONEBOLENGO
KOWA KOWA
KOWA KOWA
KOWA KOWA



SUMBER DATA

1. Buletin, Data Administrasi Kecamatan, Kabupaten, Tahun 2017
2. Buletin, Data Administrasi Kecamatan, Kabupaten, Tahun 2017
3. Buletin, Data Administrasi Kecamatan, Kabupaten, Tahun 2017
4. Buletin, Data Administrasi Kecamatan, Kabupaten, Tahun 2017
5. Buletin, Data Administrasi Kecamatan, Kabupaten, Tahun 2017
6. Buletin, Data Administrasi Kecamatan, Kabupaten, Tahun 2017
7. Buletin, Data Administrasi Kecamatan, Kabupaten, Tahun 2017

Data Dasar

Terkait outline penyusunan *Roadmap* Sanitasi Provinsi (RSP) Gorontalo Tahun 2024, data dasar wilayah Provinsi sebagaimana diuraikan dalam form-1, terdiri dari :

- 1) Data administratif yang meliputi jumlah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan setiap kabupaten/kota
- 2) Data demografi yang meliputi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah rumah tangga, jumlah jiwa setiap keluarga, jumlah penduduk wilayah perkotaan, jumlah penduduk di wilayah perdesaan setiap kabupaten/kota
- 3) Data luas lahan, yang meliputi luas wilayah administratif dan luas lahan terbangun

Form-1 data dasar *Roadmap* Sanitasi Provinsi Gorontalo ditunjukkan pada tabel 2.3

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-3
Data Dasar *Roadmap* Sanitasi (RSP) Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No.	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Klasifikasi		Jumlah Penduduk (jiwa)		Laju pertumbuhan penduduk (%/tahun)	Jumlah Rumah Tangga (unit)
				Kota	Desa	Kota	Desa		
1	Gorontalo	Batudaa Pantai	11.047				11.047	0,47%	3.009
		Biluhu	7.220				7.220		1.758
		Batudaa	13.777				13.777		3.901
		Bongomeme	19.192				19.192		5.671
		Tabongo	17.929				17.929		5.258
		Dungaliyo	16.492				16.492		4.789
		Tibawa	41.863	√		41.863			13.076
		Pulubala	24.974				24.974		7.563
		Boliyohuto	16.567				16.567		4.816
		Mootilango	18.704				18.704		5.511
		Tolangohula	22.693				22.693		6.815
		Asparaga	12.492				12.492		3.481
		Bilato	8.958				8.958		2.326
		Limboto	51.684	√		51.684			16.295
		Limboto Barat	25.114	√		25.114			7.606
		Telaga	22.735	√		22.735			6.829
		Telaga Biru	31.553				31.553		9.710
		Tilango	15.251				15.251		4.383

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Klasifikasi		Jumlah Penduduk (jiwa)		Laju pertumbuhan penduduk (%/tahun)	Jumlah Rumah Tangga (unit)
				Kota	Desa	Kota	Desa		
		Telaga Jaya	12.018				12.018		3.326
		jumlah	390.263			141.396	248.867		116.126
2	Boalemo	Mananggu	13.360	√		13.360		1,04%	3.453
		Tilamuta	31.371	√		31.371			9.173
		Dulupi	17.711	√		17.711			4.837
		Botuloito	15.876				15.876		4.254
		Paguyaman	35.278	√		35.278			10.413
		Wonosari	29.207	√		29.207			8.486
		Paguyaman Pantai	8.806				8.806		2.010
		jumlah	151.609			126.927	24.682		42.626
3	Pohuwato	Popayato	11.464	√		11.464		2,89%	3.122
		Popayato Barat	8.425				8.425		2.253
		Popayato Timur	9.229				9.229		2.484
		Lemito	12.196				12.196		3.332
		Wanggarasi	6.004				6.004		1.562
		Marisa	23.368	√		23.368			6.524
		Patilanggio	10.702				10.702		2.905
		Buntulia	13.296				13.296		3.646
		Duhiadaa	14.247				14.247		3.918
		Randangan	19.175				19.175		5.326
		Taluditi	9.396				9.396		2.532

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Klasifikasi		Jumlah Penduduk (jiwa)		Laju pertumbuhan penduduk (%/tahun)	Jumlah Rumah Tangga (unit)
				Kota	Desa	Kota	Desa		
		Paguat	17.194	√		17.194			4.760
		Dengilo	6.754				6.754		1.777
		jumlah	161.450			52.026	109.424		44.139
4	Bone Bolango	Tapa	8.006				8.006	1,19%	2.813
		Bulango Utara	8.551				8.551		2.888
		Bulango Selatan	11.817				11.817		3.935
		Bulango Timur	6.026				6.026		2.078
		Bulango Ulu	4.408				4.408		1.560
		Kabila	24.374				24.374		7.959
		Botupingge	7.170				7.170		2.445
		Tilongkabila	20.113	√		20.113			6.593
		Suwawa	13.879	√		13.879			4.595
		Suwawa Selatan	6.057				6.057		2.088
		Suwawa Timur	5.891				5.891		2.035
		Suwawa Tengah	6.666				6.666		2.284
		Pinogu	2.063				2.063		862
		Bone Pantai	11.303				11.303		3.770
		Kabila Bone	12.274				12.274		4.101
		Bone Raya	7.339	√		7.339			2.509
		Bone	10.616				10.616		3.624

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Klasifikasi		Jumlah Penduduk (jiwa)		Laju pertumbuhan penduduk (%/tahun)	Jumlah Rumah Tangga (unit)
				Kota	Desa	Kota	Desa		
		Bulawa	5.748				5.748		2.039
		jumlah	172.301			41.331	130.970		58.179
5	Gorontalo Utara	Atinggola	12.551	√		12.551		1,13%	3.396
		Gentuma Raya	10.435				10.435		2.816
		Kwandang	29.816	√		29.816			8.126
		Tomilito	10.285				10.285		2.776
		Penelo Kepulauan	4.246				4.246		1.123
		Anggrek	17.812	√		17.812			4.838
		Monano	7.772	√		7.772			2.087
		Sumalata	12.043				12.043		3.257
		Sumalata Timur	8.137				8.137		2.187
		Tolinggula	11.326				11.326		3.061
		Biau	5.977				5.977		1.595
		jumlah	130.400			67.951	62.449		35.262
6	Kota Gorontalo	Kota Barat	17.733	√		17.733	0	0,49%	8.036
		Dungingi	19.419	√		19.419	0		8.854
		Kota Selatan	13.291	√		13.291	0		5.879
		Kota Timur	19.702	√		19.702	0		8.992
		Hulonthalangi	9.664	√		9.664	0		4.119
		Dumbo Raya	12.242	√		12.242	0		5.370

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Klasifikasi		Jumlah Penduduk (jiwa)		Laju pertumbuhan penduduk (%/tahun)	Jumlah Rumah Tangga (unit)
				Kota	Desa	Kota	Desa		
		Kota Utara	14.277	√		14.277	0		6.357
		Kota Tengah	20.190	√		20.190	0		9.227
		Sipatana	12.485	√		12.485	0		5.488
		jumlah	139.003			139.003	0		62.322
			1.145.026			568.634	576.392		358.653

Sumber :

- 1) Kabupaten/kota Dalam Angka Tahun 2024
- 2) Klasifikasi kota / desa berdasarkan RTRW Provinsi (PKE dan PKW promosi (PKWp)
- 3) Klasifikasi kota / desa berdasarkan RTRW Kabupaten/kota (PPK dan PKL)
- 4) Masterfile Desa Provinsi Gorontalo Tahun 2023 (volume 6, 2024)

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-4
Rekapitulasi Data Dasar *Roadmap* Sanitasi
masing-masing Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Kode BPS	Lokasi	Jumlah Kec	Jumlah		Jumlah penduduk (jiwa)		
			Desa	Kelurahan	L	P	Total Jumlah Penduduk (Jiwa)
7501	Kabupaten Boalemo	7	82	0	77.238	74.371	151.609
7502	Kabupaten Gorontalo	19	191	14	196.441	193.822	390.263
7503	Kabupaten Pohuwato	13	101	3	81.612	79.838	161.450
7504	Kabupaten Bone Bolango	18	160	5	86.721	85.580	172.301
7505	Kabupaten Gorontalo Utara	11	123	0	66.420	63.980	130.400
7506	Kota Gorontalo	9	0	50	69.968	69.035	139.003
Total		77	657	72	578.399	566.627	1.145.026

Lanjutan tabel 2-4

Kode BPS	Lokasi	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jumlah jiwa per KK	Wilayah perkotaan		Wilayah perdesaan	
				Jumlah penduduk (jiwa)	% thd total	Jumlah penduduk (jiwa)	% thd total
7501	Kabupaten Boalemo	42.626	3,56	126.927	83,72%	24.682	16,28%
7502	Kabupaten Gorontalo	116.126	3,36	147.288	37,74%	242.975	62,26%
7503	Kabupaten Pohuwato	44.139	3,66	51.734	32,04%	109.716	67,96%
7504	Kabupaten Bone Bolango	58.179	2,96	41.331	23,99%	130.970	76,01%
7505	Kabupaten Gorontalo Utara	35.262	3,70	67.951	52,11%	62.449	47,89%
7506	Kota Gorontalo	99.245	2,06	204.444	100,00%	0	0,00%
Total		358.653	3,19	574.234	50,15%	570.792	49,85%

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Lanjutan tabel 2-4

Kode BPS	Lokasi	Luas administratif (ha)	Luas lahan terbangun (ha)	Kepadatan penduduk gross (jiwa/ha)	Kepadatan penduduk nett (jiwa/ha)
7501	Kabupaten Boalemo	236.258,00	12.543	0,64	12,09
7502	Kabupaten Gorontalo	212.547,00	21.339	1,84	18,29
7503	Kabupaten Pohuwato	424.431,00	83.065	0,38	1,94
7504	Kabupaten Bone Bolango	188.767,00	99.583	0,91	1,73
7505	Kabupaten Gorontalo Utara	177.702,20	88.517	0,73	1,47
7506	Kota Gorontalo	7.959,00	2.825	17,46	49,20
Total		1.247.664	307.872	0,92	3,72

Sumber :

- 1) Kabupaten/kota Dalam Angka Tahun 2024
- 2) Klasifikasi kota / desa berdasarkan RTRW Provinsi (PKE dan PKW promosi (PKWp)
- 3) Klasifikasi kota / desa berdasarkan RTRW Kabupaten/kota (PPK dan PKL)
- 4) Masterfile Desa Provinsi Gorontalo Tahun 2023 (volume 6, 2024)

Untuk menghitung form-1 Data Dasar RSP Provinsi Gorontalo, maka digunakan nilai-nilai standar sebagai berikut.

Tabel 2-5

Nilai-nilai standar yang digunakan untuk proses perhitungan awal RSP Gorontalo Tahun 2024

No	Uraian	Volume	Satuan	Sumber
1.	Timbulan sampah	0,7	Kg/org/hari	Mengacu pada Standar timbulan sampah berdasarkan SNI 19.3983-1995 spesifikasi Timbulan sampah untuk kota sedang dan kota kecil, halaman 1 dan 3) standar = 0,70 - 0,80 kg/orang/hari
2.	Konsumsi air bersih perkotaan			

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Uraian	Volume	Satuan	Sumber
	<i>Kabupaten Boalemo</i>	114,583	L/org/hari	Data rill pengelola air (SPAM perkotaan) setiap kabupaten/kota yang menghitung konsumsi air berdasarkan data jumlah air yang terjual dibagi dengan jumlah pelanggan (konversi dari m³/bulan) yang terdapat dalam laporan BPKP terkait Evaluasi Kinerja BUMD
	<i>Kabupaten Gorontalo</i>	106,069		
	<i>Kabupaten Pohuwato</i>	163,285		
	<i>Kabupaten Bone Bolango</i>	61,560		
	<i>Kabupaten Gorontalo Utara</i>	121,187		
	<i>Kota Gorontalo</i>	114,491		
3.	Konsumsi air bersih perdesaan	60	L/org/hari	- SK SNI 19-6728.1-2002 (pedesaan 60 L) - Pasal 1, angka 10, halaman 3 Permendagri no. 21 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 71 Tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum - Halaman 12 huruf e), sheet 53 Permen PUPR 27 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum - Tabel 6 kuantitas dan kualitas kebutuhan pokok air minum , halaman 46, sheet 3, Lampiran I permen PUPR No. 13 Tahun 2023 tentang SPM Bidang PUPR

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Uraian	Volume	Satuan	Sumber
4.	Prosentase air limbah dari air bersih	80%	%	Metcalf and Eddy, 2002) = 60% - 80% dari konsumsi air bersih
5	Produksi air limbah total			
	<i>Kabupaten Boalemo</i>	91,667	L/orang/ hari	Prosentase air limbah dari air bersih x konsumsi air bersih perkotaan
	<i>Kabupaten Gorontalo</i>	84,855		
	<i>Kabupaten Pohuwato</i>	130,628		
	<i>Kabupaten Bone Bolango</i>	49,248		
	<i>Kabupaten Gorontalo Utara</i>	96,950		
	<i>Kota Gorontalo</i>	91,593		
6.	Prosentase <i>greywater</i> dari air limbah	75%	%	60% - 75% dari total produksi air limbah (Gulyas, et.al, 2004), - Fair dan Geyer (75% greywater dan 25% black water)
7.	Tinggi desain timbunan di TPA	10	m	- Berdasarkan buku panduan Penutupan Akhir TPA Sampah, (gambar 13 halaman 33, sheet 41), rata-rata berkisar antara 10 - 15 m. - Lampiran 3, Permen PU nomor 03 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Pesampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
8.	Pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo	1,17%	% per thn	Rata-rata pertumbuhan penduduk di Provinsi (Provinsi Gorontalo Dalam Angka Tahun 2024, halaman 1 sheet 53)

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Uraian	Volume	Satuan	Sumber
	<i>Kabupaten Boalemo</i>	1,04%	% per thn	Kabupaten Boalemo Dalam Angka Tahun 2024, Tabel 3.1.1 halaman 52 (sheet 88)
	<i>Kabupaten Gorontalo</i>	0,47%	% per thn	Kabupaten Gorontalo Dalam Angka Tahun 2024, Tabel 3.1.1 halaman 81 (sheet 121)
	<i>Kabupaten Pohuwato</i>	2,89%	% per thn	Kabupaten Pohuwato Dalam Angka Tahun 2024, Tabel 3.1.1 halaman 51 (sheet 87)
	<i>Kabupaten Bone Bolango</i>	1,19%	% per thn	Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka Tahun 2024, Tabel 3.1.1 halaman 61 (sheet 103)
	<i>Kabupaten Gorontalo Utara</i>	1,13%	% per thn	Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Angka Tahun 2024, Tabel 3.1.1 halaman 59 (sheet 103)
	<i>Kota Gorontalo</i>	0,49%	% per thn	Kota Gorontalo Dalam Angka Tahun 2024, Tabel 3.1.1 halaman 50 (sheet 90)
8.	Tahun penulisan Roadmap	2024		Tahun disusunnya Roadmap Sanitasi Provinsi
9.	Periode perencanaan	5	tahun	Periode perencanaan dari dokumen Roadmap Provinsi

Sumber : Peraturan dan Literatur terkait sanitasi

Hasil perhitungan dengan menggunakan kriteria pada tabel data dasar
Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo ditunjukkan pada tabel 2.6

Tabel 2-6
Hasil Perhitungan Awal sebagai Data Dasar
Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No.	Lokasi	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Klasifikasi		Jumlah Penduduk (jiwa)		Laju pertumbuhan penduduk (%/tahun)	Jumlah Rumah Tangga (unit)	Proyeksi penduduk (5 tahun)	Kebutuhan air (perkotaan), m³/hari	Kebutuhan air (perdesaan), m³/hari	Kebutuhan air (m³/hari)	Kebutuhan air 5 tahun (m³/hari) perkotaan	Kebutuhan air 5 tahun (m³/hari) perdesaan	Total Kebutuhan air 5 tahun (m³/hari)
				KOTA	DESA	KOTA	DESA									
1	Gorontalo	Batudaa Pantai	11.047				11.047	0,47%	3.009	11.309	0,00	662,82	662,82		678,54	678,54
		Biluhu	7.220				7.220		1.758	7.391	0,00	433,20	433,20		443,48	443,48
		Batudaa	13.777				13.777		3.901	14.104	0,00	826,62	826,62		846,23	846,23
		Bongomeme	19.192				19.192		5.671	19.647	0,00	1.151,52	1.151,52		1.178,84	1.178,84
		Tabongo	17.929				17.929		5.258	18.354	0,00	1.075,74	1.075,74		1.101,26	1.101,26
		Dungaliyo	16.492				16.492		4.789	16.883	0,00	989,52	989,52		1.012,99	1.012,99
		Tibawa	41.863	√		41.863			13.076	42.856	4.440,38	0,00	4.440,38	4.545,71		4.545,71
		Pulubala	24.974				24.974		7.563	25.566	0,00	1.498,44	1.498,44		1.533,99	1.533,99
		Boliyohuto	16.567				16.567		4.816	16.960	0,00	994,02	994,02		1.017,60	1.017,60
		Mootilango	18.704				18.704		5.511	19.148	0,00	1.122,24	1.122,24		1.148,86	1.148,86
		Tolangohula	22.693				22.693		6.815	23.231	0,00	1.361,58	1.361,58		1.393,88	1.393,88
		Asparaga	12.492				12.492		3.481	12.788	0,00	749,52	749,52		767,30	767,30
		Bilato	8.958				8.958		2.326	9.171	0,00	537,48	537,48		550,23	550,23
		Limboto	51.684	√		51.684			16.295	52.910	5.482,08	0,00	5.482,08	5.612,13		5.612,13
		Limboto Barat	25.114	√		25.114			7.606	25.710	2.663,82	0,00	2.663,82	2.727,02		2.727,02
		Telaga	22.735	√		22.735			6.829	23.274	2.411,49	0,00	2.411,49	2.468,69		2.468,69
		Telaga Biru	31.553				31.553		9.710	32.301	0,00	1.893,18	1.893,18		1.938,09	1.938,09
		Tilango	15.251				15.251		4.383	15.613	0,00	915,06	915,06		936,77	936,77
		Telaga Jaya	12.018				12.018		3.326	12.303	0,00	721,08	721,08		738,19	738,19
		jumlah	390.263			141.396	248.867		116.126	399.521	14.997,77	14.932,02	29.929,79	44.861,81	74.791,61	119.653,42
2	Boalemo	Mananggu	13.360	√		13.360		1,04%	3.453	14.069	1.530,83	0,00	1.530,83	1.492,32		1.492,32
		Tilamuta	31.371	√		31.371			9.173	33.037	3.594,59	0,00	3.594,59	3.504,17		3.504,17
		Dulupi	17.711	√		17.711			4.837	18.651	2.029,38	0,00	2.029,38	1.978,33		1.978,33
		Botuloito	15.876				15.876		4.254	16.719	0,00	952,56	952,56		1.003,13	1.003,13
		Paguyaman	35.278	√		35.278			10.413	37.151	4.042,26	0,00	4.042,26	3.940,58		3.940,58
		Wonosari	29.207	√		29.207			8.486	30.758	3.346,63	0,00	3.346,63	3.262,45		3.262,45
		Paguyaman Pantai	8.806				8.806		2.010	9.274	0,00	528,36	528,36	983,64		983,64
		jumlah	151.609			126.927	24.682		42.626	159.658	14.544	1.481	16.024,61	17.505,53	33.530,15	51.035,68
3	Pohuwato	Popayato	11.464	√		11.464		2,89%	3.122	13.219	1.871,90	0,00	1.871,90	1.402,14		1.402,14
		Popayato Barat	8.425				8.425		2.253	9.715	0,00	505,50	505,50		582,89	582,89
		Popayato Timur	9.229				9.229		2.484	10.642	0,00	553,74	553,74		638,52	638,52
		Lemito	12.196				12.196		3.332	14.063	0,00	731,76	731,76		843,79	843,79
		Wanggarasi	6.004				6.004		1.562	6.923	0,00	360,24	360,24		415,39	415,39
		Marisa	23.368	√		23.368			6.524	26.946	3.815,65	0,00	3.815,65	2.858,10		2.858,10
		Patilanggio	10.702				10.702		2.905	12.340	0,00	642,12	642,12		740,43	740,43

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Lokasi	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Klasifikasi		Jumlah Penduduk (jiwa)		Laju pertumbuhan penduduk (%/tahun)	Jumlah Rumah Tangga (unit)	Proyeksi penduduk (5 tahun)	Kebutuhan air (perkotaan), m³/hari	Kebutuhan air (perdesaan), m³/hari	Kebutuhan air (m³/hari)	Kebutuhan air 5 tahun (m³/hari) perkotaan	Kebutuhan air 5 tahun (m³/hari) perdesaan	Total Kebutuhan air 5 tahun (m³/hari)
				KOTA	DESA	KOTA	DESA									
		Buntulia	13.296				13.296		3.646	15.332	0,00	797,76	797,76		919,89	919,89
		Duhiadaa	14.247				14.247		3.918	16.428	0,00	854,82	854,82		985,69	985,69
		Randangan	19.175				19.175		5.326	22.111	0,00	1.150,50	1.150,50		1.326,64	1.326,64
		Taluditi	9.396				9.396		2.532	10.834	0,00	563,76	563,76		650,07	650,07
		Paguat	17.194	√		17.194			4.760	19.826	2.807,53	0,00	2.807,53	2.102,97		2.102,97
		Dengilo	6.754				6.754		1.777	7.788	0,00	405,24	405,24		467,28	467,28
		jumlah	161.450			52.026	109.424		44.139	186.168	8.495	6.565	15.060,53	21.625,97	36.686,50	58.312,47
4	Bone Bolango	Tapa	8.006				8.006	1,19%	2.813	8.494	0,00	480,36	480,36		509,63	509,63
		Bulango Utara	8.551				8.551		2.888	9.072	0,00	513,06	513,06		544,32	544,32
		Bulango Selatan	11.817				11.817		3.935	12.537	0,00	709,02	709,02		752,22	752,22
		Bulango Timur	6.026				6.026		2.078	6.393	0,00	361,56	361,56		383,59	383,59
		Bulango Ulu	4.408				4.408		1.560	4.677	0,00	264,48	264,48		280,60	280,60
		Kabila	24.374				24.374		7.959	25.859	0,00	1.462,44	1.462,44		1.551,55	1.551,55
		Botupingge	7.170				7.170		2.445	7.607	0,00	430,20	430,20		456,41	456,41
		Tilongkabila	20.113	√		20.113			6.593	21.339	3.284,16	0,00	3.284,16	2.263,36		2.263,36
		Suwawa	13.879	√		13.879			4.595	14.725	2.266,24	0,00	2.266,24	1.561,84		1.561,84
		Suwawa Selatan	6.057				6.057		2.088	6.426	0,00	363,42	363,42		385,56	385,56
		Suwawa Timur	5.891				5.891		2.035	6.250	0,00	353,46	353,46		375,00	375,00
		Suwawa Tengah	6.666				6.666		2.284	7.072	0,00	399,96	399,96		424,33	424,33
		Pinogu	2.063				2.063		862	2.189	0,00	123,78	123,78		131,32	131,32
		Bone Pantai	11.303				11.303		3.770	11.992	0,00	678,18	678,18		719,50	719,50
		Kabila Bone	12.274				12.274		4.101	13.022	0,00	736,44	736,44		781,31	781,31
		Bone Raya	7.339	√		7.339			2.509	7.786	1.198,35	0,00	1.198,35	825,88		825,88
		Bone	10.616				10.616		3.624	11.263	0,00	636,96	636,96		675,77	675,77
		Bulawa	5.748				5.748		2.039	6.098	0,00	344,88	344,88		365,89	365,89
		jumlah	172.301			41.331	130.970		58.179	182.800	6.749	7.858	14.606,95	22.465,15	37.072,10	59.537,26
5	Gorontalo Utara	Atinggola	12.551	√		12.551		1,13%	3.396	13.276	1.521,02	0,00	1.521,02	1.408,21		1.408,21
		Gentuma Raya	10.435				10.435		2.816	11.038	0,00	626,10	626,10		662,28	662,28
		Kwandang	29.816	√		29.816			8.126	31.539	3.613,32	0,00	3.613,32	3.345,33		3.345,33
		Tomilito	10.285				10.285		2.776	10.879	0,00	617,10	617,10		652,76	652,76
		Penelo Kepulauan	4.246				4.246		1.123	4.491	0,00	254,76	254,76		269,48	269,48
		Anggrek	17.812	√		17.812			4.838	18.841	2.158,59	0,00	2.158,59	1.998,49		1.998,49
		Monano	7.772	√		7.772			2.087	8.221	941,87	0,00	941,87	872,01		872,01
		Sumalata	12.043				12.043		3.257	12.739	0,00	722,58	722,58		764,34	764,34
		Sumalata Timur	8.137				8.137		2.187	8.607	0,00	488,22	488,22		516,43	516,43
		Tolinggula	11.326				11.326		3.061	11.981	0,00	679,56	679,56		718,83	718,83
		Biau	5.977				5.977		1.595	6.322	0,00	358,62	358,62		379,35	379,35

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Lokasi	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Klasifikasi		Jumlah Penduduk (jiwa)		Laju pertumbuhan penduduk (%/tahun)	Jumlah Rumah Tangga (unit)	Proyeksi penduduk (5 tahun)	Kebutuhan air (perkotaan), m³/hari	Kebutuhan air (perdesaan), m³/hari	Kebutuhan air (m³/hari)	Kebutuhan air 5 tahun (m³/hari) perkotaan	Kebutuhan air 5 tahun (m³/hari) perdesaan	Total Kebutuhan air 5 tahun (m³/hari)
				KOTA	DESA	KOTA	DESA									
		jumlah	130.400			67.951	62.449		35.262	137.936	8.235	3.747	11.981,75	15.728,69	27.710,44	43.439,12
6	Kota Gorontalo	Kota Barat	17.733	√		17.733	0	0,49%	8.036	18.172	2.030,26	0,00	2.030,26	1.927,46		1.927,46
		Dungingi	19.419	√		19.419	0		8.854	19.899	2.223,30	0,00	2.223,30	2.110,72		2.110,72
		Kota Selatan	13.291	√		13.291	0		5.879	13.620	1.521,70	0,00	1.521,70	1.444,65		1.444,65
		Kota Timur	19.702	√		19.702	0		8.992	20.189	2.255,70	0,00	2.255,70	2.141,48		2.141,48
		Hulonthalangi	9.664	√		9.664	0		4.119	9.903	1.106,44	0,00	1.106,44	1.050,41		1.050,41
		Dumbo Raya	12.242	√		12.242	0		5.370	12.545	1.401,60	0,00	1.401,60	1.330,63		1.330,63
		Kota Utara	14.277	√		14.277	0		6.357	14.630	1.634,58	0,00	1.634,58	1.551,82		1.551,82
		Kota Tengah	20.190	√		20.190	0		9.227	20.690	2.311,57	0,00	2.311,57	2.194,52		2.194,52
		Sipatana	12.485	√		12.485	0		5.488	12.794	1.429,42	0,00	1.429,42	1.357,04		1.357,04
		jumlah	139.003			139.003	0		62.322	142.442	15.915	0	15.914,55	15.914,55	31.829,11	47.743,66
			1.145.026			568.634	576.392		358.653	1.208.525	68.935	34.584	103.518,19	138.101,71	241.619,90	379.721,61

Lanjutan tabel 2.6

No.	Lokasi	Kecamatan	Timbulan sampah (Ton/hari)	Timbulan sampah perkotaan (Ton/hari)	Proyeksi timbulan sampah 5 tahun (Ton/hari)	Produksi air limbah saat ini (m³/hari)	Produksi air limbah (m³/hari)		Proyeksi produksi air limbah 5 tahun (m³/hari)	Proyeksi produksi grey water 5 tahun (m³/hari)	Proyeksi produksi black water (tinja) 5 tahun (m³/hari)
							grey water	black water			
1	Gorontalo	Batudaa Pantai	7,73	0,00	7,92	530,26	397,69	132,56	542,83	407,13	135,71
		Biluhu	5,05	0,00	5,17	346,56	259,92	86,64	354,78	266,09	88,70
		Batudaa	9,64	0,00	9,87	661,30	495,97	165,32	676,98	507,74	169,25
		Bongomeme	13,43	0,00	13,75	921,22	690,91	230,30	943,07	707,30	235,77
		Tabongo	12,55	0,00	12,85	860,59	645,44	215,15	881,01	660,76	220,25
		Dungaliyo	11,54	0,00	11,82	791,62	593,71	197,90	810,39	607,80	202,60
		Tibawa	29,30	29,30	30,00	3.552,30	2.664,23	888,08	3.636,57	2.727,43	909,14
		Pulubala	17,48	0,00	17,90	1.198,75	899,06	299,69	1.227,19	920,39	306,80
		Boliyohuto	11,60	0,00	11,87	795,22	596,41	198,80	814,08	610,56	203,52
		Mootilango	13,09	0,00	13,40	897,79	673,34	224,45	919,09	689,32	229,77
		Tolangohula	15,89	0,00	16,26	1.089,26	816,95	272,32	1.115,10	836,33	278,78
		Asparaga	8,74	0,00	8,95	599,62	449,71	149,90	613,84	460,38	153,46
		Bilato	6,27	0,00	6,42	429,98	322,49	107,50	440,18	330,14	110,05
		Limboto	36,18	36,18	37,04	4.385,67	3.289,25	1.096,42	4.489,70	3.367,28	1.122,43
		Limboto Barat	17,58	17,58	18,00	2.131,06	1.598,29	532,76	2.181,61	1.636,21	545,40
		Telaga	15,91	15,91	16,29	1.929,19	1.446,89	482,30	1.974,95	1.481,21	493,74
		Telaga Biru	22,09	0,00	22,61	1.514,54	1.135,91	378,64	1.550,47	1.162,85	387,62
		Tilango	10,68	0,00	10,93	732,05	549,04	183,01	749,41	562,06	187,35
		Telaga Jaya	8,41	0,00	8,61	576,86	432,65	144,22	590,55	442,91	147,64
		jumlah	273,18	98,98	279,66	23.943,83	17.957,88	5.985,96	24.511,83	18.383,87	6.127,96
2	Boalemo	Mananggu	9,35	9,35	9,85	1.224,66	918,50	306,17	1.193,86	895,39	298,46
		Tilamuta	21,96	21,96	23,13	2.875,67	2.156,75	718,92	2.803,33	2.102,50	700,83
		Dulupi	12,40	12,40	13,06	1.623,51	1.217,63	405,88	1.582,67	1.187,00	395,67

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Lokasi	Kecamatan	Timbulan sampah (Ton/hari)	Timbulan sampah perkotaan (Ton/hari)	Proyeksi timbulan sampah 5 tahun (Ton/hari)	Produksi air limbah saat ini (m³/hari)	Produksi air limbah (m³/hari)		Proyeksi produksi air limbah 5 tahun (m³/hari)	Proyeksi produksi <i>grey water</i> 5 tahun (m³/hari)	Proyeksi produksi <i>black water</i> (tinja) 5 tahun (m³/hari)
							<i>grey water</i>	<i>black water</i>			
		Botuloito	11,11	0,00	11,70	762,05	571,54	190,51	802,51	601,88	200,63
		Paguyaman	24,69	24,69	26,01	3.233,81	2.425,36	808,45	3.152,47	2.364,35	788,12
		Wonosari	20,44	20,44	21,53	2.677,30	2.007,98	669,33	2.609,96	1.957,47	652,49
		Paguyaman Pantai	6,16	0,00	6,49	422,69	317,02	105,67	786,91	590,18	196,73
		jumlah	106,13	88,85	111,76	12.819,69	9.614,77	3.204,92	12.932	9.699	3.233
3	Pohuwato	Popayato	8,02	8,02	9,25	1.497,52	1.123,14	374,38	1.121,71	841,28	280,43
		Popayato Barat	5,90	0,00	6,80	404,40	303,30	101,10	466,31	349,73	116,58
		Popayato Timur	6,46	0,00	7,45	442,99	332,24	110,75	510,81	383,11	127,70
		Lemito	8,54	0,00	9,84	585,41	439,06	146,35	675,03	506,27	168,76
		Wanggarasi	4,20	0,00	4,85	288,19	216,14	72,05	332,31	249,23	83,08
		Marisa	16,36	16,36	18,86	3.052,52	2.289,39	763,13	2.286,48	1.714,86	571,62
		Patilanggio	7,49	0,00	8,64	513,70	385,27	128,42	592,34	444,26	148,09
		Buntulia	9,31	0,00	10,73	638,21	478,66	159,55	735,92	551,94	183,98
		Duhiadaa	9,97	0,00	11,50	683,86	512,89	170,96	788,55	591,41	197,14
		Randangan	13,42	0,00	15,48	920,40	690,30	230,10	1.061,31	795,98	265,33
		Taluditi	6,58	0,00	7,58	451,01	338,26	112,75	520,06	390,04	130,01
		Paguat	12,04	12,04	13,88	2.246,02	1.684,52	561,51	1.682,37	1.261,78	420,59
		Dengilo	4,73	0,00	5,45	324,19	243,14	81,05	373,82	280,37	93,46
		jumlah	113,02	36,42	130,32	12.048,42	9.036,32	3.012,11	11.147	8.360	2.787
4	Bone Bolango	Tapa	5,60	0,00	5,95	384,29	288,22	96,07	407,70	305,78	101,93
		Bulango Utara	5,99	0,00	6,35	410,45	307,84	102,61	435,46	326,59	108,86
		Bulango Selatan	8,27	0,00	8,78	567,22	425,41	141,80	601,78	451,33	150,44
		Bulango Timur	4,22	0,00	4,48	289,25	216,94	72,31	306,87	230,15	76,72
		Bulango Ulu	3,09	0,00	3,27	211,58	158,69	52,90	224,48	168,36	56,12
		Kabila	17,06	0,00	18,10	1.169,95	877,46	292,49	1.241,24	930,93	310,31
		Botupingge	5,02	0,00	5,32	344,16	258,12	86,04	365,13	273,85	91,28
		Tilongkabila	14,08	14,08	14,94	2.627,33	1.970,50	656,83	1.810,69	1.358,02	452,67
		Suwawa	9,72	9,72	10,31	1.812,99	1.359,74	453,25	1.249,47	937,10	312,37
		Suwawa Selatan	4,24	0,00	4,50	290,74	218,05	72,68	308,45	231,34	77,11
		Suwawa Timur	4,12	0,00	4,37	282,77	212,08	70,69	300,00	225,00	75,00
		Suwawa Tengah	4,67	0,00	4,95	319,97	239,98	79,99	339,46	254,60	84,87
		Pinogu	1,44	0,00	1,53	99,02	74,27	24,76	105,06	78,79	26,26
		Bone Pantai	7,91	0,00	8,39	542,54	406,91	135,64	575,60	431,70	143,90
		Kabila Bone	8,59	0,00	9,12	589,15	441,86	147,29	625,05	468,79	156,26
		Bone Raya	5,14	5,14	5,45	958,68	719,01	239,67	660,70	495,53	165,18
		Bone	7,43	0,00	7,88	509,57	382,18	127,39	540,62	405,46	135,15
		Bulawa	4,02	0,00	4,27	275,90	206,93	68,98	292,72	219,54	73,18
		jumlah	120,61	28,93	127,96	11.685,56	8.764,17	2.921,39	10.390	7.793	2.598
5	Gorontalo Utara	Atinggola	8,79	8,79	9,29	1.216,82	912,61	304,20	1.126,57	844,93	281,64
		Gentuma Raya	7,30	0,00	7,73	500,88	375,66	125,22	529,83	397,37	132,46
		Kwandang	20,87	20,87	22,08	2.890,66	2.167,99	722,66	2.676,26	2.007,20	669,07

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Lokasi	Kecamatan	Timbulan sampah (Ton/hari)	Timbulan sampah perkotaan (Ton/hari)	Proyeksi timbulan sampah 5 tahun (Ton/hari)	Produksi air limbah saat ini (m ³ /hari)	Produksi air limbah (m ³ /hari)		Proyeksi produksi air limbah 5 tahun (m ³ /hari)	Proyeksi produksi <i>grey water</i> 5 tahun (m ³ /hari)	Proyeksi produksi <i>black water</i> (tinja) 5 tahun (m ³ /hari)
							<i>grey water</i>	<i>black water</i>			
		Tomilito	7,20	0,00	7,62	493,68	370,26	123,42	522,21	391,66	130,55
		Penelo Kepulauan	2,97	0,00	3,14	203,81	152,86	50,95	215,59	161,69	53,90
		Anggrek	12,47	12,47	13,19	1.726,87	1.295,15	431,72	1.598,79	1.199,10	399,70
		Monano	5,44	5,44	5,75	753,50	565,12	188,37	697,61	523,21	174,40
		Sumalata	8,43	0,00	8,92	578,06	433,55	144,52	611,47	458,60	152,87
		Sumalata Timur	5,70	0,00	6,03	390,58	292,93	97,64	413,15	309,86	103,29
		Tolinggula	7,93	0,00	8,39	543,65	407,74	135,91	575,07	431,30	143,77
		Biau	4,18	0,00	4,43	286,90	215,17	71,72	303,48	227,61	75,87
		jumlah	91,28	47,57	96,56	9.585,40	7.189,05	2.396,35	9.270	6.953	2.318
6	Kota Gorontalo	Kota Barat	12,41	12,41	12,72	1.624,21	1.218,16	406,05	1.541,97	1.156,48	385,49
		Dungingi	13,59	13,59	13,93	1.778,64	1.333,98	444,66	1.688,58	1.266,43	422,14
		Kota Selatan	9,30	9,30	9,53	1.217,36	913,02	304,34	1.155,72	866,79	288,93
		Kota Timur	13,79	13,79	14,13	1.804,56	1.353,42	451,14	1.713,18	1.284,89	428,30
		Hulonthalangi	6,76	6,76	6,93	885,15	663,86	221,29	840,33	630,25	210,08
		Dumbo Raya	8,57	8,57	8,78	1.121,28	840,96	280,32	1.064,50	798,38	266,13
		Kota Utara	9,99	9,99	10,24	1.307,67	980,75	326,92	1.241,45	931,09	310,36
		Kota Tengah	14,13	14,13	14,48	1.849,25	1.386,94	462,31	1.755,62	1.316,71	438,90
		Sipatana	8,74	8,74	8,96	1.143,53	857,65	285,88	1.085,63	814,22	271,41
		jumlah	97,30	97,30	99,71	12.731,64	9.548,73	3.182,91	12.086,99	9.065,24	3.021,75
			801,52	398,04	845,97	82.814,55	62.110,91	20.703,64	80.338,05	60.253,54	20.084,51

Sumber : Hasil perhitungan berdasarkan data awal pada tabel 2.5

Tabel 2-7
Rekapitulasi Perhitungan Awal berdasarkan Nilai-nilai standar yang digunakan
Dalam *Roadmap* Sanitasi Provinsi (RSP) Gorontalo Tahun 2029

No.	Lokasi	Timbulan sampah (Ton/hari)	Timbulan sampah perkotaan (Ton/hari)	Proyeksi timbulan sampah 5 tahun (Ton/hari)	Produksi air limbah saat ini (m ³ /hari)	Produksi air limbah (m ³ /hari)		Proyeksi produksi air limbah 5 tahun (m ³ /hari)	Proyeksi produksi <i>grey water</i> 5 tahun (m ³ /hari)	Proyeksi produksi <i>black water</i> (tinja) 5 tahun (m ³ /hari)
						<i>grey water</i>	<i>black water</i>			
1	Kabupaten Gorontalo	106,1	88,8	111,8	13.897,5	10.423,1	3.474,4	14.635,3	10.976,5	3.658,8
2	Kabupaten Boalemo	273,2	103,1	279,7	33.115,9	24.837,0	8.279,0	33.901,5	25.426,1	8.475,4
3	Kabupaten Pohuwato	113,0	36,2	130,3	21.090,0	15.817,5	5.272,5	24.318,8	18.239,1	6.079,7
4	Kabupaten Bone Bolango	120,6	28,9	128,0	8.485,5	6.364,1	2.121,4	9.002,6	6.751,9	2.250,6
5	Kabupaten Gorontalo Utara	91,3	47,6	96,6	12.642,3	9.481,7	3.160,6	13.372,9	10.029,7	3.343,2
6	Kota Gorontalo	97,3	97,3	99,7	12.731,6	9.548,7	3.182,9	13.046,6	9.785,0	3.261,7
	Provinsi Gorontalo	801,52	401,96	845,97	101.962,78	76.472,09	25.490,70	108.277,68	81.208,26	27.069,42

Sumber : Rekapitulasi berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2.6

2.1.2 Akses Sanitasi Layak dan Aman Provinsi

Target capaian akses sanitasi layak dan aman provinsi ditetapkan berdasarkan distribusi target dari pemerintah pusat, sebagaimana dituangkan pada tabel 2.8, dibawah ini.

Tabel 2-8
Target Akses Sanitasi Berdasarkan Draft RPJMN Tahun 2025-2029
Tahun 2024-2025

No.	Komponen	Target	Keterangan
A.	Target Akses Sanitasi (air limbah domestik)		rencana teknokratik peta jalan sanitasi aman, target sanitasi aman pada Tahun 2030
	• Layak	100%	
	• Aman	30% (didalam akses layak)	Tahun 2025-2030 : 14%, 17%, 20%, 23%, 26% dan 30%
	• Buang Air Besar Sembarangan (BABs)	0%	
	• Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	100%	
	Proporsi akses aman		
	• SPALD-S	25%	
	• SPALD-T	5%	
	➤ SPALD-T perkotaan dan permukiman berbasis institusi	4%	
	➤ SPALD-T permukiman berbasis masyarakat	1%	
B.	Target Akses Pengelolaan Persampahan		Platform Sistem Pengelolaan Persampahan Bappenas, 2021 dan Target Persampahan dalam RPJPN-RPKMN Bappenas, 13 Juni 2024

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Komponen	Target	Keterangan
1.	Rumah tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah	100%	RPJPN 2025-2045
	• Sampah Residu tersisa di LUR	10%	
	• Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	90%	
	➢ Sampah terdaur ulang di fasilitas pengolahan sampah	35%	
2.	Rumah tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah	85%	Draft RPJMN 2025-2029
	• Sampah Residu tersisa di LUR	47%	
	• Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	38%	
	➢ Sampah terdaur ulang di fasilitas pengolahan sampah	20%	

Sumber : draft RPJMN 2025-2029

Berdasarkan beberapa acuan di atas, pada tabel dibawah ini diuraikan target-target akses sanitasi Provinsi Gorontalo sebagai berikut.

Tabel 2-9
Target Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo

No.	Komponen	Tahun							Acuan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Target Akses Sanitasi (air limbah domestik)								
	• Layak	90 %	91,67 %	93,33 %	95,00 %	96,67 %	98,33 %	100,00 %	Salinan UU RPJPN Tahun 2025-2029 No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Komponen	Tahun							Acuan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	• Aman	10,16 %	12,50 %	16,00 %	19,50 %	23,00 %	26,50 %	30,00 %	Rencana teknokratik Peta Jalan Sanitasi Aman
	• SPALD Setempat	8%	10%	13%	16%	19%	22%	25%	Konsep rancangan RPJMN 2025-2029
	• SPALD Terpusat	1%	2%	2%	3%	3%	4%	5%	Konsep rancangan RPJMN 2025-2029
	• SPALD Terpusat perkotaan dan permukiman berbasis institusi	1%	1%	2%	2%	3%	3%	4%	Konsep rancangan RPJMN 2025-2029
	• SPALD Terpusat permukiman berbasis masyarakat	0%	0%	0%	1%	1%	1%	1%	Konsep rancangan RPJMN 2025-2029
	• BABs	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Konsep rancangan RPJMN 2025-2029
	• Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Konsep rancangan RPJMN 2025-2029
2	Target Akses Penanganan Persampahan	28%	30%	32%	34%	36%	38%	40%	Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3	Target Akses	71%	70%	68%	66%	64%	62%	60%	Perpres No.

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Komponen	Tahun							Acuan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pengurangan Persampahan								97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
4	Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah (%RT)		25%	38,2 5%	51,5 0%	64,7 5%	78%		Konsep rancangan RPJMN 2025-2029
5	Sampah residu tersisa di LUR (Lahan Urug Residu)						47%		Konsep rancangan RPJMN 2025-2029
6	Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah		26,6 7%	29,5 0%	32,3 4%	35,1 7%	38%		Konsep rancangan RPJMN 2025-2029
	sampah terdaur ulang		16%	17%	18%	19%	20%		Konsep rancangan RPJMN 2025-2029

Sumber : Konsep rancangan RPJMN 2025-2029

Air Limbah Domestik

Persentase akses masing-masing kabupaten/kota, untuk air limbah domestik, diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2-10

Akses Sanitasi (air limbah Domestik) Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No.	Lokasi	Jumlah Desa/Kel	Jumlah KK	JSP (KK)	% Akses JSP	JSSP (KK)	% Akses JSSP
1	Kabupaten Boalemo	82	42.626	23.830	55,90%	149	0,35%

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Lokasi	Jumlah Desa/Kel	Jumlah KK	JSP (KK)	% Akses JSP	JSSP (KK)	% Akses JSSP
2	Kabupaten Gorontalo	205	116.126	88.417	76,14%	224	0,19%
3	Kabupaten Pohuwato	104	44.139	26.263	59,50%	210	0,48%
4	Kabupaten Bone Bolango	165	58.179	37.894	65,13%	0	0,00%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	123	35.262	27.585	78,23%	0	0,00%
6	Kota Gorontalo	50	62.321	57.781	92,72%	12	0,02%
Provinsi Gorontalo		729	358.653	261.770	72,99%	595	0,17 %

Lanjutan tabel 2.10

No.	Lokasi	Sharing (KK)	% Akses Sharing	BABS (KK)	% Akses BABS	% Akses Progres layak
1	Kabupaten Boalemo	16.499	38,71%	2.148	5,04%	94,96%
2	Kabupaten Gorontalo	10.847	9,34%	16.638	14,33%	85,67%
3	Kabupaten Pohuwato	12.201	27,64%	5.465	12,38%	87,62%
4	Kabupaten Bone Bolango	14.398	24,75%	5.887	10,12%	89,88%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	5.879	16,67%	1.798	5,10%	94,90%
6	Kota Gorontalo	2.811	4,51%	1.717	2,76%	97,24%
Provinsi Gorontalo		62.635	17,46%	33.653	9,38%	90,62%

Sumber : Seksi Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
Tahun 2024

Tabel 2-11

Rekapitulasi Akses Sanitasi (air limbah domestik) Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Lokasi	Air Limbah Domestik		
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) Layak	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) Aman	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikan buang air besar sembarangan (BABs)
1	Kabupaten Boalemo	94,96%	1,79%	5,04%

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Lokasi	Air Limbah Domestik		
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) Layak	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) Aman	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABs)
2	Kabupaten Gorontalo	85,67%	0,43%	14,33%
3	Kabupaten Pohuwato	87,62%	1,11%	12,38%
4	Kabupaten Bone Bolango	89,88%	0,84%	10,12%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	94,90%	2,17%	5,10%
6	Kota Gorontalo	97,24%	1,62%	2,76%
Provinsi Gorontalo		90,62%	1,10%	9,38%

Sumber :

Layak, Babs : Seksi Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Aman : BPPW Gorontalo, Data Keberfungsian Infrastruktur Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2023 (data SPALDT skala permukiman), berdasarkan SE 13/SE/DC/2022 tentang Pedoman Teknis pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Dirjen Cipta Karya, Tahun 2022

Tabel 2-12

Perbandingan Capaian dan Target Akses Sanitasi (air limbah domestik)
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No.	Komponen	Perbandingan Target		Eksisting (Oktober 2024)	Keterangan
		RPJMN 2020-2024	DRAFT RPJMN 2025-2029		
1.	Target Akses Sanitasi (air limbah domestik)				
	• Layak	90%	100%	90,62%	• Akses sanitasi layak (air limbah domestik) diatas TARGET RPJMN 2024L (lebih 0,617 %)
	• Aman	10%	30%	1,102%	• Akses sanitasi aman (air limbah domestik) MASIH DIBAWAH

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Komponen	Perbandingan Target		Eksisting (Oktober 2024)	Keterangan
		RPJMN 2020- 2024	DRAFT RPJMN 2025-2029		
					TARGET NASIONAL (kurang 8,898 %)
	BABs	0%	0	9,38%	Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABs) DIATAS TARGET NASIONAL, sebesar 9,38%

Sumber : tabel 2.11 dan tabel 2.12

Tabel 2-13

Sebaran Target Akses Sanitasi (air limbah domestik) Provinsi Gorontalo
Berdasarkan Draft RPJMN 2025-2029

Komponen	Baseline RPJMN	Tahun				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Target Akses Sanitasi (air limbah domestik)						
Layak	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%
Aman	10,00%	12,50%	16,50%	20,50%	24,50%	30,00%
- SPALD Setempat	8,33%	10,42%	13,75%	17,08%	20,42%	25,00%
- SPALD Terpusat	1,39%	2,08%	2,75%	3,42%	4,08%	5,00%
SPALD Terpusat perkotaan dan permukiman berbasis institusi	1,11%	1,67%	2,20%	2,73%	3,27%	4,00%
SPALD Terpusat permukiman berbasis masyarakat	0,28%	0,42%	0,55%	0,68%	0,82%	1,00%
BABs	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : daft RPJMN 2025-2029

Pengelolaan Persampahan

Untuk mengetahui gap akses sanitasi (persampahan) di Provinsi Gorontalo, dibawah ini diuraikan data sementara terkait volume sampah yang tertangani masing-masing kabupaten/kota berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dokumen SSK dan data UPTD TPA Regional Talumelito, sebagai berikut.

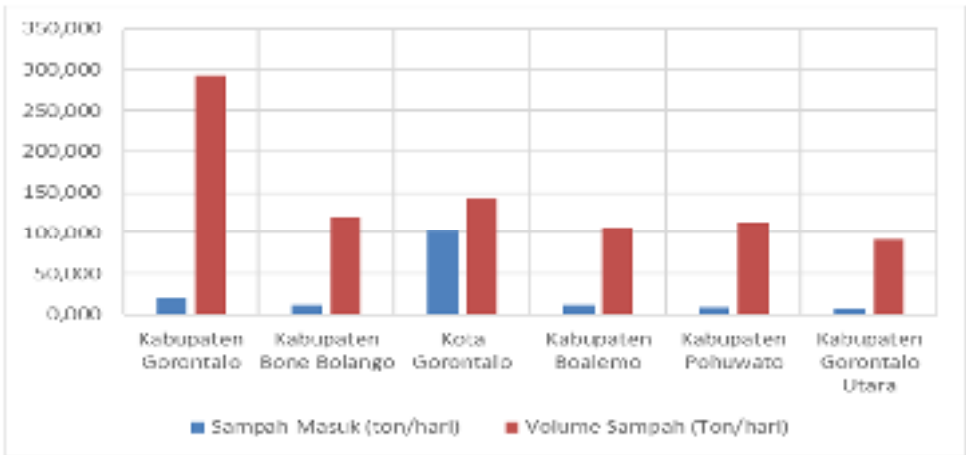
Tabel 2-14
Volume Sampah Tertangani Masing-masing Kabupaten/kota
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Lokasi	Volume sampah tertangani (ton/hari)	Perhitungan Volume Sampah Total (ton/hari)	% Penanganan
1	Kabupaten Boalemo	12,660	106,126	11,93%
2	Kabupaten Gorontalo	15,241	273,184	5,58%
3	Kabupaten Pohuwato	8,620	113,0	7,63%
4	Kabupaten Bone Bolango	7,004	120,611	5,81%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	7,468	91,280	8,18%
6	Kota Gorontalo	75,654	97,302	77,75%
T O T A L		136,111	801,518	19,48%

Sumber : Dokumen SSK Kabupaten Pohuwato, Boalemo dan Gorontalo Utara
UPTD TPA Regional Talumelito (Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango dan Kota Gorontalo)
Hasil Perhitungan pada Tabel 2-7

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029



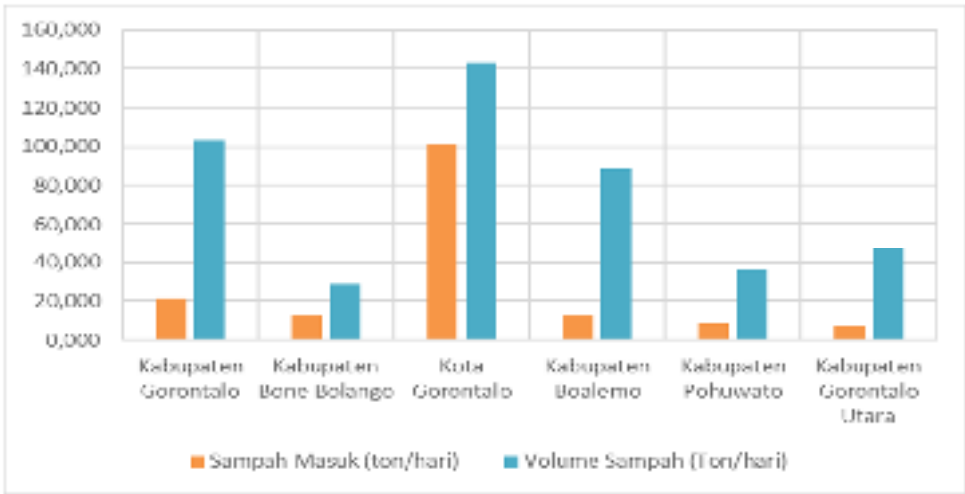
Gambar 2.3
Grafik Prosentase Penanganan Sampah
Di Provinsi Gorontalo Tahun 2024 (sumber : Tabel 2.14)

Tabel 2-15
Volume Sampah Perkotaan Tertangani Masing-masing Kabupaten/kota
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Nama Wilayah	Volume sampah tertangani (ton/hari)	Perhitungan Volume Sampah perkotaan (ton/hari)	% Penanganan
1	Kabupaten Boalemo	12,660	88,849	14,25%
2	Kabupaten Gorontalo	21,221	103,1	15,40%
3	Kabupaten Pohuwato	8,620	36,20	23,67%
4	Kabupaten Bone Bolango	12,228	28,932	24,21%
5	Kabupaten Gorontalo Utara	7,468	47,566	15,70%
6	Kota Gorontalo	73,915	97,302	77,75%
T O T A L		136,111	401,96	28,50%

Sumber : UPTD TPA Regional Talumelito (Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango dan Kota Gorontalo)
Hasil Perhitungan pada Tabel 2-7

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029



Gambar 2.4
Grafik Prosentase Penanganan Sampah Perkotaan
Di Provinsi Gorontalo Tahun 2024 (sumber : Tabel 2.15)

Berdasarkan volume sampah yang tertangani di TPA, dibandingkan dengan volume sampah perkotaan yang dihasilkan, maka pencapaian akses sanitasi (penanganan persampahan) Provinsi Gorontalo Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2-16
Capaian Target Akses Sanitasi (Penanganan Persampahan)
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No.	Komponen	Perbandingan Target		Eksisting (Oktober 2024)	Keterangan
		RPJMN 2020-2024	Draft RPJMN 2025-2029		
1	Target Akses Penanganan Persampahan	80%			
2	Target Akses Pengurangan Persampahan	20%			
	Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh		85,00%	28,541%	Defisit 56%

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Komponen	Perbandingan Target		Eksisting (Oktober 2024)	Keterangan
		RPJMN 2020-2024	Draft RPJMN 2025-2029		
	pengumpulan sampah				
	Sampah residu tersisa di LUR (Lahan Urug Residu)		47%	15,801%	Defisit 31,20%
	Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah		38,0%	12,740%	Defisit 25,26%
	sampah terdaur ulang		20,0%	4,410%	Defisit 16%

Sumber : Tabel 2.10, 2.15

Pengurangan Persampahan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud pengurangan sampah adalah kegiatan mengurangi timbunan sampah dengan pembatasan timbunan sampah, pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah (pasal 20, angka 1).

Proses pengurangan sampah di Provinsi Gorontalo, dilaksanakan dengan berbagai kegiatan sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-17
Sarana dan Prasarana Dalam Proses Pengurangan Sampah
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No.	Lokasi	Nama Fasilitas	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah terkelola (ton/thn)	Pengelola
A.	<u>Bank Sampah Induk</u>				
1	Kota Gorontalo	Bank Sampah	620,50	620,50	LSM

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Lokasi	Nama Fasilitas	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah terkelola (ton/thn)	Pengelola
		Induk Iloheluma			
2	Kab. Gorontalo	Ud. Haniyah	5.475,00	0,00	LSM
3	Kab. Gorontalo	Gemilang	2.138,90	0,00	Pemda
4	Kab. Pohuwato	Bank Sampah Himalaya	532,90	532,83	Pemda
	Jumlah		8.949,80	1.335,83	
B.	Bank Sampah Unit				
1	Kota Gorontalo	Bank Sampah Unit Mutiara	360,00	360,00	LSM
2	Kota Gorontalo	Bank Sampah Unit Maps	0,19	0,19	LSM
3	Kota Gorontalo	Bank Sampah Archipelago	9,00	9,00	LSM
4	Kab. Gorontalo	Budi Lestari	12.600,00	0,00	Masyarakat
5	Kab. Pohuwato	Bank Sampah Mopio	92,50	92,50	Pemda
6	Kab. Pohuwato	Bank Sampah Pelangi	90,35	90,35	Pemda
7	Kab. Pohuwato	Bank Sampah Maleo	137,09	137,09	Pemda
8	Kab. Pohuwato	Bank Sampah Marisa Indah	18,52	18,52	Pemda
9	Kab. Pohuwato	Bank Sampah Panua	15,23	15,23	Pemda
10	Kab. Pohuwato	Bank Sampah Madani	35,65	33,00	Pemda
11	Kab. Pohuwato	Bank Sampah Molamahu	69,31	69,31	Pemda
12	Kab. Pohuwato	Bank Sampah Pasar Marisa	58,09	58,09	Pemda
	Jumlah		13.485,94	883,29	

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Lokasi	Nama Fasilitas	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah terkelola (ton/thn)	Pengelola
C.	Rumah Kompos				
1	Kab. Bone Bolango	Rumah Kompos Ulantha	152,94	152,94	Pemda
2	Kota Gorontalo	Pasar Liluwo	76,65	76,65	Masyarakat
3	Kab. Pohuwato	Rumah Kompos Taluduyunu	12,78	12,78	Masyarakat
5	Kab. Pohuwato	rumah kompos griya indah	7,30	7,30	Masyarakat
6	Kab. Pohuwato	Rumah Kompos Teratai	16,79	16,79	Masyarakat
7	Kota Gorontalo	Rumah Kompos pasar liluwo	182,50	182,50	Masyarakat
	Jumlah		448,96	448,96	
D.	TPS 3R				
1	Kab. Bone Bolango	Ksm Tps 3r Sejahtera	228,13	228,13	LSM
2	Kab. Bone Bolango	Tps 3r Cemerlang	102,20	102,20	LSM
3	Kota Gorontalo	Tps 3r Alibotu	182,50	182,50	LSM
4	Kota Gorontalo	Tps 3r Moodu	401,50	401,50	LSM
5	Kota Gorontalo	Tps 3r Leato Saelatan	36,50	36,50	LSM
6	Kota Gorontalo	Tps 3r Otanaha Smart	200,75	200,75	LSM
7	Kota Gorontalo	Tps 3r Setiatama	602,25	602,25	LSM
8	Kota Gorontalo	Tps 3r Smart City	292,00	290,38	LSM
9	Kota Gorontalo	Ksm Dembulo	36,50	36,50	LSM
10	Kota Gorontalo	Tps 3r Ramadhani	182,50	177,03	LSM
11	Kota Gorontalo	Tps 3r Maju Bersama	730,00	719,05	LSM
12	Kota Gorontalo	Tps 3r Selayar	365,00	365,00	LSM
	Jumlah		3359,83	3341,79	
E.	PUSAT DAUR				

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Lokasi	Nama Fasilitas	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah terkelola (ton/thn)	Pengelola
	ULANG (PDU)				
1	Kab. Pohuwato	Pdu Madani Teratai Kecamatan Marisa	285,50	245,35	Pemda
2	Kab. Pohuwato	Pdu Barakati Kecamatan Duihadaa	96,73	85,78	Pemda
	Jumlah		382,23	331,13	
F.	SEKTOR INFORMAL (LAPAK DAN PENGEPUL)				
1	Kab. Bone Bolango	Lapak Talili	13,87	13,87	Kab. Bone Bolango
2	Kota Gorontalo	Ud. Maju Jaya	1.113,25	1.113,25	Kota Gorontalo
3	Kota Gorontalo	Ud. Raihan Putra Mandiri	803,00	803,00	Kota Gorontalo
4	Kota Gorontalo	Loak Jaya	2.190,00	2.175,40	Kota Gorontalo
5	Kota Gorontalo	Ud. Umi Latifa	730,00	730,00	Kota Gorontalo
6	Kota Gorontalo	Ud. Barokah	1.828,65	1.825,00	Kota Gorontalo
7	Kab. Pohuwato	Ud. Dua Putra Marisa	4.580,75	4.577,46	Kab. Pohuwato
8	Kab. Pohuwato	Pengepul	173,38	171,55	Kab. Pohuwato
	Jumlah		11.432,90	11.409,53	

Sumber : KLHK, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024

Tabel 2-18
Rekapitulasi Sampah yang Dikelola (Proses Pengurangan Sampah)
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Jenis Sarana Pengurangan Sampah	Sampah Masuk		Sampah Dikelola	
	(ton/tahun)	(ton/hari)	(ton/tahun)	(ton/hari)
Bank Sampah Induk	8.949,80	24,86	1.335,83	3,71
Bank Sampah Unit	13.485,94	37,46	883,29	2,45
Komposting Skala RT RW	255,50	0,71	255,50	0,71
Rumah Kompos	448,96	1,25	448,96	1,25

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

TPS 3R	3.359,83	9,33	3.341,79	9,28
Pusat Daur Ulang	382,23	1,06	331,13	0,92
Sektor Informal (Lapak dan Pengepul)	11.432,90	31,76	11.409,53	31,69
Jumlah	38.315,16	106,43	18.006,03	50,02

Sumber : Tabel 2.17

Jika timbulan sampah yang dihasilkan penduduk di Provinsi Gorontalo pada Tahun 2024 adalah 801,52 ton/hari atau 401,96 ton/hari untuk timbulan sampah perkotaan, maka pengurangan sampah administrasi adalah $(50,02/801,52) \times 100\% = 6,24\%$ dan pengurangan sampah perkotaan adalah $(50,02/401,96) \times 100\% = 12,44\%$.

Perbandingan capaian akses pengurangan sampah dengan target pemerintah pusat dan provinsi, ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-19

Capaian Target Akses Sanitasi (Pengurangan Persampahan)
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No.	Komponen	Perbandingan Target		Eksisting (Oktober 2024)	Keterangan
		Pusat	Provinsi		
1	Target Akses Pengurangan Persampahan	20%	32%	Adm = 6,24%% Perkotaan 12,44%	- Akses sanitasi layak (penanganan persampahan) DIBAWAH dari target yang ditetapkan Pemerintah Pusat, dengan gap sebesar 13,76% dan 7,60% (perkotaan) - Akses sanitasi layak (penanganan persampahan) DIBAWAH dari target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi, dengan gap sebesar 25,76% dan 19,60% (perkotaan)

Sumber : Tabel 2.17 dan Tabel 2.18

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Melihat gap yang terlalu besar antara kondisi eksisting dengan target draft RPJMN Tahun 2025-2029, maka berdasarkan target realistis sesuai kemampuan aspek peraturan, kelembagaan, teknis operasional dan pendanaan, maka akses sanitasi akan dihitung berdasarkan data eksisting sanitasi Tahun 2024 dan target sanitasi pada Tahun 2025.

Kenaikan target selama 1 (satu) tahun akan dipergunakan sebagai tambahan akses pada tahun-tahun selanjutnya.

Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-20
Target dan Sebaran Akses Sanitasi
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Komponen	Akses Sanitasi -Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
A.	Target Akses Sanitasi (air limbah domestik)					
1.	Layak	92,50%	94,38%	96,25%	98,13%	100,00%
2	Aman	4,88%	8,27%	11,22%	14,16%	17,27%
2.a	SPALD Setempat	4,03%	6,87%	9,31%	11,75%	14,33%
2.b	SPALD Terpusat	0,83%	1,41%	1,91%	2,41%	3,04%
2.b.1	<i>SPALD Terpusat perkotaan dan permukiman berbasis institusi</i>	0,66%	1,13%	1,53%	1,93%	2,43%
2.b.2	<i>SPALD Terpusat permukiman berbasis masyarakat</i>	0,13%	0,23%	0,31%	0,39%	0,49%
3	BABs	7,23%	5,52%	4,31%	3,11%	1,90%
B.	Target Akses Sanitasi persampahan)					
5	Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah	50,05%	56,62%	63,19%	69,75%	85,00%
5.a	Sampah residu tersisa di LUR (Lahan	30,03%	32,77%	35,50%	38,23%	49,18%

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Komponen	Akses Sanitasi -Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Urug Residu)					
5.b	Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	20,02%	23,85%	27,69%	31,53%	35,82%
5.b.1	sampah terdaur ulang	6,12%	7,58%	9,04%	10,51%	12,09%

Sumber : Hasil perhitungan berdasarkan capaian sanitasi eksisting

Tabel 2-21

Target dan Sebaran Akses Sanitasi Kabupaten/kota

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Komponen	Akses Sanitasi -Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
A.	Target Akses Sanitasi (air limbah domestik)					
1.	Layak					
	• Kabupaten Boalemo	95,97%	96,98%	97,98%	98,99%	100,00%
	• Kabupaten Gorontalo	88,54%	91,40%	94,27%	97,13%	100,00%
	• Kabupaten Bone Bolango	88,54%	91,40%	94,27%	97,13%	100,00%
	• Kabupaten Pohuwato	90,09%	92,57%	95,05%	97,52%	100,00%
	• Kabupaten Gorontalo Utara	95,92%	96,94%	97,96%	98,98%	100,00%
	• Kota Gorontalo	95,97%	96,98%	97,98%	98,99%	100,00%
2	Aman					
	• Kabupaten Boalemo	2,00%	3,83%	5,66%	7,49%	9,32%
	• Kabupaten Gorontalo	2,30%	6,00%	7,00%	8,00%	10,00%
	• Kabupaten Bone Bolango	1,00%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%
	• Kabupaten Pohuwato	5,00%	8,89%	12,78%	16,67%	20,56%
	• Kabupaten Gorontalo Utara	4,00%	7,29%	10,58%	13,87%	17,16%
	• Kota	15,00%	21,64%	28,28%	34,92%	41,56%

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Komponen	Akses Sanitasi -Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Gorontalo					
2.a	SPALD Setempat					
	• Kabupaten Boalemo	1,66%	3,18%	4,70%	6,22%	7,74%
	• Kabupaten Gorontalo	1,91%	4,98%	5,81%	6,64%	8,30%
	• Kabupaten Bone Bolango	0,83%	1,66%	2,49%	3,32%	4,15%
	• Kabupaten Pohuwato	4,00%	7,38%	10,61%	13,84%	17,06%
	• Kabupaten Gorontalo Utara	3,32%	6,05%	8,78%	11,51%	14,24%
	• Kota Gorontalo	12,45%	17,96%	23,47%	28,98%	34,49%
2.b	SPALD Terpusat					
	• Kabupaten Boalemo	0,34%	0,65%	0,96%	1,27%	1,58%
	• Kabupaten Gorontalo	0,39%	1,02%	1,19%	1,36%	1,70%
	• Kabupaten Bone Bolango	0,17%	0,34%	0,51%	0,68%	0,85%
	• Kabupaten Pohuwato	0,85%	1,51%	2,17%	2,83%	4,11%
	• Kabupaten Gorontalo Utara	0,68%	1,24%	1,80%	2,36%	2,92%
	• Kota Gorontalo	2,55%	3,68%	4,81%	5,94%	7,07%
2.b.1	<i>SPALD Terpusat perkotaan dan permukiman berbasis institusi</i>					
	• Kabupaten Boalemo	0,27%	0,52%	0,77%	1,02%	1,27%
	• Kabupaten Gorontalo	0,31%	0,82%	0,95%	1,09%	1,36%
	• Kabupaten Bone Bolango	0,14%	0,27%	0,41%	0,54%	0,68%
	• Kabupaten Pohuwato	0,68%	1,21%	1,74%	2,27%	3,29%
	• Kabupaten Gorontalo Utara	0,54%	0,99%	1,44%	1,89%	2,33%
	• Kota Gorontalo	2,04%	2,94%	3,85%	4,75%	5,65%

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Komponen	Akses Sanitasi -Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
2.b.2	SPALD Terpusat permukiman berbasis masyarakat					
	• Kabupaten Boalemo	0,05%	0,10%	0,15%	0,20%	0,25%
	• Kabupaten Gorontalo	0,06%	0,16%	0,19%	0,22%	0,27%
	• Kabupaten Bone Bolango	0,03%	0,05%	0,08%	0,11%	0,14%
	• Kabupaten Pohuwato	0,14%	0,24%	0,35%	0,45%	0,66%
	• Kabupaten Gorontalo Utara	0,11%	0,20%	0,29%	0,38%	0,47%
	• Kota Gorontalo	0,41%	0,59%	0,77%	0,95%	1,13%
3	BABs					
	• Kabupaten Boalemo	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	• Kabupaten Gorontalo	15,00%	11,80%	8,60%	5,40%	2,20%
	• Kabupaten Bone Bolango	9,00%	8,90%	8,80%	8,70%	8,60%
	• Kabupaten Pohuwato	10,38%	7,90%	5,43%	2,95%	0,48%
	• Kabupaten Gorontalo Utara	6,00%	4,53%	3,06%	1,59%	0,12%
	• Kota Gorontalo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B.	Target Akses Sanitasi (persampahan)					
5	Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah					
	• Kabupaten Boalemo	28,40%	42,55%	56,70%	70,85%	85,00%
	• Kabupaten Gorontalo	46,75%	56,31%	65,87%	75,44%	85,00%
	• Kabupaten Bone Bolango	45,89%	55,66%	65,44%	75,22%	85,00%
	• Kabupaten Pohuwato	32,93%	32,93%	32,93%	32,93%	85,00%

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Komponen	Akses Sanitasi -Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
	• Kabupaten Gorontalo Utara	50,76%	59,32%	67,88%	76,44%	85,00%
	• Kota Gorontalo	95,58%	92,93%	90,29%	87,64%	85,00%
5.a	Sampah residu tersisa di LUR (Lahan Urug Residu)					
	• Kabupaten Boalemo	23,40%	32,55%	41,70%	50,85%	60,00%
	• Kabupaten Gorontalo	20,75%	26,31%	31,87%	37,44%	43,00%
	• Kabupaten Bone Bolango	25,79%	27,69%	29,60%	31,51%	33,42%
	• Kabupaten Pohuwato	20,93%	20,93%	20,93%	20,93%	70,26%
	• Kabupaten Gorontalo Utara	23,76%	31,82%	39,88%	47,94%	56,00%
	• Kota Gorontalo	65,58%	57,28%	48,99%	40,69%	32,40%
5.b	Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah					
	• Kabupaten Boalemo	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%
	• Kabupaten Gorontalo	26,00%	30,00%	34,00%	38,00%	42,00%
	• Kabupaten Bone Bolango	20,10%	27,97%	35,84%	43,71%	51,58%
	• Kabupaten Pohuwato	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	14,74%
	• Kabupaten Gorontalo Utara	27,00%	27,50%	28,00%	28,50%	29,00%
	• Kota Gorontalo	30,00%	35,65%	41,30%	46,95%	52,60%
5.b.1	sampah terdaur ulang					
	• Kabupaten Boalemo	1,00%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%
	• Kabupaten Gorontalo	1,00%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%
	• Kabupaten Bone Bolango	4,12%	5,73%	7,34%	8,95%	10,57%

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Komponen	Akses Sanitasi -Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
	• Kabupaten Pohuwato	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,99%
	• Kabupaten Gorontalo Utara	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	• Kota Gorontalo	27,37%	32,53%	37,68%	42,84%	47,99%

Sumber : Hasil perhitungan berdasarkan capaian sanitasi eksisting

2.2 Pengelolaan Sanitasi Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

2.2.1 Umum

Berdasarkan petunjuk teknis penyusunan dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi (RSP), pengelolaan sanitasi oleh pemerintah kabupaten/kota, memuat kondisi eksisting sanitasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi, dimana profil sanitasi tersebut meliputi :

- Aspek peraturan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik
- Aspek kelembagaan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik
- Aspek infrastruktur eksisting pengelolaan persampahan dan air limbah domestik
- Aspek perilaku masyarakat pengelolaan persampahan dan air limbah domestik
- Aspek pendanaan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Bagian-1 : Aspek Peraturan Pengelolaan Persampahan dan air limbah domestik

Tabel 2-22

Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Aspek Pengaturan Pengelolaan Persampahan dan Air Limbah Domestik

Lokasi	Aspek Peraturan Terkait	Pelayanan Persampahan	Aspek Peraturan Terkait	Pengelolaan Air Limbah Domestik
Kabupaten Boalemo	Pengelolaan	PERDUP Boalemo No 59 th 2018 ttg. Juklak Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengelolaan	- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik - Peraturan Bupati Boalemo Nomor 54 Tahun 2021 tentang UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Retribusi	Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
	Pengurangan	Belum Ada		
	Penanganan	Belum Ada	Retribusi	Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 6 Tahun 2013 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
	Perencanaan teknis	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Boalemo dalam Pengelolaan Sampah	SPALD-T	Belum Ada
			SPALD-S	Belum Ada
			Perencanaan Teknis	Strategi Sanitasi Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2027
Kabupaten Pohuwato	Pengelolaan	Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pohuwato	Pengelolaan	Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Retribusi	Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Retribusi Sampah		
	Pengurangan	Belum Ada		
	Penanganan	Belum Ada	Retribusi	Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 4 Tahun 2016 tentang retribusi jasa umum
	Perencanaan Teknis	Peraturan Bupati (PERDUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 77 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah	SPALD-T	Belum Ada
			SPALD-S	Belum Ada
			Perencanaan Teknis	Strategi Sanitasi Kabupaten Pohuwato tahun 2019-2024

Sumber : Dinas, Badan dan Lembaga di kabupaten/kota Tahun 2024 BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id>

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Lanjutan tabel 2.22

Lokasi	Aspek Peraturan Terkait	Pelayanan Persampahan	Aspek Peraturan Terkait	Pengelolaan Air Limbah Domestik
Kabupaten Gorontalo	Pengelolaan	Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Gorontalo	Pengelolaan	Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 61 Tahun 2017 tentang UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik
	Retribusi	Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (instruksi bupati, Surat Edaran)		
	Pengurangan	Belum Ada		
	Penanganan	Belum Ada	Retribusi	Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum
	Perencanaan Teknis	Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	SPALD-T	Belum Ada
			SPALD-S	Belum Ada
			Perencanaan Teknis	Strategi Sanitasi Kabupaten Gorontalo Tahun 2023-2027

Lokasi	Aspek Peraturan Terkait	Pelayanan Persampahan	Aspek Peraturan Terkait	Pengelolaan Air Limbah Domestik
Kabupaten Bone Bolango	Pengelolaan	Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bone Bolango	Pengelolaan	Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Retribusi	Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2021 tentang pelimpahan wewenang pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada camat dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bone Bolango		
	Pengurangan	Belum Ada		
	Penanganan	Belum Ada	Retribusi	Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum
	Perencanaan Teknis	Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Boalemo dalam Pengelolaan Sampah	SPALD-T	Belum Ada
			SPALD-S	Belum Ada
			Perencanaan Teknis	Strategi Sanitasi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023-2027

Sumber : Dinas, Badan dan Lembaga di kabupaten/kota Tahun 2024 BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id>

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-23
 Nilai Peraturan dalam Profil Sanitasi Pengelolaan Persampahan
 Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Nama Kabupaten /Kota	PERATURAN							NILAI PERATURAN
	Perda			Perkada				
	Pengelolaan	Retribusi	Scoring	Perkada tentang Pengurangan Sampah	Perkada tentang Penanganan Sampah	Perkada tentang Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/ Masterplan /SSK)	Scoring	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Boalemo	1	1	100%	0	0	1	33%	67%
Gorontalo	1	1	100%	0	0	1	33%	67%
Pohuwato	1	1	100%	0	0	1	33%	67%
Bone Bolango	1	1	100%	0	0	1	33%	67%
Gorontalo Utara	1	1	100%	0	0	1	33%	67%
Kota Gorontalo	1	1	100%	0	0	1	33%	67%
Total			100%				33%	67%

sumber : Dinas, Badan Lembaga pengelola persampahan di Kabupaten/kota

Skoring dan nilai peraturan dalam profil sanitasi berdasarkan instrumen program RSP Kementerian PUPR, 2024

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-24
Nilai Peraturan dalam Profil Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Nama Kabupaten /Kota	PERATURAN							NILAI PERATURAN
	Perda			Perkada				
	Pengelolaan	Retribusi	Scoring	Perkada tentang SPALD-T	Perkada tentang SPALD-S	Perkada tentang Dokumen Perencanaan Teknis (Jakstrada/ RISPALD /SSK)	Scoring	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Boalemo	1	1	100%	0	0	1	33%	67%
Gorontalo	1	1	100%	0	0	1	33%	67%
Pohuwato	1	1	100%	0	0	1	33%	67%
Bone Bolango	1	1	100%	0	0	1	33%	67%
Gorontalo Utara	1	1	100%	0	0	1	33%	67%
Kota Gorontalo	1	1	100%	0	0	1	33%	67%
Total	6	6	100%	0	0	6	33%	67%

sumber : Dinas, Badan Lembaga pengelola Air Limbah Domestik di Kabupaten/kota

Scoring dan nilai peraturan dalam profil sanitasi berdasarkan instrumen program RSP Kementerian PUPR, 2024

Bagian-2 : Aspek kelembagaan Pengelolaan Persampahan dan Air Limbah Domestik

Data aspek kelembagaan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik dalam dokumen roadmap sanitasi Provinsi Gorontalo terdiri dari :

- Kelembagaan pemerintah pengelola persampahan dan air limbah domestik (seksi/bidang/dinas, UPTD, BLUD dan BUMD)
- Kelembagaan masyarakat (operator bank sampah dan operator TPS 3R) untuk pengelolaan persampahan
- Kelembagaan masyarakat (operator SPALD-T Perkotaan, IPAL Permukiman > 10 SR, IPAL Kawasan Tertentu dan operator SPALD-S Komunal, MCK, IPAL Komunal 2-10 SR), untuk pengelolaan air limbah domestik

Instrumen profil sanitasi untuk aspek kelembagaan pengelolaan persampahan dan air limbah domestik ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-25
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Aspek Kelembagaan Pengelolaan Persampahan

Lokasi	Aspek Kelembagaan	Jenis	Jumlah	Jumlah yang aktif	Scoring	Scoring total kelembagaan masyarakat	Nilai Kelembagaan
Kabupaten Boalemo	Kelembagaan pemerintah	Seksi/ bidang Dinas	-	-	0%	50%	25%
	Kelembagaan Masyarakat	Bank sampah induk/ unit	1	1	50%		
		TPS 3 R	2	0	0%		

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Lokasi	Aspek Kelembagaan	Jenis	Jumlah	Jumlah yang aktif	Scoring	Scoring total kelembagaan masyarakat	Nilai Kelembagaan
Kabupaten Gorontalo	Kelembagaan pemerintah	Seksi/ bidang Dinas	-	-	0%	25%	12,5%
	Kelembagaan Masyarakat	Bank sampah induk/ unit	4	2	50%		
		TPS 3 R	1	0	0%		
Kabupaten Pohuwato	Kelembagaan pemerintah	Seksi/ bidang Dinas	-	-	0%	40%	20%
		Bank sampah induk/ unit	0	0	0%		
	Kelembagaan Masyarakat	TPS 3 R	10	8	80%		
Kabupaten Bone Bolango	Kelembagaan pemerintah	Seksi/ bidang Dinas	-	-	0%	62,50%	31,25%
	Kelembagaan Masyarakat	Bank sampah induk/ unit	8	8	100%		
		TPS 3 R	4	1	25%		
Kabupaten Gorontalo Utara	Kelembagaan pemerintah	Seksi/ bidang Dinas	-	-	0%	50%	25%
	Kelembagaan Masyarakat	Bank sampah induk/ unit	1	1	100%		
		TPS 3 R	3	0	0%		
Kota Gorontalo	Kelembagaan pemerintah	Seksi/ bidang Dinas	-	-	0%	66,67%	33,33%
	Kelembagaan Masyarakat	Bank sampah induk/ unit	7	7	100%		
		TPS 3 R	9	3	33%		

Sumber : hasil perhitungan nilai kelembagaan dalam profil sanitasi berdasarkan instrumen RSP Kementerian PUPR, 2024

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

- 1) Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo
- 2) Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kabupaten Gorontalo
- 3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara
- 4) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo
- 5) Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Perhubungan Kabupaten Bone Bolango
- 6) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato

Tabel 2-26
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Aspek Kelembagaan Pengelolaan Air limbah Domestik

Lokasi	Aspek Kelembagaan	Jenis	Jumlah	Jumlah yang aktif	Scoring	Scoring total kelembagaan masyarakat	Nilai Kelembagaan
Kabupaten Boalemo	Kelembagaan pemerintah	UPTD	1	1	33%	90%	0%
	Kelembagaan Masyarakat	SPALD-T	10	8	80%		
		SPALD-S	935	935	100%		
Kabupaten Gorontalo	Kelembagaan pemerintah	UPTD	1	1	33%	90%	25%
	Kelembagaan Masyarakat	SPALD-T	5	4	80%		
		SPALD-S	325	325	100%		
Kabupaten Pohuwato	Kelembagaan pemerintah	Seksi/ bidang Dinas	-	-	0%	79%	25%
		SPALD-T	7	4	57%		
	Kelembagaan Masyarakat	SPALD-S	348	348	100%		
Kabupaten Bone Bolango	Kelembagaan pemerintah	Seksi/ bidang Dinas	-	-	0%	93%	25%
	Kelembagaan Masyarakat	SPALD-T	7	6	86%		
		SPALD-S	490	490	100%		
Kabupaten Gorontalo Utara	Kelembagaan pemerintah	UPTD	1	1	33%	90%	0%
	Kelembagaan Masyarakat	SPALD-T	10	8	80%		
		SPALD-S	211	211	100%		
Kota Gorontalo	Kelembagaan pemerintah	Seksi/ bidang Dinas	-	-	0%	95%	50%
	Kelembagaan Masyarakat	SPALD-T	10	9	90%		

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Lokasi	Aspek Kelembagaan	Jenis	Jumlah	Jumlah yang aktif	Scoring	Scoring total kelembagaan masyarakat	Nilai Kelembagaan
		SPALD-S	739	739	100%		
Rata-rata						89%	53%

Sumber : hasil perhitungan nilai kelembagaan dalam profil sanitasi berdasarkan instrumen RSP Kementerian PUPR, 2024

- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bone Bolango
- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Gorontalo
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Boalemo
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pohuwato
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara

Bagian-3 : Aspek infrastruktur eksisting Pengelolaan Persampahan dan Air Limbah Domestik

Data aspek infrastruktur pengelolaan persampahan dan air limbah domestik dalam dokumen roadmap sanitasi Provinsi, terdiri dari :

Persampahan

- Pengelolaan TPA
- TPST/Pusat Daur Ulang (PDU)
- Bank sampah induk/unit
- TPS 3R
- Sektor informal yang telah bekerjasama
- Pengangkutan sampah ke TPA

Air Limbah Domestik

- SPAL Domestik Terpusat (SPALD-T), yang terdiri dari *Sewerage* dan IPAL Skala Perkotaan/Kawasan Tertentu/Permukiman
- SPAL Domestik Setempat (SPALD-S), yang terdiri dari Pengolahan Setempat, BABs, IPLT dan Pengangkutan/pengaliran

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Instrumen profil sanitasi untuk aspek infrastruktur pengelolaan persampahan, dan air limbah domestik, ditunjukkan pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 2-27
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Aspek Infrastruktur Eksisting (Pengelolaan TPA)

Aspek Infrastruktur	Kabupaten Boalemo	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten Pohuwato	Kabupaten Bone Bolango	Kabupaten Gorontalo Utara	Kota Gorontalo
Kepemilikan TPA	TPA Pohungo Dulupi	TPA Regional Talumelito	TPA Delo Indah	TPA Regional Talumelito	TPA Molantadu	TPA Regional Talumelito
Jumlah TPA yang dipergunakan/ beroperasi (unit)	1	1	1	1	1	1
Luas lahan efektif tersedia di TPA (hektar)	7	2,1	2	3	10	2,1
Luas lahan efektif terpakai di TPA (hektar)	2	2	1	2	5	2
Berat sampah yang masuk ke TPA (ton/hari)	12,660	15,032	8,620	6,908	7,468	71,878
Berat sampah yang masuk ke TPA dari wilayah perkotaan (ton/hari)	12,660	15,032	8,620	6,908	7,468	71,878
Sisa Lahan TPA (hektar)	5	0,1	1	1	5	0,1
Kebutuhan pembangunan TPA baru	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya
% sampah tertangani TPA (total)	11,93%	5,5%	7,63%	5,73%	8,18%	73,87%
% sampah tertangani TPA (perkotaan)	14,25%	15,19%	23,56%	23,88%	15,70%	73,87%
Sistem TPA kabupaten/kota	<i>Open dumping</i>	TPA regional	<i>Open dumping</i>	TPA regional	<i>Open dumping</i>	TPA regional

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Aspek Infrastruktur	Kabupaten Boalemo	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten Pohuwato	Kabupaten Bone Bolango	Kabupaten Gorontalo Utara	Kota Gorontalo
yang beroperasi						
Sistem operasi TPA regional yang dipergunakan	-	<i>Controlled landfill</i>	-	<i>Controlled landfill</i>	-	<i>Controlled landfill</i>
Skore penanganan sampah	1	1	1	1	1	1
Skore penanganan sampah perkotaan	1	1	1	1	1	1
Sistem operasional TPA	2	2	2	2	2	2
Nilai Pengelolaan TPA	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%
Nilai Pengelolaan TPA Perkotaan	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%

Sumber : Dinas Pengelola persampahan kabupaten/kota Tahun 2024

Tabel 2-28

Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Aspek Infrastruktur Eksisting (TPST/Pusat Daur Ulang (PDU))

Aspek Infrastruktur	Kabupaten Boalemo	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten Pohuwato	Kabupaten Bone Bolango	Kabupaten Gorontalo Utara	Kota Gorontalo
Jumlah fasilitas yang dipergunakan/ beroperasi (unit)	5	2	15	5	5	10
Timbulan sampah yang masuk dari fasilitas yang beroperasi (ton/hari)	0,00	0,00	0,92	0,34	0,00	21,62
Timbulan sampah yang masuk dari wilayah perkotaan ke fasilitas yang beroperasi (ton/hari)	0,00	0,00	0,92	0,34	0,00	21,62
Sampah residu dari fasilitas yang beroperasi (ton/hari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EFISIENSI (%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% layanan TPST/PDU	0,00%	0,00%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Aspek Infrastruktur	Kabupaten Boalemo	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten Pohuwato	Kabupaten Bone Bolango	Kabupaten Gorontalo Utara	Kota Gorontalo
% layanan TPST/PDU (perkotaan)	0,00%	0,00%	2,51%	3,17%	0,00%	22,22%
Nilai TPST/PDU	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	33,33%
Nilai TPST/PDU (Perkotaan)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%

Sumber : Dinas Pengelola persampahan kabupaten/kota Tahun 2024

Tabel 2-29

Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Aspek Infrastruktur Eksisting (Bank Sampah Induk/unit)

Aspek Infrastruktur	Kabupaten Boalemo	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten Pohuwato	Kabupaten Bone Bolango	Kabupaten Gorontalo Utara	Kota Gorontalo
Jumlah fasilitas yang dipergunakan/ beroperasi (unit)	1	4	0	8	1	7
Timbulan sampah yang masuk dari fasilitas yang beroperasi (ton/hari)	0,0	0,0	1,46	0,00	0,00	6,40
Timbulan sampah yang masuk dari wilayah perkotaan ke fasilitas yang beroperasi (ton/hari)	0,0	0,0	1,46	0,00	0,00	6,40
Sampah residu dari fasilitas yang beroperasi (ton/hari)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EFISIENSI (%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
% layanan Bank Sampah	0,00%	0,00%	1,29%	0,00%	0,00%	6,58%
% layanan Bank Sampah (perkotaan)	0,00%	0,00%	4,03%	0,00%	0,00%	6,58%
Nilai Bank Sampah	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	33,33%
Nilai Bank Sampah (Perkotaan)	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	33,33%

Sumber : Dinas Pengelola persampahan kabupaten/kota Tahun 2024

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-30
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Aspek Infrastruktur Eksisting (TPS-3R)

Aspek Infrastruktur	Kabupaten Boalemo	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten Pohuwato	Kabupaten Bone Bolango	Kabupaten Gorontalo Utara	Kota Gorontalo
Jumlah fasilitas yang dipergunakan/ beroperasi (unit)	0	0	8	1	0	3
Timbulan sampah yang masuk dari fasilitas yang beroperasi (ton/hari)	0,00	0,00	7,64	2,02	0,00	21,62
Timbulan sampah yang masuk dari wilayah perkotaan ke fasilitas yang beroperasi (ton/hari)	0,00	0,00	7,64	2,02	0,00	21,62
Sampah residu dari fasilitas yang beroperasi (ton/hari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EFISIENSI (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100%	0,00%	100%
% layanan TPS 3R	0,00%	0,00%	6,76%	1,68%	0,00%	22,22%
% layanan TPS 3 R (perkotaan)	0,00%	0,00%	6,76%	1,68%	0,00%	22,22%
Nilai TPS 3R	0,00%	0,00%	0,00%	33,3%	0,00%	33,3%
Nilai TPS 3R (Perkotaan)	0,00%	0,00%	0,00%	33,3%	0,00%	33,3%

Sumber : Dinas Pengelola persampahan kabupaten/kota Tahun 2024

Tabel 2-31
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Aspek Infrastruktur Eksisting (Sektor Informal yang Telah Bekerjasama)

Aspek Infrastruktur	Kabupaten Boalemo	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten Pohuwato	Kabupaten Bone Bolango	Kabupaten Gorontalo Utara	Kota Gorontalo
Jumlah fasilitas yang	0	0	2	1	0	5

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Aspek Infrastruktur	Kabupaten Boalemo	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten Pohuwato	Kabupaten Bone Bolango	Kabupaten Gorontalo Utara	Kota Gorontalo
dipergunakan/ beroperasi (unit)						
Timbulan sampah yang masuk dari fasilitas yang beroperasi (ton/hari)	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,05
Timbulan sampah yang masuk dari wilayah perkotaan ke fasilitas yang beroperasi (ton/hari)	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,05
Sampah residu dari fasilitas yang beroperasi (ton/hari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EFISIENSI (%)	0,00%	0,00%	100%	0,00%	0,00%	100%
% layanan sektor informal	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,05%
% layanan sektor informal (perkotaan)	0,00%	0,00%	0,10%	0,13%	0,00%	0,05%
Nilai sektor informal	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	0,00%	33,33%
Nilai sektor informal (Perkotaan)	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	0,00%	33,33%

Sumber : Dinas Pengelola persampahan kabupaten/kota Tahun 2024

Tabel 2-32

Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Aspek Infrastruktur Eksisting (Pengangkutan Sampah)

Aspek Infrastruktur	Kabupaten Boalemo	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten Pohuwato	Kabupaten Bone Bolango	Kabupaten Gorontalo Utara	Kota Gorontalo
Pick up (unit)	0	0	2	1	0	0
Dump truk (unit)	1	7	4	5	3	17
Arm roll truk (unit)	0	2	1	0	1	5
Compactor truk (unit)	0	0	0	0	0	0
Jumlah ritasi/hari	2	2	2	1	2	2

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Aspek Infrastruktur	Kabupaten Boalemo	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten Pohuwato	Kabupaten Bone Bolango	Kabupaten Gorontalo Utara	Kota Gorontalo
Kapasitas pengangkutan (ton/hari)	3	27	19	8,5	12	66
% layanan pengangkutan	2,83%	9,88%	16,81%	7,05%	13,15%	67,83%
% layanan pengangkutan perkotaan	2,83%	9,88%	16,81%	7,05%	13,15%	67,83%
Nilai Angkutan	2,80%	9,90%	16,80%	7,0%	13,10%	67,80%
Nilai Angkutan Perkotaan	2,80%	9,90%	16,80%	7,0%	13,10%	67,80%

Sumber : Dinas Pengelola persampahan kabupaten/kota Tahun 2024

Tabel 2-33
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Aspek Infrastruktur Pengelolaan Air limbah Domestik - SPALDT

Kode BPS	Nama Kabupaten/Kota	INFRASTRUKTUR										NILAI SPALD-T
		SPALD-T										
		Sewerage dan IPAL Skala Perkotaan/Kawasan Tertentu/Permukiman										
		Ketersediaan SPALD-T	Jumlah IPAL (Unit)	Kapasitas Terpasang (m³/hari)	Kapasitas Terpakai (m³/hari)	Jumlah Sambungan Rumah Terpakai (SR)	Jumlah Jiwa Terlayani (jiwa)	Volume Air Limbah yang dikelola melalui Sewer (m³/hari)	% Air Limbah yang Dikelola Sewer	Prosentase Utilisasi Sistem (%)	Prosentase Cakupan Layanan SPALD-T	
7501	Boalemo	Ada	10	350,00	280,00	700,00	3.500,00	0	0,00%	80,0%	1,64%	67%
7502	Gorontalo	Ada	5	175,00	140,00	350,00	1.750,00	0	0,00%	80,0%	0,30%	67%
7503	Pohuwato	Ada	7	245,00	140,00	490,00	2.450,00	0	0,00%	57,1%	1,11%	67%
7504	Bone Bolango	Ada	7	245,00	210,00	490,00	2.450,00	0	0,00%	85,7%	0,84%	67%
7505	Gorontalo Utara	Ada	10	350,00	280,00	700,00	3.500,00	0	0,00%	80,0%	1,99%	67%
7506	Kota Gorontalo	Ada	10	350,00	315,00	700,00	3.500,00	0	0,00%	90,0%	1,12%	67%
Jumlah			49	1.715	1.365	3.430	17.150,00	0,00	0,00%	79,6%	0,96%	66,7%

Sumber :

- BPPW Gorontalo
- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bone Bolango
- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Gorontalo
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Boalemo
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pohuwato
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo Utara

Tabel 2-34
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Aspek Infrastruktur Pengelolaan Air limbah Domestik – SPALDS (pengolahan Setempat)

Kode BPS	Nama Kabupaten/Kota	INFRASTRUKTUR										
		SPALD-S										
		Pengolahan Setempat										
		Akses Layak Individual			Akses Layak Individu(JSSP)			Akses Layak Bersama (MCK)			Prosentase Cakupan Layanan Sistem Layak	NILAI PENGOLAHAN SETEMPAT
		Jumlah KK dengan Jamban Sehat Permanen	Jumlah Penduduk yang Terlayani (jiwa)	Prosentase Cakupan Layanan Sistem Individual	Jumlah KK Pengguna JSSP	Jumlah Penduduk Terlayani JSSP (jiwa)	Prosentase Cakupan Layanan JSSP	Jumlah KK yang Menggunakan Fasilitas Bersama	Jumlah Penduduk Terlayani Fasilitas Bersama (jiwa)	Prosentase Cakupan Layanan Fasilitas Bersama		
7501	Boalemo	23.830	84.757	55,90%	149	530	0,35%	16.499	58.682	38,71%	94,96%	31,65%
7502	Gorontalo	88.417	297.142	76,14%	224	753	0,19%	10.847	36.453	9,34%	85,67%	28,56%
7503	Pohuwato	26.263	96.064	59,50%	210	768	0,48%	12.201	44.628	27,64%	87,62%	29,21%
7504	Bone Bolango	37.894	112.226	65,13%	0	0	0,00%	14.398	42.641	24,75%	89,88%	29,96%
7505	Gorontalo Utara	27.585	102.010	78,23%	0	0	0,00%	5.879	21.741	16,67%	94,90%	31,63%
7506	Kota Gorontalo	57.781	128.877	92,72%	12	27	0,02%	2.811	6.270	4,51%	97,24%	32,41%
JUMLAH		261.770	821.075	72,99%	595	2.078	0,17%	62.635	199.967	17,46%	90,62%	30,21%

Sumber :

- Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-35
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Aspek Infrastruktur Pengelolaan Air limbah Domestik – SPALDS (BABs dan IPLT)

Kode BPS	Nama Kabupaten/Kota	INFRASTRUKTUR								NILAI IPLT
		BABS			Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)					
		Jumlah KK yang BABS	Jumlah Penduduk yang BABS (jiwa)	Prosentase Penduduk yang Melakukan BABS	Jumlah (unit)	Kapasitas terpasang (m3/hari)	Kapasitas Terpakai (m3/hari)	Efisiensi	% Kapasitas Terhadap Jumlah Produksi Black Water Total	
7501	Boalemo	2.148	7.640	5,04%	1	5,00	3,20	64,00%	0,14%	51,73%
7502	Gorontalo	16.638	55.915	14,33%	1	10,50	3,60	34,29%	0,13%	33,90%
7503	Pohuwato	5.465	19.990	12,38%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7504	Bone Bolango	5.887	17.435	10,12%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7505	Gorontalo Utara	1.798	6.649	5,10%	1	6,00	6,00	100,00%	0,19%	73,33%
7506	Kota Gorontalo	1.717	3.830	2,76%	1	15,70	10,00	63,69%	0,49%	38,22%
	JUMLAH	33.653	111.458	9,38%	4	37,20	22,80	61,29%	0,15%	43,44%

Sumber :

- BABs = Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
- IPLT = Pengelola IPLT Kabupaten Kota Tahun 2024

Tabel 2-36
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Aspek Infrastruktur Pengelolaan Air limbah Domestik – SPALDT

Kode BPS	Nama Kabupaten/Kota	Pengangkutan/Pengaliran					NILAI PENGANGKUTAN
		Jumlah Armada Truk Tinja yang Beroperasi (unit)	Volume Rata-Rata 1 unit Tangki Truk Tinja (m ³)	Volume tinja terangkut oleh armada dalam satu kali ritase (m ³)	Prosentase Lumpur Tinja yang Terangkut dari Total Potensi Lumpur Tinja yang Diproduksi	Lokasi Pembuangan Lumpur Tinja	
7501	Boalemo	2	4	8	0,14%	IPLT	67%
7502	Gorontalo	2	3,6	7,2	0,05%	IPLT	67%
7503	Pohuwato	0	0	0	0,00%	Tidak ada	0%
7504	Bone Bolango	0	0	0	0,00%	Tidak ada	0%
7505	Gorontalo Utara	3	4	12	0,24%	IPLT	67%
7506	Kota Gorontalo	2	5	10	0,18%	IPLT	67%
	JUMLAH	9	3	37	0,09%		44%

Sumber : Pengelola Air Limbah Kabupaten Kota Tahun 2024

Bagian-4 : Aspek Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Air Limbah Domestik

Data aspek perilaku masyarakat terkait pengelolaan persampahan dan Air Limbah Domestik dalam dokumen roadmap sanitasi Provinsi, terdiri dari :

- Perubahan perilaku masyarakat terkait kampanye dan edukasi terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan
- Perubahan perilaku masyarakat terkait monitoring dan evaluasi terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan
- Perubahan perilaku masyarakat terkait pelatihan teknis terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan

Instrumen profil sanitasi untuk aspek perilaku masyarakat dalam pengelolaan persampahan, dan air limbah domestik ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-37
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Aspek Perilaku Masyarakat (pengelolaan persampahan dan air limbah domestik)

Lokasi	Aspek Perilaku Masyarakat	Keterangan	Skoring	Nilai
Kabupaten Boalemo	Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya kampanye dan edukasi masyarakat	Ada	1	100%
	Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya monitoring dan evaluasi	Ada	1	
	Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya pelatihan teknis	Ada	1	
Kabupaten Gorontalo	Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya kampanye dan edukasi masyarakat	Ada	1	100%
	Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya	Ada	1	

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Lokasi	Aspek Perilaku Masyarakat	Keterangan	Skoring	Nilai
	monitoring dan evaluasi			
	Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya pelatihan teknis	Ada	1	
Kabupaten Pohuwato	Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya kampanye dan edukasi masyarakat	Ada	1	100%
	Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya monitoring dan evaluasi	Ada	1	
	Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya pelatihan teknis	Ada	1	
Kabupaten Bone Bolango	Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya kampanye dan edukasi masyarakat	Ada	1	100%
	Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya monitoring dan evaluasi	Ada	1	
	Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya pelatihan teknis	Ada	1	
Kabupaten Gorontalo Utara	Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya kampanye dan edukasi masyarakat	Ada	1	100%
	Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya monitoring dan evaluasi	Ada	1	
	Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya pelatihan teknis	Ada	1	
Kota Gorontalo	Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya kampanye dan edukasi masyarakat	Ada	1	100%
	Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya monitoring dan evaluasi	Ada	1	
	Perubahan perilaku masyarakat dengan adanya pelatihan teknis	Ada	1	

Sumber : Survey primer sesaat dengan metode wawancara terkait program

Bagian-5 : Aspek Pendanaan Dalam Pengelolaan Persampahan dan Air Limbah Domestik

Data aspek Pendanaan terkait pengelolaan persampahan dan Air Limbah Domestik dalam dokumen roadmap sanitasi Provinsi, terdiri dari :

- Pendanaan Pemerintah yang terdiri dari : APBD Kabupaten/kota untuk persampahan, APBN, APBD Provinsi, Total APBD Kabupaten/kota,
- Pendanaan Non Pemerintah yang terdiri dari : Ziswaf (zakat, infaq, shadaqah, wakaf), CSR, mikro kredit, kerjasama dengan swasta dan hibah non pemerintah
- Retribusi yang terdiri dari rencana retribusi dan realisasi retribusi

Instrumen profil sanitasi untuk aspek pendanaan dalam pengelolaan persampahan dan air limbah domestik, ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-38
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Aspek Pendanaan Persampahan (pendanaan pemerintah)

Kode BPS	Nama Kabupaten /Kota	PENDANAAN PERSAMPAHAN (dalam juta rupiah)							
		Pendanaan Pemerintah							
		APBD Kab/Kota untuk Persampahan (Rp.)	APBN (Rp.)	APBD Prov (Rp.)	Total APBD Kabupaten/Kota (Rp.)	Jumlah Pendanaan Pemerintah (Rp.)	Persentase Alokasi Pendanaan Persampahan dalam APBD Kab/Kota terhadap Total APBD Kab/Kota (%)	Kategori	Scoring Pendanaan APBD Kab/Kota
7501	Boalemo	700.000.000	0	0	812.340.000.000	700.000.000,00	0,086%	kurang	33,00%
7502	Gorontalo	2.572.956.624	16.405.552.916	0	1.489.280.000.000	18.978.509.540,00	0,173%	kurang	33,00%
7503	Pohuwato	3.897.249.000	600.000.000	0	974.960.000.000	4.497.249.000,00	0,400%	kurang	33,00%
7504	Bone Bolango	1.805.000.000	0	0	986.190.000.000	1.805.000.000,00	0,183%	kurang	33,00%
7505	Gorontalo Utara	150.000.000	0	0	743.750.000.000	150.000.000,00	0,020%	kurang	33,00%
7506	Kota Gorontalo	10.469.466.788	5.100.000.000	0	1.124.800.000.000	15.569.466.788,00	0,931%	kurang	33,00%
	Total	19.594.672.412,00	22.105.552.916,00	0,00	6.131.320.000.000,00	41.700.225.328,00	0,320%	kurang	33,00%

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Lanjutan tabel 2.38

Kode BPS	Nama Kabupaten/Kota	PENDANAAN PERSAMPAHAN (dalam juta rupiah)						
		Pendanaan Non Pemerintah						
		Ziswaf	CSR	Mikro Kredit	Kerjasama dengan Swasta	Hibah Non Pemerintah	Jumlah Pendanaan Non Pemerintah	Scoring
7501	Boalemo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7502	Gorontalo	0	75.000.000	0	0	0	75.000.000,00	0,20
7503	Pohuwato	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7504	Bone Bolango	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7505	Gorontalo Utara	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7506	Kota Gorontalo	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Total	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,20

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Lanjutan tabel 2.38

Kode BPS	Nama Kabupaten/Kota	Retribusi					Total Pendanaan Pemerintah dan Pendanaan Non Pemerintah Kabupaten/ Kota	Nilai Pendanaan
		Rencana Retribusi	Realisasi Retribusi	Efisiensi	Kategori	Scoring		
7501	Boalemo	0,00	0,00	0%	kurang	33%	700.000.000,00	22%
7502	Gorontalo	393.393.600,00	299.777.725,01	76%	Cukup	67%	19.353.287.265,01	40%
7503	Pohuwato	0,00	0,00	0%	kurang	33%	4.497.249.000,00	22%
7504	Bone Bolango	327.828.000,00	137.767.094,38	42%	kurang	33%	1.942.767.094,38	22%
7505	Gorontalo Utara	0,00	0,00	0%	kurang	33%	150.000.000,00	22%
7506	Kota Gorontalo	2.622.624.000,00	1.488.090.626,38	57%	kurang	33%	17.057.557.414,38	22%
	Total	3.343.845.600,00	1.925.635.445,76	58%	kurang	33%	7.283.476.796	29%

Sumber :

- Kementerian Keuangan, Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2024
- Perda Provinsi Gorontalo 6 Tahun 2022, APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2023
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023
- Portal data SIKD DJPK Kementerian Keuangan

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-39
Instrumen Profil Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Aspek Pendanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (pendanaan pemerintah)

Kode BPS	Nama Kabupaten /Kota	PENDANAAN PERSAMPAHAN (dalam juta rupiah)							
		Pendanaan Pemerintah							
		APBD Kab/Kota untuk Persampahan (Rp.)	APBN (Rp.)	APBD Prov (Rp.)	Total APBD Kabupaten/Kota (Rp.)	Jumlah Pendanaan Pemerintah (Rp.)	Persentase Alokasi Pendanaan Persampahan dalam APBD Kab/Kota terhadap Total APBD Kab/Kota (%)	Kategori	Scoring Pendanaan APBD Kab/Kota
7501	Boalemo	9.044.600,00	15.500.000.000,00	0	812.340.000.000	827.849.044.601,00	0,0011%	kurang	33,00%
7502	Gorontalo	4.829.200.000,00	22.357.000.000,00	0	1.489.280.000.000	1.516.466.200.001,00	0,3185%	kurang	33,00%
7503	Pohuwato	130.000.000,00	6.700.000.000,00	0	974.960.000.000	981.790.000.001,00	0,0132%	kurang	33,00%
7504	Bone Bolango	0,00	11.088.000.000,00	0	986.190.000.000	997.278.000.001,00	0,0000%	kurang	33,00%
7505	Gorontalo Utara	95.840.600,00	5.100.000.000,00	0	743.750.000.000	748.945.840.601,00	0,0128%	kurang	33,00%
7506	Kota Gorontalo	21.210.994.484,00	14.850.000.000,00	0	1.124.800.000.000	1.160.860.994.485,00	1,8272%	kurang	33,00%
	Total	26.275.079.684,00	75.595.000.000,00	0,00	6.131.320.000.000,00	6.233.190.079.690,00	2,1728%	kurang	33,00%

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Lanjutan tabel 2.39

Kode BPS	Nama Kabupaten/Kota	PENDANAAN PERSAMPAHAN (dalam juta rupiah)						
		Pendanaan Non Pemerintah						
		Ziswaf	CSR	Mikro Kredit	Kerjasama dengan Swasta	Hibah Non Pemerintah	Jumlah Pendanaan Non Pemerintah	Scoring
7501	Boalemo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7502	Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7503	Pohuwato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7504	Bone Bolango	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7505	Gorontalo Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7506	Kota Gorontalo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lanjutan tabel 2.39

Kode BPS	Nama Kabupaten/Kota	Retribusi				Total Pendanaan Pemerintah dan Pendanaan Non Pemerintah Kabupaten/ Kota	Nilai Pendanaan
		Rencana Retribusi	Realisasi Retribusi	Efisiensi	Kategori		
7501	Boalemo	0,00	0,00	0%	kurang	827.849.044.601,00	21,33%
7502	Gorontalo	0,00	0,00	0%	kurang	1.516.466.200.001,00	11,43%
7503	Pohuwato	0,00	0,00	0%	kurang	981.790.000.001,00	0,00%
7504	Bone Bolango	0,00	0,00	0%	kurang	997.278.000.001,00	0,00%
7505	Gorontalo Utara	2.500.000,00	4.000.000,00	160%	baik	748.949.840.601,00	86,67%
7506	Kota Gorontalo	0,00	0,00	0%	kurang	1.160.860.994.485,00	21,23%
	Total	2.500.000,00	4.000.000,00	160%		6.233.194.079.690,00	73,76%

Sumber :

- Kementerian Keuangan, Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2024
- Perda Provinsi Gorontalo 6 Tahun 2022, APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2023
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023
- Portal data SIKD DJPK Kementerian Keuangan

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-40
Rekapitulasi Nilai Profil Pengelolaan Persampahan
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Lokasi	NILAI PERATURAN	NILAI KELEMBAGAAN	NILAI INFRASTRUKTUR						NILAI PERILAKU MASYARAKAT	NILAI PENDANAAN	NILAI PROFIL PERNGELOLAN PERSAMPAHAN
			NILAI TPA	NILAI TPST/PDU	NILAI BANK SAMPAH	NILAI TPS 3R	NILAI INFORMAL	NILAI ANGKUTAN			
Kabupaten Boalemo	66,67%	25,00%	13,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,83%	10,00%	4,40%	30,00%
Kabupaten Gorontalo	66,67%	12,50%	13,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,88%	10,00%	8,00%	32,53%
Kabupaten Pohuwato	66,67%	20,00%	13,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	16,81%	10,00%	4,40%	46,11%
Kabupaten Bone Bolango	66,67%	31,25%	13,33%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	7,05%	10,00%	4,40%	39,06%
Kabupaten Gorontalo Utara	100%	25,00%	13,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,15%	10,00%	4,40%	31,18%
Kota Gorontalo	66,67%	33,33%	40,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	67,83%	10,00%	4,40%	53,17%
Total	66,67%	24,51%	17,78%	5,56%	11,11%	16,67%	16,67%	19,59%	10,00%	5,00%	38,67%

Sumber : Rekapitulasi Hasil Perhitungan

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-41
Rekapitulasi Nilai Profil Pengelolaan Air Limbah Domestik
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Lokasi	score peraturan	score Kelembagaan	Nilai Infrastruktur Eksisting			Score infrastruktur eksisting	Score Perilaku Masyarakat	Score Pendanaan	Score Total Air Limbah
			score SPALD-T	Score SPALD-S	score angkutan				
Boalemo	10,00%	9,25%	2,67%	11,11%	5,33%	19,11%	10,00%	4,27%	52,63%
Gorontalo	10,00%	9,25%	2,67%	8,59%	5,33%	16,59%	10,00%	2,29%	48,13%
Pohuwato	10,00%	5,89%	2,67%	4,91%	0,00%	7,57%	10,00%	0,00%	33,47%
Bone Bolango	10,00%	6,96%	2,67%	5,03%	0,00%	7,70%	10,00%	0,00%	34,66%
Gorontalo Utara	10,00%	9,25%	2,67%	13,53%	5,33%	18,17%	10,00%	14,00%	61,42%
Kota Gorontalo	10,00%	7,13%	2,67%	9,73%	5,33%	17,73%	10,00%	4,25%	49,10%
Rata-rata	10,00%	7,96%	2,67%	8,82%	3,56%	14,48%	10,00%	4,13%	46,57%

Sumber : Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Note : Pendanaan retribusi terinput dalam sistem, sehingga nilainya >

2.3 Pengelolaan Sanitasi Oleh Pemerintah Provinsi

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, pasal 13 angka (3), urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi adalah :

- a) Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota
- b) Urusan pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah Kabupaten/kota
- c) Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota
- d) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi

Dalam Lampiran Undang-undang tersebut terdapat pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota, dimana pembagian urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dijelaskan sebagai berikut

Tabel 2-42

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/kota
1	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah Kabupaten/kota
2	Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik regional	Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/kota
3	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah Kabupaten/kota

Sumber : Undang-undang No. 23 Tahun 2014 (halaman 9 sheet 322)

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043, menjelaskan terkait kewenangan Provinsi yang selaras dengan Undang-undang No, 32 Tahun 2014, yaitu :

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-43
Kewenangan Provinsi Berdasarkan Tata Ruang

No.	Uraian	Lokasi
1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kota Gorontalo (lampiran-II PP No. 26 Tahun 2008, RTRWN), Pasal 8, angka (1), huruf a Perda No. 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo
2	PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional)	PKSN Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara
3	Persampahan	Pengelolaan limbah B3 Kawasan Talumelio Kabupaten Gorontalo (RTRW pasal 36 angka 4)
4	Persampahan	TPA Talumelito di Kabupaten Gorontalo (RTRW Pasal 36, angka 5 huruf a)
5	Persampahan	TPA Lonuo di Kabupaten Bonebolango (RTRW pasal 36 angka 5 huruf b)
6	KSN pertumbuhan ekonomi	KSN Kawasan Gorontalo-Paguyaman-Kwandang (RTRW, pasal 58 angka 2)
7	KSN kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	KSN Danau Limboto (RTRW, pasal 58 angka 3 huruf a)
8		KSNT Ekoregion Laut Sulu-Sulawesi (RTRW, pasal 58 angka 3 huruf b)
9	KSP kepentingan pertumbuhan ekonomi	- KSP Pariwisata Botumoito di Kabupaten Boalemo (pasal 60, angka 1, huruf a) - KSP Pariwisata Minanga di Kabupaten Gorontalo Utara (pasal 60, angka 1, huruf b) - KSP Pertanian Terpadu Paguyaman-Wonosari di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo (pasal 60, angka 1, huruf c) - KSP Pertanian Terpadu Randangan dan Sekitarnya di Kabupaten Pohuwato (pasal 60, angka 1, huruf d) - KSP Terintegrasi Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara (pasal 60, angka 1, huruf e) - KSP Industri Terpadu Tibawa-Pulubala di Kabupaten Gorontalo (pasal 60, angka 1, huruf f)
10	KSP kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	KSP Geopark Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo (pasal 61, angka 1)

Sumber : Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPUPR-PKP)
Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe, Wongkaditi, Kota Utara Kota Gorontalo

PEKERJAAN

PROFIL SANITASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024

JUDUL GAMBAR

WILAYAH PELAYANAN PENANGANAN ROADMAP SANITASI PROVINSI GORONTALO

KETERANGAN:

- WILAYAH PELAYANAN:**
- 01. Kota Gorontalo
 - 02. Kabupaten Limboto
 - 03. Kabupaten Gorontalo
 - 04. Kabupaten Puncu
 - 05. Kabupaten Bone
 - 06. Kabupaten Sigi
 - 07. Kabupaten Sigi
 - 08. Kabupaten Sigi
 - 09. Kabupaten Sigi
 - 10. Kabupaten Sigi
 - 11. Kabupaten Sigi
- PELAYANAN:**
- 01. PKN Kota Gorontalo
 - 02. KSN Danau Limboto
 - 03. KSN Kawasan Gorontalo-Paguyaman-Kwandang
 - 04. KSP Geopark Gorontalo
 - 05. KSP Pariwisata Botumoito
 - 06. KSP Pariwisata Minanga
 - 07. KSP Pertanian Terpadu Paguyaman-Wonosari
 - 08. KSP Pertanian Terpadu Randangan
 - 09. KSP terintegrasi Pelabuhan Anggrek
 - 10. KSP industri terpadu Tibawa-Pulubala
 - 11. KSN perbatasan Negara

SUMBER

PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024-2043

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kondisi eksisting pengelolaan sanitasi yang menjadi kewenangan provinsi, meliputi pengelolaan sanitasi lintas kabupaten/kota, Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan/atau Kawasan Strategis Provinsi (KSP), terdiri atas kondisi kelembagaan, ketersediaan peraturan, infrastruktur, kerjasama dan pendanaan untuk kurun waktu 5 tahun, diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-44
Kondisi Eksisting Pengelolaan Sanitasi Kewenangan Provinsi

No.	Uraian	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	Ketersediaan Peraturan	- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah - Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga - Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat - Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah (pasal 53, angka 1 huruf b)	- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo terkait Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Gorontalo (proses legalisasi) - Peraturan Gubernur Gorontalo No. 66 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 - Peraturan Gubernur Gorontalo No. 39 Tahun 2015 tentang road map sanitasi Tahun 2015-2019
2	Kondisi Kelembagaan	- Operator : UPTD TPA Regional Talumelito - Regulator : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Operator : Belum Ada operator IPAL regional di Provinsi Gorontalo - Regulator : Belum ada
3	Kondisi Infrastruktur	<u>Yang sudah beroperasi</u>	<u>Yang sudah beroperasi</u>

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Uraian	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Air Limbah Domestik
		- Kabupaten/Kota : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango - Lokasi TPA : Desa Talumelito Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo - Operator Layanan : UPTD TPA Regional Talumelito - Sistem Operasi : <i>controlled landfill</i> - Kapasitas : 21,05 hektar, 19.430 m³.	- Kabupaten/Kota : belum ada - Lokasi IPAL : belum ada - Operator Layanan : belum ada - Sistem Operasi : belum ada - Kapasitas : belum ada
		<u>Yang Direncanakan</u>	<u>Yang Direncanakan</u>
		- Lokasi : TPA Talumelito - FS : disusun tahun 2023 - DED : Tahun 2022 (Revitalisasi Kawasan TPA Talumelito) - AMDAL : belum disusun - LARAP : belum disusun	- Lokasi : belum ada - FSi IPAL : belum ada - DED : belum ada - AMDAL : belum ada - LARAP : belum ada
4	Kerjasama	- Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pembangunan fasilitas pengolahan limbah medis di Provinsi Gorontalo dengan insinerator kapasitas 200 kg/jam, hibah 1 unit truk hino dengan box pendingin. - Kerjasama JICA dengan Bappeda Provinsi Gorontalo dalam kolaborasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat desa yang berada di pesisir danau Limboto.	- Kerjasama city to city dengan Prefektur Ehime Jepang terkait manajemen lingkungan dan pengolahan limbah pabrik kelapa - Dinas Lingkungan Hidup dengan PT. Mondylia Amerta untuk mengembangkan sistem pemantauan air secara kontinu, otomatis dan online (<i>data real time</i>) di Danau Limbot
5	Pendanaan	Pendanaan APBD Provinsi sebesar Rp. 300.000.000 pada tahun 2022 untuk penyusunan DED Revitalisasi Kawasan TPA Talumelito	Pendanaan APBD Provinsi untuk air limbah domestik sebesar Rp. 3.507.683.992 dari Tahun 2019-2024

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP, Tahun 2024

2.3.1 Pengelolaan Persampahan

Kondisi eksisting pengelolaan persampahan oleh pemerintah Provinsi berdasarkan hasil input data eksisting pada form 2, sheet-1 tentang pengelolaan persampahan provinsi dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-45
Peraturan tentang Pengelolaan Persampahan

PERDA		PERKADA				
Pengelolaan	Retribusi	Jakstrada	Rencana Induk	RSP	STBM	Germas
ada	ada	ada	<i>Belum ada</i>	<i>proses</i>	<i>Belum ada</i>	ada

Sumber : survey instansional konsultan RSP, 2024

Tabel 2-46
Kelembagaan Persampahan Provinsi

Regulator	Operator
ada	ada

Sumber :DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

Tabel 2-47
Infrastruktur Persampahan Provinsi

TPA REGIONAL				
Yang Sudah Beroperasi				
Kabupaten/ Kota	Lokasi TPA	Operator Layanan	Sistem Operasi	Kapasitas
Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo	Desa Talumelito Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo	UPTD TPA Regional	Controlled landfill	19.430 m ³

Sumber :UPTD TPA Regional Talumelito, DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Lanjutan tabel 2.47

TPA REGIONAL					
Yang Direncanakan					
Kabupaten/ Kota	Nota Kesepakatan	Study Kelayakan	DED	AMDAL	LARAP
Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo	Belum ada	Tahun 2023	Tahun 2022	Belum ada	Belum ada

Sumber :UPTD TPA Regional Talumelito, DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

Lanjutan tabel 2.47

PENGELOLAAN SAMPAH PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL								
Yang Sudah Beroperasi				Yang direncanakan				
Kabupaten/ Kota	Lokasi	Jenis Infrastruktur Terbangun	Lembaga Pengelola	Lokasi	FS	DED	AMDAL	LARAP
Boalemo	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Gorontalo	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Pohuwato	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Bone Bolango	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Gorontalo Utara	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Kota Gorontalo	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada

Sumber : DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

Lanjutan tabel 2.47

PENGELOLAAN SAMPAH PADA DAERAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI								
Yang Sudah Beroperasi				Yang direncanakan				
Kabupaten/ Kota	Lokasi	Jenis Infrastruktur Terbangun	Lembaga Pengelola	Lokasi	FS	DED	AMDAL	LARAP
Boalemo	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Gorontalo	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Pohuwato	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

PENGELOLAAN SAMPAH PADA DAERAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI								
Yang Sudah Beroperasi				Yang direncanakan				
Bone Bolango	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Gorontalo Utara	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Kota Gorontalo	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada

Sumber :DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

Tabel 2-48
Pendanaan Persampahan Provinsi (Rp. X 10⁶)

Pendanaan APBD untuk Persampahan pada kurun waktu 5 tahun sebelumnya	TAHUN					TOTAL
	2023	2022	2021	2020	2019	
Penyusunan DED Revitalisasi Kawasan TPA Talumelito	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
JUMLAH/TOTAL	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

tahun n adalah tahun pada saat penyusunan RSP

Total APBD Provinsi	Total APBN (DAK dan Hibah)	TOTAL PENDANAAN NON PEMERINTAH					TOTAL
		ZISWAF	CSR	Mikro Kredit	Kerjasama dengan Swasta	Hibah non Pemerintah	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : RKA Bidang cipta karya jasa konstruksi, DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

2.3.2 Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kondisi eksisting pengelolaan air limbah domestik oleh pemerintah Provinsi berdasarkan hasil input data eksisting pada form 2, sheet-1 tentang pengelolaan air limbah provinsi dijelaskan pada tabel dibawah ini.

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-49

Peraturan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi

PERDA		PERKADA			
Pengelolaan	Retribusi	RISPALD	RSP	Stop BABS	Germas
ada	Belum ada	<i>proses</i>	<i>proses</i>	Belum ada	ada

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

Tabel 2-50

Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik Provinsi

KELEMBAGAAN	
Regulator	Operator
Belum ada	Belum ada

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

Tabel 2-51

Infrastruktur Air Limbah Domestik Provinsi

IPAL REGIONAL										
Yang Sudah Beroperasi					Yang Direncanakan					
Kabupaten/ Kota	Lokasi TPA	Operator Layanan	Sistem Operasi	Kapasitas	Kabupaten/ Kota	Nota Kesepakatan	Study Kelayakan	DED	AMDAL	LARAP
Boalemo	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Gorontalo	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	ada	Belum ada	Belum ada
Pohuwato	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Bone Bolango	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Gorontalo Utara	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Kota Gorontalo	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	ada	Belum ada	Belum ada

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Lanjutan Tabel 2.51

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DAERAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI								
Yang Sudah Beroperasi				Yang direncanakan				
Kabupaten/ Kota	Lokasi	Jenis Infrastruktur Terbangun	Lembaga Pengelola	Lokasi	FS	DED	AMDAL	LARAP
Boalemo	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Gorontalo	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Pohuwato	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Bone Bolango	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Gorontalo Utara	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Kota Gorontalo	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-52
Pendanaan Air Limbah Domestik Provinsi

Pendanaan APBD untuk Air Limbah Domestik pada kurun waktu 5 tahun sebelumnya	TAHUN (Rp)					TOTAL (Rp)
	2023	2022	2021	2020	2019	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengawasan Dan Evaluasi Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah				7.313.000,00	155.000.000,00	162.313.000,00
Koordinasi Fasilitas Kegiatan Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi				775.552.812,00	1.724.674.000,00	2.500.226.812,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		156.594.730,00				156.594.730,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		581.454.500,00				581.454.500,00
Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	5.001.500,00					5.001.500,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	02.093.450,00					102.093.450,00
JUMLAH/TOTAL	107.094.950,00	738.049.230,00	0	782.865.812,00	1.879.674.000,00	3.507.683.992,00

Sumber : DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Lanjutan tabel 2.52

Total APBD Provinsi	Total APBN (DAK dan Hibah)	TOTAL PENDANAANNON PEMERINTAH					TOTAL
		ZISWAF	CSR	Mikro Kredit	Kerjasama dengan Swasta	Hibah non Pemerintah	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : DPUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Tahun 2024

2.4 Permasalahan Pengelolaan Sanitasi

2.4.1 Pengelolaan Sanitasi oleh Pemerintah Kabupaten/kota

Identifikasi permasalahan pengelolaan sanitasi kabupaten/kota mengacu hasil score pada **Form.1, sheet 7 dan sheet 8**, yaitu bagi kabupaten/kota yang memiliki **Score Rendah, Sangat Rendah atau Sedang**.

Hasil perhitungan pada form tersebut dijelaskan pada tabel dibawah ini.

No.	Lokasi	NILAI INDEKS PROFIL SANITASI PROVINSI			
		Nilai Profil Pengelolaan Persampahan	Keterangan	Nilai Profil Pengelolaan Air Limbah	Keterangan
7501	Boalemo	30,00%	rendah	52,63%	sedang
7502	Gorontalo	32,53%	rendah	48,13%	rendah
7503	Pohuwato	46,11%	rendah	33,47%	rendah
7504	Bone Bolango	39,06%	rendah	34,66%	rendah
7505	Gorontalo Utara	31,18%	rendah	54,92%	sedang
7506	Kota Gorontalo	53,17%	sedang	53,10%	sedang
Provinsi		38,67%	rendah	46,15%	rendah

Sumber : Perhitungan konsultan RSP Tahun 2024 berdasarkan hasil survey

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-53
Permasalahan Regulasi Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Regulasi	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
1.	Boalemo	• Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah • Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah	• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat • Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah
2.	Gorontalo	• Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah • Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah	• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat • Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah
3.	Pohuwato	• Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah sudah berumur 8 tahun sehingga harus disusun Peraturan Daerah yang baru menyesuaikan dengan rencana program jangka menengah nasional Tahun 2025-2029 • Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah • Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah	• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat • Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah
4.	Bone Bolango	• Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah • Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan	• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat • Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Regulasi	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
		sampah	limbah
5.	Gorontalo Utara	• Belum lengkapnya peraturan daerah yang secara pokok mengatur institusi, ketentuan umum kebersihan serta retribusi sampah • Belum ada peraturan daerah terkait pelaksanaan sangsi terhadap pelanggar-pelanggar dalam pengelolaan sampah • Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah • Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah	• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat • Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah
6.	Kota Gorontalo	• Belum adanya peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah • Belum adanya peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam program pengurangan sampah	• Belum disusunnya peraturan terkait SPAL Domestik Terpusat dan SPAL Domestik Setempat • Belum ada regulasi khusus terkait jasa kompensasi air limbah

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

Tabel 2-54

Permasalahan Kelembagaan Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Kelembagaan	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
1.	Boalemo	• Institusi pengelola sampah masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan sampah (belum terpisah operator dan regulator)	• UPTD • Peningkatan SDM UPTD
2.	Gorontalo	• Institusi pengelola sampah masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait	• UPTD • Peningkatan SDM UPTD

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Kelembagaan	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
		pengelolaan sampah (belum terpisah operator dan regulator)	
3.	Pohuwato	Institusi pengelola sampah masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan sampah (belum terpisah operator dan regulator)	Institusi pengelola Air limbah domestik masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan air limbah (belum terpisah operator dan regulator)
4.	Bone Bolango	Institusi pengelola sampah masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan sampah (belum terpisah operator dan regulator)	Institusi pengelola Air limbah domestik masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan air limbah (belum terpisah operator dan regulator)
5.	Gorontalo Utara	- Institusi pengelola sampah masih berbentuk dinas yang memiliki kelemahan dalam pengelolaan anggaran operasi dan pemeliharaan - Kurang dapat mengembangkan SDM dalam pengelola berbentuk dinas karena terbentuk aturan kepegawaian	- UPTD - Peningkatan SDM UPTD
6.	Kota Gorontalo	Institusi pengelola sampah masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan sampah (belum terpisah operator dan regulator)	Institusi pengelola Air limbah domestik masih berbentuk seksi/bidang/dinas, belum mempunyai UPTD terkait pengelolaan air limbah (belum terpisah operator dan regulator)

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-55
Permasalahan Infrastruktur Sanitasi Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Infrastruktur	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
1.	Boalemo	• Daya tampung TPA Polohungo kurang mampu menampung sampah yang dihasilkan penduduk kabupaten Boalemo • Armada pengangkutan sampah kurang, sehingga sebagian wilayah layanan tidak terlayani optimal • Instalasi Pengolahan Lindi rusak dan tidak terawat • Belum menerapkan metode pengolahan sampah <i>sanitary landfill</i> • Dari 2 unit TPS 3 R, 2 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah tidak optimal • Belum mempunyai Bank Sampah Induk, bank sampah unit dan komposting skala RW • Belum mempunyai Pusat Daur Ulang (PDU) • Belum mempunyai sektor informal (lapak dan pengepul)	• IPLT Desa Polohungo Kecamatan Dulupi • Belum ada penjaga di lokasi IPLT • Sudah mulai ditumbuhi rumput liar • <i>Screen chamber</i> tidak terpasang • 5 m3 dengan 2 truk tinja • Operasional dan pemeliharaan tidak dilakukan sesuai SOP
2.	Gorontalo	• Dari 1 unit TPS 3 R, 1 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah tidak optimal • Belum mempunyai komposting skala RT RW dan rumah kompos • Belum mempunyai Pusat Daur Ulang (PDU) • Belum mempunyai sektor informal (lapak dan pengepul)	• IPLT Desa Pone Kecamatan Limboto Barat, mempunyai permasalahan seperti areal IPLT ditanami jagung, pipa outlet <i>settling thickening</i> terputus, sehingga kapasitas IPLT sebesar 12 m³/hari tidak dapat dipergunakan • Truk Tinja 2 buah dengan kapasitas 8 m³,

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Infrastruktur	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
3.	Pohuwato	• Daya tampung TPA Delo Indah kurang mampu menampung sampah yang dihasilkan penduduk kabupaten Pohuwato • Jalan operasional berupa jalan tanah • Kolam lindi tidak berfungsi dan rusak • Geomembran robek • Belum menerapkan metode pengolahan sampah <i>sanitary landfill</i> • Dari 8 unit TPS 3 R, 1 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah tidak optimal • Belum mempunyai komposting skala RT RW	• SPAL Domestik setempat dengan septiktank tidak dapat dikatakan aman karena tidak ada proses penyedotan tinja ke IPLT karena IPLT belum terbangun.
4.	Bone Bolango	• TPA Lonuo belum berfungsi karena belum adanya alat berat • Dari 3 unit TPS 3 R, 3 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah tidak optimal • Belum mempunyai Bank Sampah Induk, bank sampah unit dan komposting skala RW • Belum mempunyai Pusat Daur Ulang (PDU)	• SPAL Domestik setempat dengan septiktank tidak dapat dikatakan aman karena tidak ada proses penyedotan tinja ke IPLT karena IPLT belum terbangun.
5.	Gorontalo Utara	• Daya tampung TPA Molantadu Kecamatan Tomilito kurang mampu menampung sampah yang dihasilkan penduduk kabupaten Gorontalo Utara • Alat berat tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya • Saluran dan unit pengolahan lindi tidak berfungsi baik • Beberapa titik geomembran robek • Sel landfill terisi tanaman air	• Mobil tinja bantuan DAK Tahun 2019 tidak berfungsi optimal • IPLT Mootinelo Kecamatan Kwandang belum berfungsi maksimal • Scrren chamber tidak terpasang • Jalan akses belum ada pengerasan • Belum ada petugas di IPLT • Kapasitas 8 m³ dengan 3 truk

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Infrastruktur	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
		• TPA belum dilengkapi jembatan timbang, pagar keliling, sarana listrik dan air bersih • Armada pengangkutan sampah kurang, sehingga sebagian wilayah layanan tidak terlayani optimal • TPST Bukit Ru'ya belum berfungsi optimal terkait dengan pemilahan dan daur ulang sampah • Dari 3 unit TPS 3 R, 3 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah tidak optimal • Belum mempunyai Bank Sampah Induk, bank sampah unit dan komposting skala RW • Belum mempunyai Pusat Daur Ulang (PDU) • Belum mempunyai sektor informal (lapak dan pengepul)	tinja • Operasional dan pemeliharaan tidak dilakukan sesuai SOP
6.	Kota Gorontalo	• Dari 10 unit TPS 3 R, 6 unit tidak berfungsi sehingga proses pengurangan sampah berkurang • Belum mempunyai Pusat Daur Ulang (PDU)	• IPLT Kecamatan Kota Utara • Masih ada kegiatan lain di sekitar lokasi IPLT • Pembuangan langsung ke bak pengering lumpur • Kapasitas 10 m³ dengan 2 truk kapasitas 5000 L • Operasional dan pemeliharaan tidak dilakukan sesuai SOP

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 2-56
Permasalahan Perilaku Masyarakat Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Kelembagaan	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
1.	Boalemo	Implementasi program 3 R sangat rendah	Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL
2.	Gorontalo		Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL
3.	Pohuwato		Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL
4.	Bone Bolango		Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL
5.	Gorontalo Utara	Masyarakat belum seluruhnya menerapkan pola pengolahan 3 R di sumber sampah rumah tangga	Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL
6.	Kota Gorontalo		Partisipasi masyarakat rendah terhadap pemeliharaan IPAL

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

Tabel 2-57
Permasalahan Pendanaan Pengelolaan Sanitasi Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Kelembagaan	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
1.	Boalemo	- Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 0,086% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah - Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah - Realisasi Retribusi baru mencapai 11% dari target yang ditetapkan	Rendahnya biaya operasi dan pemeliharaan IPLT
2.	Gorontalo	Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 0,173% sehingga kurang	Rendahnya biaya operasi dan pemeliharaan IPLT

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Kelembagaan	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
		mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah • Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah • Realisasi Retribusi baru mencapai 76% dari target yang ditetapkan	
3.	Pohuwato	• Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 0,4% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah • Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah • Realisasi Retribusi baru mencapai 8% dari target yang ditetapkan	
4.	Bone Bolango	• Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 0,183% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah • Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah • Realisasi Retribusi baru mencapai 42% dari target yang ditetapkan	
5.	Gorontalo Utara	• Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 0,02% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah • Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah • Realisasi Retribusi baru mencapai 8% dari target yang ditetapkan	Rendahnya biaya operasi dan pemeliharaan IPLT

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Kabupaten/kota	Permasalahan Kelembagaan	
		Persampahan	Air Limbah Domestik
6.	Kota Gorontalo	- Bantuan dana pengelolaan persampahan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten hanya mencapai 57% sehingga kurang mencukupi biaya operasional pengelolaan sampah - Tidak ada dana bantuan dari sumber non pemerintah - Realisasi Retribusi baru mencapai 11% dari target yang ditetapkan	Rendahnya biaya operasi dan pemeliharaan IPLT

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

2.4.2 Pengelolaan Sanitasi oleh Pemerintah Provinsi

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, permasalahan pengelolaan sanitasi oleh Provinsi pada wilayah lintas kabupaten/kota, kawasan strategis provinsi dan daerah yang menjadi kewenangan provinsi, diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-58
Permasalahan Pengelolaan Persampahan Provinsi

No	Aspek	Permasalahan
1.	Peraturan	- Peraturan terkait pengelolaan sampah yang disusun pada Tahun 2013 sudah selayaknya diperbaharui dengan peraturan sejenis di tahun 2025. - Belum disusunnya peraturan kepala daerah terkait pengurangan sampah dan penanganan sampah pada wilayah kewenangan provinsi - Belum tersusunnya Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Provinsi Gorontalo - Belum lengkapnya norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga - Pemerintah provinsi belum menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dapat diakses masyarakat

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Permasalahan
		• Diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah tidak dilaksanakan secara kontinu • Belum disusunnya peraturan terkait penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
2.	Kelembagaan	• Kurangnya Pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah khususnya karyawan dan petugas pada UPTD TPA Regional Talumelito • Belum terjalinya penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait lembaga pengelola TPA regional Talumelito • Belum kontinunya peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; • Belum ada sistem informasi terintegrasi antara UPTD dengan Provinsi dan Pusat • Belum terdapat sinergi antara OPD pengelola sampah dengan kelurahan dan kecamatan serta masyarakat, serta belum dijalankannya insentif dan disinsentif secara terprogram dan konsisten
3.	Infrastruktur	• Belum terdapat kepastian dalam pengembangan landfill TPA Regional Talumelito terkait penuhnya sampah pada lahan penimbunan eksisting • Belum terdapat upaya pembatasan timbulan sampah dari kabupaten/kota yang menjadi wilayah layanan TPA Sampah Regional Talumelito • Belum menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya • Belum adanya produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin • Belum meratanya sarana pendauran ulang sampah • Belum seluruh masyarakat melakukan pemanfaatan kembali sampah • Kurangnya penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah • Kurangnya fasilitasi pemerintah daerah dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Permasalahan
		• Kurangnya fasilitas bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan sampah • Belum adanya penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • Belum adanya penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna • Belum seluruh desa/kelurahan memiliki unit pengelola sampah (bank sampah) dan terdapat unit pengelola sampah (bank sampah) yang tidak aktif melakukan pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce reuse, recycle) • Belum semua unit pengelola sampah mempunyai bentuk pemilahan sampah yang dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali;
4.	Perilaku Masyarakat	• Program sosialisasi dan edukasi dari pemerintah kepada masyarakat/pengelola sampah mandiri/jasa pengelola sampah/badan usaha/instansi pemerintah belum optimal dilaksanakan. • Pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pertama dalam hal pengurangan dan penanganan sampah belum diatur secara jelas, sifatnya hanya himbauan. Pembentukan kelompok swadaya masyarakat untuk kepengurusan bank sampah juga tidak dengan jelas diatur tugas dan fungsinya • Kurangnya pendekatan komprehensif yang melibatkan masyarakat, pemerintah baik ditingkat lokal, provinsi dan nasional maupun sektor swasta • Kurangnya penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi • Belum terdapat partisipasi dalam mengurangi sampah dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan daerah. Pihak swasta atau pihak lainnya diharapkan mengikuti ketentuan dalam pengelolaan sampah yang ditimbulkannya. • Minimnya pembinaan berkelanjutan dari pemerintah kepada masyarakat akan pentingnya pembentukan bank sampah di setiap desa/kelurahan • Belum tersosialisasinya kegiatan pemilahan menjadi tanggungjawab dari setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum,

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Permasalahan
		fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya serta pemerintah kabupaten/kota
5.	Pendanaan	• Prosentase pendanaan untuk pengelolaan persampahan masih berkisar antara 0,1%-2% dari APBD Provinsi, sehingga menyulitkan operasional pengelolaan sampah • Kurangnya langkah-langkah penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga • Belum adanya penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

Tabel 2-59

Permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi

No	Aspek	Permasalahan
1.	Peraturan	• Belum ada peraturan daerah terkait air limbah domestik, yang ada tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Pengelola IPAL Regional belum ada di Provinsi Gorontalo, akan tetapi naskah akademik terkait pengelolaan SPAL di Provinsi Gorontalo dapat dipersiapkan.
2.	Kelembagaan	• Pemerintah Daerah yang menjadi garda terdepan pengelolaan air limbah (sanitasi) masih belum dilengkapi dengan kebijakan dan pengaturan soal organisasi dan tata kerja institusi atau lembaga yang bertugas mengelola prasarana dan sarana yang ada. • Perangkat pengaturan masih jauh dari operasional sehingga pengelolaan, terutama pemeliharaan, prasarana dan sarana menjadi terbatas.
3.	Infrastruktur	• Belum adanya IPAL Regional yang melayani wilayah perkotaan di Provinsi Gorontalo, hal ini dapat difahami dengan kondisi kepadatan penduduk yang < 15.000 jiwa/km². • Data-data yang reliable dan valid atas prasarana dan sarana air limbah sangat terbatas sehingga sulit untuk melakukan identifikasi kebutuhan peningkatan pelayanan • Perhatian yang terbatas kepada air limbah juga ditandai dengan keterbatasan pilihan teknologi alternatif sehingga aplikasinya pada masalah dan lingkungan yang beragam, misalnya untuk jenis buangan padat dan cair, dari kawasan industri maupun rumah tangga, menjadi jauh dari optimal

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Permasalahan
4.	Perilaku Masyarakat	• akses masyarakat pada fasilitas sanitasi yang layak cukup tinggi, sayangnya tingkat aksesibilitas ini tidak memperhitungkan kepemilikan atau tingkat penggunaan jamban itu sendiri. • Sanitasi juga masih menjadi masalah pelik, terutama di daerah perdesaan, karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Hal ini menyebabkan banyaknya jamban yang tidak digunakan sebagaimana mestinya karena ketidaktahuan masyarakat. Sayangnya LSM yang bergerak di bidang sanitasi masih sangat sedikit. • Keterlibatan dan komitmen pemangku-kepentingan (stakeholder) termasuk pemerintah, para wakil rakyat, dunia usaha, dan warga masih jauh dari kemampuan untuk bersama-sama berembuk dan bertindak sesuai kesepakatan peran dan kewajiban untuk mengelola air limbah
5.	Pendanaan	• Minimnya kepedulian pemerintah dan wakil rakyat akan persoalan sanitasi tercermin dari alokasi anggaran yang sangat sedikit untuk pembangunan fasilitas sanitasi dasar. Padahal, bahaya kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas air baku karena kurangnya perhatian pada masalah sanitasi dapat menyebabkan upaya perbaikan yang 10 kali lebih mahal daripada biaya pencegahannya

Sumber : Hasil Survey Konsultan RSP Tahun 2024

2.5 Visi dan Misi Pembangunan Sanitasi

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi agenda global 2030 untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kualitas hidup yang lebih baik, sebagaimana tertuang pada tujuan 6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation- Ensure access to water and sanitation for all*), dalam rangka menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Upaya taktis pemerintah dalam upaya mencapai target tersebut di atas melalui kelembagaan program pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan kualitas hidup dan kesejahteraan yang semakin baik akan berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat sebagai aset bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam RPJMN 2020 – 2024 telah dituangkan melalui pilar ke-4 yaitu Kesejahteraan yang terus meningkat. Terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN, yang salah satu agendanya adalah Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan tujuan pembangunan Milenium (SDGs) dan target pencapaian RPJMN dapat dilihat dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007 – 2025 yaitu "Gorontalo Maju dan Mandiri".

Selaras dengan visi Provinsi Gorontalo, penyusunan visi dan misi pembangunan sanitasi provinsi dapat dikembangkan dari dokumen perencanaan daerah dan nasional (RPJMD Provinsi, Jakstranas persampahan dan air limbah domestik atau RPJMN), sebagai berikut:

a) Visi Sanitasi Provinsi Gorontalo

Visi

"Terwujudnya Sanitasi Layak, Aman dan Berkelanjutan di Provinsi Gorontalo "

b) Misi Sanitasi Provinsi Gorontalo

Pengelolaan Sampah

- 1). Mewujudkan perubahan perilaku yang hygiene dan saniter dengan gerakan BASNOL (gerakan Buang Air Besar Sembarangan Nol), dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi aman yang merupakan bagian dari sanitasi layak dengan pendekatan STBM yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan
- 2). Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah dengan sistem setempat (*on-site*) dan sistem terpusat (*off-site*)
- 3). Mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh air limbah permukiman
- 4). Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha agar lebih berperan aktif dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman
- 5). Menyiapkan peraturan perundangan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman
- 6). Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan pengelolaan air limbah permukiman dengan prinsip *good corporate governance*
- 7). Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman

Pengelolaan Air Limbah

- 1). Meningkatkan perubahan perilaku terutama persepsi dan tanggungjawab masyarakat terhadap pengelolaan sampah
- 2). Mengurangi timbunan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan dengan mengedepankan tanggungjawab individu.

- 3). Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan
- 4). Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran aktif dunia usaha/swasta
- 5). Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam sistem pengelolaan persampahan sesuai dengan prinsip *good and corporate governance*, yang berupa:
 - a) Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan persampahan
 - b) Penyelenggaraan pengelolaan persampahan yang transparan, partisipatif, serta akuntabel dalam pengelolaannya
 - c) Pelibatan semua stakeholder dalam pengelolaan persampahan
 - d) Pengelolaan persampahan secara efektif, efisien dan profesional
 - e) Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan pengelola persampahan
 - f) Peningkatan jumlah sampah pada Bank Sampah induk dan Bank Sampah Unit
 - g) Mewujudkan pengelolaan sampah organik langsung dari sumbernya
- 6). Memobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan sistem pengelolaan persampahan:
 - a) Peningkatan prioritas dan alokasi pendanaan bagi penyelenggaraan pelayanan persampahan
 - b) Pengembangan potensi pendanaan untuk pengelolaan persampahan, baik melalui anggaran kabupaten/kota, provinsi, pusat dana luar negeri, termasuk kerjasama dengan dunia usaha/swasta

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

- c) Pengembangan dan perkuatan bagi kota-kota yang belum mampu menyediakan pelayanan minimal
 - d) Membentuk wadah promosi dan publikasi produk daur ulang melalui galeri produk daur ulang sampah
 - e) Merencanakan rumah pintar belajar sampah (*trash Play House*), yaitu gerakan produktif pengelolaan sampah terintegrasi di kawasan strategis destinasi wisata
 - f) Mengembangkan solusi dan peningkatan nilai tambah pengelolaan sampah yang terintegrasi melalui 4R (Reduce, Reuse, Recycle, dan Replace) secara produktif dan inovatif serta berdampak ekonomis bagi masyarakat;
 - g) Diversifikasi bisnis TPS3R untuk menghasilkan pendapatan serta nilai tambah dalam pengelolaan sampah bagi Komunitas, Masyarakat dan Desa;
- 7). Menegakkan hukum dan melengkapi peraturan perundangan:
- a) Penegakan hukum dan pemberlakuan sanksi bagi pelanggaran penyelenggaraan persampahan sebagai upaya pembinaan bagi masyarakat, aparat dan stakeholder terkait
 - b) Melengkapi/meningkatkan produk hukum yang diperlukan bagi penyelenggaraan pengelolaan persampahan, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota

IPLT Kabupaten Gorontalo Utara



GPS Map Camera



Kecamatan Kwandang, Gorontalo, Indonesia

QVVJ+7XQ, Mootinelo, Kec. Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara,
Gorontalo 96252, Indonesia

Lat 0.793086°

Long 122.882513°



bab-3

ISU STRATEGIS, TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan-6 SDGs, juga dalam Sasaran-6.2, yang mengamanatkan kepastian tersedianya layanan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua penduduk pada tahun 2030 mengisyaratkan perlunya pemerintah memiliki sebuah peta jalan yang jelas. Meskipun target akses aman telah dicantumkan dalam RPJMN 2019-2024, pemerintah memandang masih perlu memiliki sebuah peta jalan sanitasi aman 2030 yang memiliki target realistis dan menunjukkan adanya upaya percepatan.

Peta jalan Sanitasi Aman 2030 merupakan bagian dari upaya pemenuhan agenda SDGs tersebut. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi rujukan para pengambil keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan dan pemangku kepentingan dalam menyusun langkah-langkah strategis mencapai Sasaran 6.2

Dalam satu dekade terakhir, akses masyarakat terhadap layanan sanitasi, khususnya layanan yang layak dan aman, secara nasional meningkat pesat, dari 55,5% di tahun 2010 menjadi 80,92% di tahun 2022 — sebuah kemajuan besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Di tahun 2017, pemerintah menerapkan perubahan perhitungan dan tambahan indikator akses sanitasi dengan mengadopsi SDGs yang diluncurkan di tahun 2015, yakni akses aman.

Kini ada enam indikator untuk menggambarkan akses sanitasi, yaitu: *akses aman*, *akses layak sendiri*, *akses layak bersama*, *akses belum layak*, *BABS tertutup*, dan *BABS di tempat terbuka*. Sebelum 2017, data akses aman tidak tersedia karena indikatornya belum ditetapkan.

Berdasarkan hasil survey, dapat diidentifikasi isu, tujuan dan sasaran sanitasi di Provinsi Gorontalo sebagai berikut.



Gambar 3.1 .

Perumusan Awal Isu Strategis Pemenuhan Akses Sanitasi

3.1 Isu Strategis Pengelolaan Sanitasi

Keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah adalah Isu Strtegis, dimana isu strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Isu strategis sanitasi dalam pengelolaan air limbah domestik di Provinsi Gorontalo dijelaskan pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Isu Strategis Pengelolaan Sanitasi

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
Pengelolaan Air limbah Domestik	Aspek Standar dan Regulasi (Peraturan)	1 Inisiatif pembentukan Perda Air Limbah Domestik di 6 (enam) kabupaten/kota
		2 Inisiatif kelengkapan pengaturan kepala daerah/kebijakan lainnya yang mengatur teknis operasional SPALD-S dan SPALD-T di 6 Kab/kota sesuai amanat Perda
		3 Komitmen tinjau ulang dan/atau pembentukan perda retribusi sedot tinja berdasarkan kesesuaian dan pengaturan terkini
		4 Kesiapan kabupaten/kota dalam menyediakan dokumen perencanaan teknis yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai rujukan rencana perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik
		5 Belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan air limbah permukiman
		6 masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan-peraturan yang terkait dengan pencemaran air limbah
		7 belum lengkapnya Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan air limbah

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
		8 pengawasan dan penerapan aturan terhadap oknum yang melakukan pencemaran lingkungan
	Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola	1 lemahnya fungsi kelembagaan di daerah dalam melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman
		2 Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah permukiman
		3 kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman masih belum terampil
		4 Perlu ditingkatkannya koordinasi antar instansi terkait dalam penetapan kebijakan di bidang air limbah permukiman
		5 Tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar pembangunan ekologi, sosial dan lingkungan hidup
		6 Tuntutan penerapan <i>good governance</i> melalui demokratisasi yang menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan
		8 Tuntutan Rencana Aksi Nasional dalam menghadapi perubahan iklim
	Aspek Infrastruktur dan Teknologi	1 Akses masyarakat terhadap prasarana sanitasi dasar di perkotaan dan pedesaan
		2 Tingkat pelayanan pengelolaan air limbah permukiman di perkotaan melalui sistem setempat (<i>on site</i>) yang aman dan melalui sistem terpusat (<i>off site</i>)
		3 Sebagian besar fasilitas pengolahan air limbah setempat masih belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan
		4 Masih adanya masyarakat buang air besar sembarangan

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
		5 Sub sistem pengolahan setempat yang belum memenuhi kriteria teknis
		6 Sub sistem pengangkutan belum memadai dibandingkan dengan volume air limbah dan lumpur tinja
		7 Kapasitas dan teknologi dalam Sub sistem pengolahan lumpur tinja kurang sesuai dengan karakteristik air limbah yang dihasilkan
		8 Terbatasnya lahan untuk sub sistem pengolahan setempat skala komunal (2-10 rumah tinggal)
		9 Belum adanya peraturan penyedotan lumpur tinja swasta
		10 terdapat infrastruktur sanitasi yang sudah terbangun, tetapi terkendala operasionalisasinya
		11 Tidak adanya Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2), karena sementara masih mempergunakan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3)
		12 Kualitas air limbah yang dianalisis masih diatas baku mutu untuk parameter total coliform, COD dan BOD (untuk IPLT Dulomo Kota Gorontalo) serta untuk IPAL Komunal di Komplek Gah 42
		13 Tidak ada pengukuran kualitas efluen
		14 Kurangnya media untuk upaya komunikasi tentang air limbah kepada masyarakat
		15 Pengelolaan air limbah domestik menggunakan SPALD Terpusat belum sesuai dengan kondisi wilayah dan keadaan penduduk terkait topografi wilayah dan retribusi IPAL Komunal berbasis masyarakat

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
	Aspek Partisipasi Masyarakat	1 Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah permukiman
		2 terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang berbasis masyarakat
		3 potensi yang ada dalam masyarakat dan dunia usaha belum sepenuhnya diberdayakan oleh pemerintah
		4 Belum adanya komunitas sosial untuk menggerakkan masyarakat agar peduli lingkungan
		5 Praktek pengurusan lumpur tinja sangat rendah setiap tahun
	Aspek Pendanaan	1 rendahnya tarif pelayanan air limbah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya biaya operasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah
		2 terbatasnya sumber pendanaan pemerintah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tingginya biaya investasi awal pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat
		3 kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah, dan belum optimalnya pengalihan potensi pendanaan dari masyarakat dan dunia usaha/swasta/koperasi
		4 rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah untuk pengelolaan dan pengembangan air limbah permukiman
		5 rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan air limbah permukiman baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
		6 Belum optimalnya penggalan sumber dana untuk investasi dan biaya operasi pemeliharaan terutama dari pihak swasta yang harus sinergis dengan penerapan pemulihan biaya (cost recovery) secara bertahap merupakan tantangan yang harus segera diketahui solusinya secara "win-win solution"
		7 pembagian porsi antara dana APBN dan APBD yang akan dialokasikan dalam pengembangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah belum terlihat secara tegas
		8 Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tingginya biaya investasi awal pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat (% APBD murni untuk sanitasi sebesar < 1%)
		9 Rendahnya skala prioritas penanganan air limbah permukiman baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah

Sumber : Analisis Konsultan, 2024



ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 3.2
Isu Strategis Sanitasi dalam Pengelolaan Persampahan

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
Pengelolaan Persampahan	Aspek Standar dan Regulasi (Peraturan)	1 Masih lemahnya penegakan hukum sebagai upaya preventif dalam pengendalian lingkungan hidup
		Pengoperasian TPA dengan <i>sanitary Landfil</i> belum berjalan
		Pengelola kawasan pada umumnya belum menyediakan fasilitas pemilahan sampah (pasal 45 Undang-undang 18 Tahun 2008)
		Pelaporan pengelolaan sampah kepada Kementerian/Lembaga (pasal 41 Permendagri No. 33 Tahun 2010)
		2 Penerapan sangsi hukum bagi pelanggar belum menjadi prioritas
		Kebijakan berupa peraturan perundang-undangan terakut belum terinformasikan secara sistematis
		Belum disusunnya peraturan terkait sangsi hukum pelanggar sampah
		3 Belum ada peraturan terkait pengurangan sampah dan penanganan sampah
		4 Meningkatnya komitmen tinjau ulang dan/atau pembentukan perda retribusi pengangkutan sampah berdasarkan kesesuaian dan pengaturan terkini
		5 Meningkatnya kesiapan Kabupaten/Kota dalam menyediakan dokumen perencanaan teknis yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sebagai rujukan rencana perangkat daerah yang membidangi persampahan

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
		6 Peraturan yang secara khusus mengatur tentang tatacara pelaksanaan pemberian kompensasi, insentif, disinsentif untuk pengelolaan sampah
		7 Belum ada peraturan yang mengatur tentang pengalokasian anggaran untuk pengelolaan sampah
		8 Pemasaran produk daur ulang dan kompos dari sampah belum diatur dalam peraturan daerah
		9 Peraturan terkait industri dan pelaku daur ulang sampah
	Aspek Kelembagaan dan Tata Kelola	1 Sarana prasarana TPA belum lengkap, sehingga kelembagaan daerah tidak bersedia menerima infrastruktur yang dibangun
		2 Peranan lembaga/institusi pengelola sampah sebagaimana yang ada sekarang ini di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, masih menyatu antara peran operator dan regulator yaitu SKPD Dinas.
		3 Keterpaduan antara kementerian/lembaga dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah belum diterapkan sesuai amanat Undang-undang (dalam masalah sampah dan produk kemasan, dalam masalah penutupan dan/atau rehabilitasi TPA)
	Aspek Infrastruktur dan Teknologi	1 Belum diterapkannya pengurangan sampah dari sumber (produsen) yaitu dengan menerapkan EPR (<i>extended producer responsibility</i>)/kewajiban produsen
		Upaya masyarakat dalam daur ulang sampah masih terhambat dalam pemasaran hasil produk
		Sampah belum dipilah sesuai jenis sampah
		Sistem pewadahan masih tercampur

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
		Jumlah dan kualitas wadah sampah terbatas
		2 Pengumpulan
		Pengumpulan sampah organik belum dilakukan setiap hari
		Pengumpulan sampah dengan sarana prasarana pengumpul yang belum tersekat dan terpilah
		Masih sulitnya pengadaan lokasi lahan untuk TPS 3R
		Masyarakat cenderung resisten terhadap pembangunan TPS3R
		Alat pengumpul sampah masih menggunakan gerobak dorong
		Kuantitas dan kualitas TPS3R masih rendah
		Belum ditetapkan lokasi, jumlah dan luasan TPS dalam Rencana Detail Tata Ruang
		3 Pengangkutan
		Pengangkutan sampah organik belum dilakukan setiap hari
		Jadual pengangkutan sampah yang belum berkoordinasi dengan jadual pengumpulan oleh gerobak/gerobak motor sehingga menyebabkan antrian gerobak/gerobak motor di titik angkut sampah
		Kuantitas dan kualitas kendaraan pengangkut sampah belum mampu mengangkut volume sampah yang dihasilkan
		4 Pengolahan
		Keterbatasan lahan untuk TPST dan/atau <i>intermediate treatment facility (ITF)</i>

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
		Belum ada implementasi pengolahan sampah dengan teknologi tinggi di Provinsi Gorontalo sebagai <i>best practice</i>
		5 kapasitas pengelolaan sampah sangat terbatas, mengingat TPA sampah regional Talumelito sudah hampir habis kapasitasnya
		6. Pemrosesan Akhir
		Belum dilakukan penutupan TPA dengan <i>cover soil</i> secara rutin setiap hari sesuai amanat Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013
		Pelaksanaan UKL/UPL di TPA yang kurang disiplin menyebabkan pencemaran lingkungan ataupun resistensi masyarakat
		Sulit menyediakan lahan TPS sesuai kebutuhan
		Keterbatasan jenis dan jumlah alat berat di TPA
		Pengolahan air lindi di TPA masih belum memenuhi syarat teknis untuk dibuang ke badan air
		Pengolahan gas di TPA belum optimal yang menyebabkan terlepasnya gas metana ke udara bebas, yang berpotensi menjadi penyumbang terbesar efek gas rumah kaca (GRK) yang tidak sejalan dengan <i>clean development mechanism</i> (CDM). Hal ini tentunya tidak sejalan dengan amanat peraturan menteri No. 01 Tahun 2014 yang menyebutkan sistem pengoperasian TPA, pengolahan lindi dan penanganan gas.
		7 cakupan layanan pengelolaan sampah UPTD TPA Regional Talumelito hanya sampai kepada

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
		TPS/TPS3R/TST dan kawasan permukiman belum melakukan pengelolaan sampah sendiri
		8 Pengelola kawasan pada umumnya belum menyediakan fasilitas pemilahan sampah
		9 Sarana prasarana pendukung Tempat Pemrosesan Sampah kurang memadai
		10 Tidak adanya alat berat di TPA Kabupaten Bone Bolango
	Aspek Partisipasi Masyarakat	1 Perilaku yang tidak sesuai dengan pengelolaan sampah yang benar
		Kebiasaan belum memilah sampah dan/atau belum mewedahi sesuai jenis sampah (pasal 12 ayat 1 Undang-undang 18 Tahun 2008)
		Kedisiplinan masyarakat atau warga membuang sampah sesuai aturan yang berlaku
		Kebiasaan lain yang ada di masyarakat tetapi tidak sejalan dengan Undang-undang seperti 'membakar sampah"
		2 Kedisiplinan dalam pengelolaan sampah (keberlanjutan program pengelolaan sampah)
		3 Pengetahuan masyarakat tentang sampah belum sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sampah yang benar
		Perilaku membuang sampah belum terpilah maupun membakar sampah
		Kegiatan membakar sampah dipandang masyarakat sebagai hal yang biasa dan aman
		Pengetahuan warga tentang 3 R
		4 Kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi pengelolaan sampah masih rendah
	Aspek Pendanaan	Belum ditetapkannya standar biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan,

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Komponen Sanitasi	Aspek	Isu Strategis
		pengolahan dan pengolahan akhir dalam Rp.ton
		Rendahnya alokasi anggaran pengelolaan sampah, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota
		Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran pengelolaan sampah
		Belum dimanfaatkannya dana desa yang diamanatkan oleh Perpres No. 60 Tahun 2014
		1 Perbandingan jumlah pendapatan biaya jasa pelayanan terhadap anggaran biaya operasional pengelolaan sampah relatif kecil
		2 Penggunaan anggaran Dinas masih belum optimal, mengingat pengelolaan sampah di Provinsi Gorontalo sampai saat ini belum memenuhi standar operasional sistem <i>sanitary landfill</i>
		3 Tarif retribusi belum memperhitungkan biaya mulai dari sumber sampah sampai ke TPA
		4 Kerjasama Badan Usaha dalam pengelolaan sampah masih kurang
		5 Belum terkelolanya sumber-sumber pendanaan lain dari Badan Usaha seperti csr

Sumber : Analisis Konsultan, 2024

3.2 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Sanitasi

Target akses aman Sanitasi Tahun 2030 diharapkan dapat dicapai melalui beberapa tujuan dan sasaran, yaitu:

HIGHLIGHT INTERVENSI UMUM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

- Pemenuhan akses sanitasi yang aman, berkelanjutan dan berketahanan iklim
- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular
- Pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman, seperti sanitasi aman dan pengelolaan persampahan



Gambar 3.2 .
Skenario Target Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Dalam roadmap sanitasi provinsi Gorontalo, skenario-2 tidak akan diperhitungkan. Hal ini karena dalam RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, hanya dicantumkan prosentase cakupan sanitasi layak untuk pengelolaan air limbah sebesar 70% pada Tahun 2024, 72% pada Tahun 2025 dan 74% pada Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam tabel 6.3 program pembangunan daerah yang disertai pendanaan (halaman 299), akses aman dan lainnya tidak dicantumkan.

Untuk akses pengelolaan persampahan, diuraikan tentang volume sampah yang dikelola TPA Regional Talumelito pada Tahun 2024 – Tahun 2026 (25.000 ton/tahun), tidak ada prosentase rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah.

Jika sampah yang dihasilkan penduduk di Provinsi Gorontalo adalah 801,52 ton/hari, maka 25.000 ton/tahun setara dengan 68,49315 ton/hari atau 8,545% Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Tabel 3.3
Sebaran Target Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029
Berdasarkan Data RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2026

No.	Target	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
A.	Akses Sanitasi (air limbah domestik)					
1.	Layak	72,00%	74,00%	83,01%	85,01%	87,01%
2.	Aman	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	SPAL Setempat D	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4.	SPALD Terpusat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5.	SPALD Terpusat perkotaan dan permukiman berbasis institusi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Target	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
6.	SPALD Terpusat permukiman berbasis masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.	BABs	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
B.	Akses Sanitasi (Pengelolaan Persampahan)					
1	Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah	8,545%	8,545%	8,545%	8,545%	8,545%
2	Sampah residu tersisa di LUR (Lahan Urug Residu)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	sampah terdaur ulang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2026

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, akses sanitasi Provinsi Gorontalo dihitung berdasarkan baseline awal perhitungan Tahun 2024 yang didasarkan kepada hasil rapat koordinasi terkait target cakupan layanan persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah, persentase KK Babs di tempat terbuka dan prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman Tahun 2025-2029 pada Tanggal 3 Juli 2024, dengan target akses sanitasi akhir roadmap dihitung berdasarkan kenaikan persentase akses Tahun 2024-2025 yang disepakati masing-masing Kabupaten/kota, sebagai berikut.

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 3.4
Target Akses Sanitasi Provinsi Gorontalo
Tahun 2025-2029

No.	Komponen	Baseline	Target Akses-Tahun				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
A.	Pengelolaan air limbah domestik						
1.	Layak	90,63%	92,50%	94,38%	96,25%	98,13%	100,00%
2	Aman	2,05%	4,88%	8,27%	11,22%	14,16%	17,27%
2.a	SPALD Setempat	1,41%	4,03%	6,87%	9,31%	11,75%	14,33%
2.b	SPALD Terpusat	0,35%	0,83%	1,41%	1,91%	2,41%	3,04%
2.b.1	<i>SPALD Terpusat perkotaan dan permukiman berbasis institusi</i>	0,28%	0,66%	1,13%	1,53%	1,93%	2,43%
2.b.2	<i>SPALD Terpusat permukiman berbasis masyarakat</i>	0,06%	0,13%	0,23%	0,31%	0,39%	0,49%
3	% KK BABs	9,32%	7,23%	5,52%	4,31%	3,11%	1,90%
3.a	% Desa Stop BABs (SBS)	43,00%	45,00%	47,00%	49,00%	51,00%	53,00%
3.b	% Desa STBM	1,23%	3,23%	5,23%	7,23%	9,23%	11,23%
B.	Pengelolaan persampahan						
5	Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah	35,15%	41,24%	46,67%	52,11%	57,54%	62,98%
5.a	Sampah residu tersisa di LUR (Lahan Urug Residu)	21,09%	23,83%	26,57%	29,31%	32,05%	34,79%
5.b	Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	14,06%	18,08%	21,44%	24,80%	28,16%	31,52%
5.b.1	sampah terdaur ulang	4,54%	6,30%	7,92%	9,54%	11,17%	12,79%

Sumber : Berita Acara Kesepakatan Target PKP, Air Minum dan Sanitasi Aman, 3 Juli 2024

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dan sasaran Pengelolaan sanitasi Provinsi Gorontalo diuraikan sebagai berikut.

LAPORAN PENDAHULUAN

Pemutakhiran Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo
Tahun 2024

Tabel 3.5
Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Persampahan
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 (Berdasarkan Capaian Eksisting)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatkan jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah	Tercapainya target rumah tangga yang mendapat pelayanan penuh persampahan	Persentase Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah	%	41,24%	46,67%	52,11%	57,54%	62,98%
2	Meningkatkan residu tersisa dalam Lahan Urug Residu	Tercapainya sisa sampah yang dibuang ke TPA	Persentase Sampah residu tersisa di LUR (Lahan Urug Residu)	%	23,83%	26,57%	29,31%	32,05%	34,79%
3	Meningkatkan volume sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	Tercapainya target penanganan sampah oleh masyarakat	Persentase Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	18,08%	21,44%	24,80%	28,16%	31,52%
4	Meningkatkan sampah yang terdaur ulang pada fasilitas daur ulang	Tercapainya target pengurangan sampah oleh masyarakat	Persentase sampah terdaur ulang	%	6,30%	7,92%	9,54%	11,17%	12,79%

Sumber : Hasil Perhitungan Berdasarkan Eksisting Pengelolaan

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 3.6
 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik
 Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 (Berdasarkan Capaian Eksisting)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Menyediakan infrastruktur layanan air limbah domestik di Provinsi sesuai kewenangan	Tercapainya akses sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi Layak	92,50%	94,38%	96,25%	98,13%	100,00%
2.	Menyediakan infrastruktur layanan air limbah domestik di Provinsi sesuai kewenangan	Tercapainya akses sanitasi aman	Persentase Rumah Tangga menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman	4,88%	8,27%	11,22%	14,16%	17,27%
3.	Meningkatkan sarana dan prasarana akses rumah tangga terhadap pengelolaan air limbah dengan SPALD Setempat	Tercapainya 25% sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber	Persentase rumah tangga yang menggunakan SPAL D Setempat	4,03%	6,87%	9,31%	11,75%	14,33%

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

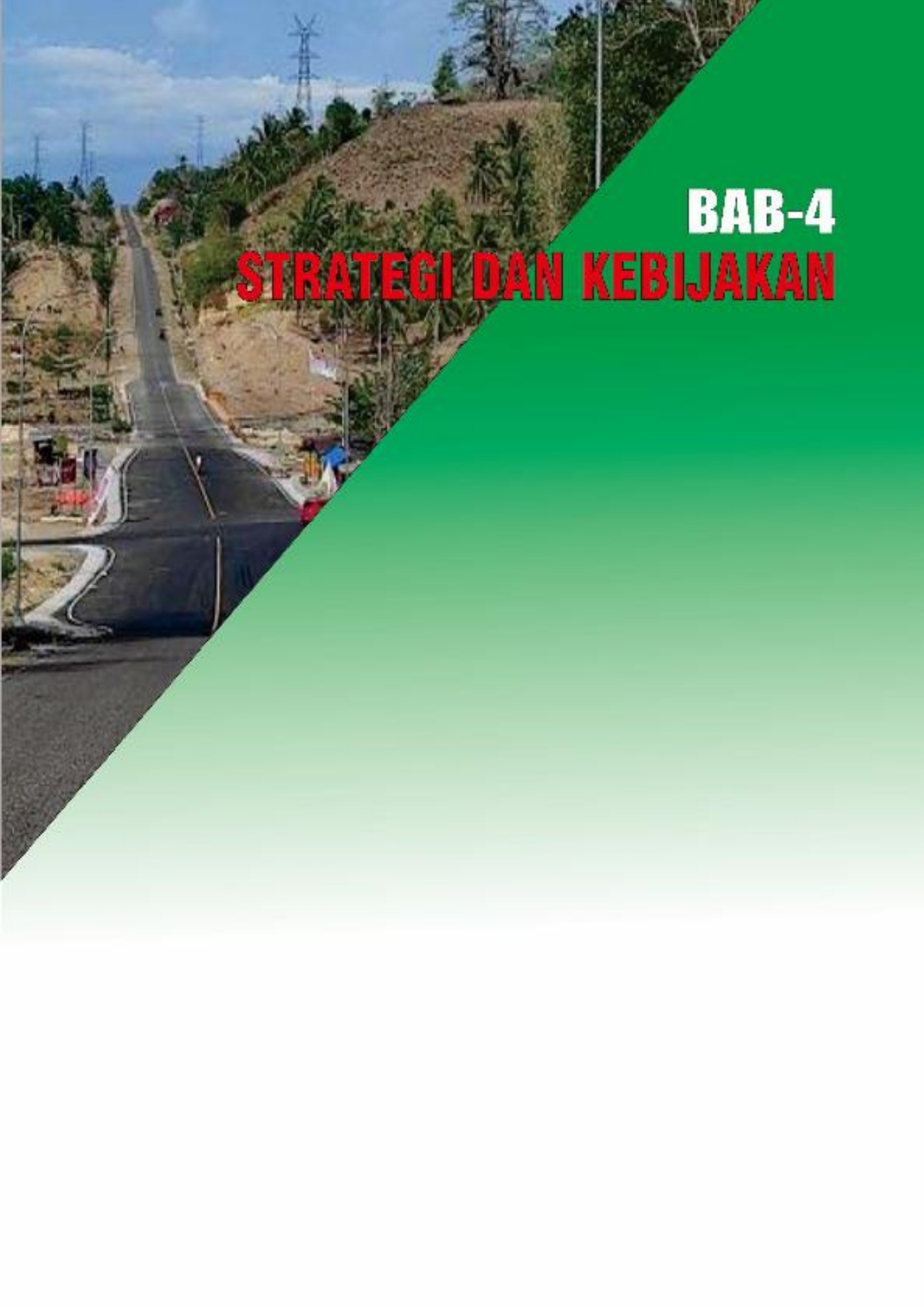
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
4.	Meningkatkan sarana dan prasarana akses rumah tangga terhadap pengelolaan air limbah dengan SPALD Terpusat	Tercapainya sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumbernya secara kolektif ke sub-sistem pengolahan untuk diolah sebelum dibuang ke lingkungan.	Persentase rumah tangga yang menggunakan SPALD Terpusat	0,35%	0,83%	1,41%	1,91%	2,41%
5.	Meningkatkan sarana dan prasarana akses rumah tangga terhadap pengelolaan air limbah dengan SPALD Terpusat di wilayah-wilayah kewenangan provinsi (200-5.000 SR)	Tercapainya 4% rumah tangga yang menggunakan SPAL D Terpusat berbasis institusi	Persentase rumah tangga yang menggunakan SPALD Terpusat perkotaan dan permukiman berbasis institusi	0,28%	0,66%	1,13%	1,53%	1,93%
6.	Meningkatkan sarana dan prasarana akses rumah tangga terhadap pengelolaan air limbah dengan SPALD Terpusat di wilayah-wilayah	Tercapainya 1% rumah tangga yang menggunakan SPAL D Terpusat berbasis masyarakat	Persentase rumah tangga yang menggunakan SPALD Terpusat	0,06%	0,13%	0,23%	0,31%	0,39%

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
	kewenangan provinsi (50-200 SR)		permukiman berbasis masyarakat					
7.	Meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam BABS	Tercapainya target 0% BABS	BABs	9,32%	7,23%	5,52%	4,31%	3,11%
8.	Meningkatkan kondisi individu dalam komunitas tidak Buang Air Besar Sembarang	Tercapainya target 50% Desa Stop BABS	% Desa Stop BABs (SBS)	45,00%	47,00%	49,00%	51,00%	53,00%
9.	Meningkatkan stop BABS, CTPT, pengolahan air minum yang aman, pengolahan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah cair rumah tangga	Tercapainya target 10% Desa STBM	% Desa STBM	3,23%	5,23%	7,23%	9,23%	11,23%

Sumber : Hasil Perhitungan Berdasarkan Eksisting Pengelolaan



BAB-4

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Strategi Pengelolaan Sanitasi

4.1.1 Strategi Pengelolaan Persampahan

Menjelang RPJMN Tahun 2025-2029 disahkan, pada Tahun 2023 Bappenas mengeluarkan rencana teknokratik peta jalan sanitasi aman (menuju akses aman dan layanan berkelanjutan) dan target pengelolaan sampah yang tercantum dalam uraian target kinerja pengelolaan sampah draft RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu : 85 % rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah, 47% sampah residu tersisa dalam Lahan Urug Saniter, 38% sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah dan 20% sampah terdaur ulang atau sebagaimana Permendagri No. 87 Tahun 2022 tentang percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di daerah Tahun 2024, yaitu : 80 % penanganan sampah dan 20% pengurangan sampah.

Strategi dalam roadmap sanitasi provinsi Gorontalo untuk Pengelolaan Persampahan ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Penyusunan Strategi Sanitasi Sistem Pengelolaan Persampahan
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
1	ASPEK PERATURAN DAN KEBIJAKAN	<u>Tujuan:</u> Meningkatkan kelengkapan peraturan tentang persampahan di Kabupaten/Kota <u>Sasaran:</u> Terbentuknya peraturan daerah dan turunannya tentang pengelolaan sampah di provinsi dan kabupaten/kota	<u>Strategi-1</u> Penyusunan regulasi di daerah mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
			<u>Strategi-2</u> Penyediaan mekanisme insentif bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur Sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan
			<u>Strategi-3</u> Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan Sanitasi oleh masyarakat/konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan sampah dengan menetapkan tarif jasa/retribusi layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berdasarkan klasifikasi pelanggan rumah tangga dan/atau pelanggan non-rumah tangga lainnya, serta melakukan tinjau ulang terkait penerapan tarif jasa/retribusi layanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
			<u>Strategi-4</u> melengkapi dan merevisi peraturan terkait perundang-undangan di tingkat provinsi dan daerah terkait pengelolaan sampah, penanganan sampah dan pengurangan sampah
			<u>Strategi-5</u> Menerapkan dan menegakkan peraturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
2	ASPEK KELEMBAGAAN dan TATA KELOLA	<u>Tujuan:</u> Meningkatkan kapasitas kelembagaan layanan persampahan di provinsi dan kabupaten/kota <u>Sasaran:</u> • Terbentuknya lembaga pengelola layanan persampahan di provinsi dan kabupaten/kota	<u>Strategi-1</u> Pengembangan sistem pengelolaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
			<u>Strategi-2</u> Pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan persampahan
			<u>Strategi-3</u> Penguatan peran dan kapasitas UPTD air limbah domestik regional sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan air limbah domestik
			<u>Strategi-4</u> Membentuk badan koordinasi pengelolaan sampah tingkat Provinsi dan peningkatan kerjasama antar OPD selain Pokja Sanitasi
			<u>Strategi-5</u> Menata fungsi Dinas/instansi pengelola sampah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kondisi daerah
			<u>Strategi-6</u> Peningkatan komitmen Kepala Daerah dalam pengelolaan persampahan

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
3	ASPEK PENDANAAN YANG BERKELANJUTAN	<u>Tujuan:</u> Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang persampahan <u>Sasaran:</u> Tercapainya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang persampahan	<u>Strategi-1</u> Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat
			<u>Strategi-2</u> Pengembangan sanitasi melalui sistem pembiayaan yang inovatif dengan membentuk sistem pembiayaan untuk pengembangan layanan sanitasi
			<u>Strategi-3</u> Fasilitasi pemerintah Provinsi untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain yang konsen terhadap pengelolaan persampahan
			<u>Strategi-4</u> Menciptakan wirausaha sanitasi di daerah yang memiliki potensi
			<u>Strategi-5</u> Fasilitasi wirausaha sanitasi agar mampu menciptakan produk yang sesuai dengan standar
			<u>Strategi-6</u> Menerapkan dan mengembangkan skema investasi, dana operasional dan pemeliharaan dalam pengurangan sampah

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
			<u>Strategi-7</u> Melaksanakan <i>extended producer responsibility</i>
			<u>Strategi-8</u> Melaksanakan CSR
			<u>Strategi-9</u> Pengaturan kembali <i>tipping fee</i>
			<u>Strategi-10</u> Pengembangan Kerjasama dan Pola Pendanaan
4	ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT	<u>Tujuan:</u> Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengurangan sampah <u>Sasaran:</u> Tercapainya target pengurangan sampah oleh masyarakat	<u>Strategi-1</u> Pelaksanaan program perubahan perilaku terhadap pola kumpul angkut buang
			<u>Strategi-2</u> Penguatan program pemilahan sampah dalam skala rumah tangga
			<u>Strategi-3</u> Penguatan program minimisasi dan daur ulang sampah
			<u>Strategi-4</u> Penguatan kampanye pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
5	ASPEK INFRASTRUKTUR DAN	<u>Tujuan:</u> Menyediakan	<u>Strategi-1</u> Bimbingan teknis pembangunan

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
	TEKNOLOGI	infrastruktur layanan persampahan di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan <u>Sasaran:</u> Tercapainya rumah tangga yang memiliki akses persampahan yang layak	infrastruktur sanitasi
			<u>Strategi-2</u> Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi
			<u>Strategi-3</u> Pengembangan konsep <i>resource recovery</i> dan <i>circular economy</i>
			<u>Strategi-4</u> Penyusunan panduan di tingkat provinsi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
			<u>Strategi-5</u> Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi melalui kerjasama dengan universitas
			<u>Strategi-6</u> Pembangunan infrastruktur Sanitasi
			<u>Strategi-7</u> Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap atau <i>incremental approach</i>
			<u>Strategi-8</u> Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
			informasi, yaitu <i>national water and sanitation information services</i> /layanan informasi air minum dan sanitasi nasional
			<u>Strategi-9</u> Menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
			<u>Strategi-10</u> Meningkatkan pengurangan sampah pada tahapan implementasi
			<u>Strategi-11</u> melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
			<u>Strategi-12</u> Melaksanakan pilot proyek dalam pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan/pewadahan sampai pemrosesan akhir
			<u>Strategi-13</u> Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan kabupaten/kota
			<u>Strategi-14</u> meningkatkan cakupan pelayanan secara sederhana dan berkeadilan
			<u>Strategi-15</u> Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi

Sumber : Hasil Analisis Konsultan RSP, 2024

4.1.2 Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Dalam upaya memenuhi komitmen global SDGs Indonesia dihadapkan dengan banyak tantangan, tidak terkecuali sektor sanitasi. Banyak kemajuan yang telah tercatat tetapi pergerakannya masih dirasa lamban. Mencapai target akses aman 2030 tidaklah mudah karena harus mempertimbangkan banyak faktor dan sumber daya yang ada dalam satu dekade terakhir, pemahaman dan komitmen pemerintah dan masyarakat telah meningkat secara signifikan.

Namun fakta lapangan menunjukkan bahwa pemerintah, khususnya pemerintah daerah, masih harus meningkatkan kapasitas untuk membangun ekosistem yang mendukung (seperti kerangka regulasi, kelembagaan, pendanaan, aspek teknis, dan partisipasi masyarakat) agar penyediaan akses dan layanan sanitasi di daerah dapat dipercepat. Tidak meratanya kapasitas sumber daya manusia di berbagai tingkatan pemerintahan dan kabupaten/ kota menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, laju pembangunan juga terhambat oleh kesenjangan pendanaan, masih terbatasnya penerapan inovasi skala luas, dan faktor-faktor sosial-politik

Target akses aman sebesar 30% pada tahun 2030 merupakan tantangan besar karena ini berarti harus menutup kesenjangan infrastruktur, memastikan pemanfaatan dari infrastruktur terbangun, menyediakan layanan serta memenuhi kebutuhan pendanaan, termasuk membangun ekosistem pendukung yang dapat mengkonsolidasi sumber daya potensial. Tantangan tersebut tergambar dalam besarnya kesenjangan akses dan layanan, terutama di tingkat rumah tangga, kesenjangan kapasitas infrastruktur, dan kesenjangan pendanaan.

Untuk itu, kita perlu memperkirakan kebutuhan dana secara nasional hingga tahun 2030 berdasarkan agregasi kebutuhan kabupaten/ kota (tergambarkan dalam proporsi sistem sanitasi dan target akses aman di daerah).

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Perhitungan kebutuhan pendanaan sanitasi untuk mencapai target 30% akses aman 2030 dapat dilakukan dengan data tentang proporsi penduduk yang menggunakan SPALD-T (Skala Perkotaan, Permukiman Berbasis Institusi, dan Permukiman Berbasis Masyarakat) dan SPALD-S, ketersediaan tangki septik di tingkat rumah tangga, dan biaya nonfisik.

Secara keseluruhan, proporsi akses aman 2030 adalah: SPALD-S sebesar 25% dan SPALD-T sebesar 5% yang terdiri dari 4% SPALD-T Perkotaan dan Permukiman berbasis institusi, serta 1% SPALD-T Permukiman Berbasis Masyarakat.

Strategi dalam roadmap sanitasi provinsi Gorontalo untuk Pengelolaan Persampahan ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Penyusunan Strategi Pengelolaan Air Limbah
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
1	ASPEK PERATURAN DAN KEBIJAKAN	<u>Tujuan:</u> Meningkatkan kelengkapan peraturan tentang air limbah domestik di Kabupaten/ Kota <u>Sasaran:</u> Terbentuknya peraturan daerah dan turunannya tentang pengelolaan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota	<u>Strategi-1</u> Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
			<u>Strategi-2</u> Menyebarkan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
			limbah permukiman;
			<u>Strategi-3</u> Menerapkan peraturan perundangan terkait air limbah domestik
			<u>Strategi-4</u> Memperkuat substansi dan penerapan peraturan peundang-undangan sebagai payung hukum penyelenggaraan SPAL Domestik di Provinsi dan Implementasi Sumber Daya Manusia Sanitasi
			<u>Strategi-5</u> Menerapkan dan menegakkan peraturan tentang pengelolaan air limbah
			<u>Strategi-6</u> Menyusun aturan yang mengikat pengembang perumahan sebagai partisipasi kepedulian terhadap sanitasi
2	ASPEK KELEMBAGAAN dan TATA KELOLA	<u>Tujuan:</u> Meningkatkan kapasitas kelembagaan layanan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota <u>Sasaran:</u> Terbentuknya lembaga pengelola layanan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota	<u>Strategi-1</u> Meningkatkan tata kelola dan kualitas penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan yang mendorong partisipasi dan kolaborasi di daerah
			<u>Strategi-2</u> Memfasilitasi pembentukan dan

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
			perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat;
			<u>Strategi-3</u> Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah;
			<u>Strategi-4</u> Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;
			<u>Strategi-5</u> Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.
			<u>Strategi-6</u> Peningkatan komitmen Kepala Daerah dalam pengelolaan air limbah
			<u>Strategi-7</u> Membentuk dan mengoptimalkan lembaga operator dan regulator
3.	ASPEK PENDANAAN YANG BERKELANJUTAN	<u>Tujuan:</u> Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pendanaan bidang air limbah domestik <u>Sasaran:</u> Tercapainya kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat	<u>Strategi-1</u> Meningkatkan alokasi pendanaan APBN/APBD Provinsi dan mengkonsolidasi potensi pembiayaan dan program prioritas pembangunan lain untuk pembangunan pengelolaan air limbah

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
		dalam pendanaan bidang air limbah domestik	
			<u>Strategi-2</u> Mengembangkan dan memobilisasi sumber pembiayaan dari masyarakat dan swasta untuk pembangunan infrastruktur serta penyediaan akses dan layanan pengelolaan air limbah
			<u>Strategi-3</u> Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman;
			<u>Strategi-4</u> Pembiayaan Bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama.
			<u>Strategi-5</u> Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.
			<u>Strategi-6</u> Menyiapkan penganggaran guna pembangunan /pengadaan sarana dan prasarana air limbah dari berbagai pihak
4.	ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT	<u>Tujuan:</u> Meningkatkan perubahan perilaku masyarakat dalam BABS	<u>Strategi-1</u> Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPAL Domestik

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
		<u>Sasaran:</u> Tercapainya target 0% BABS	dan peningkatan akses sanitasi aman
			<u>Strategi-2</u> Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;
			<u>Strategi-3</u> Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat di Permukiman dengan SPAL D Terpusat berbasis institusi dan SPALD Terpusat berbasis masyarakat
			<u>Strategi-4</u> Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
			<u>Strategi-5</u> Menciptakan ekosistem berbasis inovasi melibatkan sektor swasta dan pelaku bisnis untuk memperkuat pasar terkait penyediaan layanan sanitasi aman di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota
			<u>Strategi-6</u> Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
			sistem komunal;
			<u>Strategi-7</u> Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat di Kawasan perkotaan
			<u>Strategi-8</u> Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
			<u>Strategi-9</u> Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.
			<u>Strategi-10</u> Lebih sering melakukan komunikasi dan mengadakan program/kegiatan yang melibatkan swasta dan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di lingkungan permukiman
			<u>Strategi-11</u> Penyiapan tim yang rutin melakukan pemecuan dan promosi kesehatan
5.	ASPEK INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	<u>Tujuan:</u> Menyediakan infrastruktur layanan air limbah domestik di provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan	<u>Strategi-1</u> Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
		<u>Sasaran:</u> Tercapainya akses layak dan aman air limbah domestik	
			<u>Strategi-2</u> Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi
			<u>Strategi-3</u> Pengembangan konsep <i>resource recovery</i> dan <i>circular economy</i>
			<u>Strategi-4</u> Penyusunan panduan di tingkat provinsi mengenai pengelolaan air limbah
			<u>Strategi-5</u> Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi melalui kerjasama dengan universitas
			<u>Strategi-6</u> Pembangunan infrastruktur Sanitasi
			<u>Strategi-7</u> Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap atau <i>incremental approach</i>
			<u>Strategi-8</u> Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi, yaitu <i>national water and sanitation information services</i> /layanan informasi air minum dan sanitasi nasional
			<u>Strategi-9</u>

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Tujuan dan Sasaran	Strategi
			Menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kawasan Strategis Provinsi
			<u>Strategi-10</u> melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan air limbah
			<u>Strategi-11</u> Melaksanakan pilot proyek dalam pengelolaan air limbah dari sub sistem pengumpulan sampai pengolahan
			<u>Strategi-12</u> Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan kabupaten/kota
			<u>Strategi-13</u> meningkatkan cakupan pelayanan secara sederhana dan berkeadilan
			<u>Strategi-14</u> Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi
			<u>Strategi-15</u> Menyelenggarakan perencanaan di bidang air limbah secara menyeluruh dan terintegrasi

Sumber : Hasil Analisis Konsultan RSP, 2024

4.2 Kebijakan

Pemerintah Provinsi perlu mengembangkan kebijakan dan strategi untuk percepatan pencapaian akses aman dan penyelenggaraan SPALD yang dapat menjadi pedoman pelaku pembangunan dan dapat diterapkan di setiap kabupaten/kota.

Kebijakan tersebut harus mampu mendorong percepatan pencapaian target sanitasi aman tahun 2030 dengan mempertimbangkan potensi dan kapasitas sumber daya yang ada.

Kebijakan ini diharapkan mampu mengkonsolidasikan berbagai program dan potensi sumber daya pembangunan sanitasi: pemerintah, masyarakat, swasta, dan mitra pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah perlu mengupayakan koordinasi yang kuat dan kerjasama antar lembaga, khususnya di antara Badan/dinas lembaga di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.

Persoalan yang dihadapi sektor ini kompleks dan kesenjangannya pun besar. Tantangan yang harus diselesaikan di kurun waktu 2025-2029 adalah penyusunan strategi yang dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi sumber daya dalam proses pembangunan.

Strategi pun harus mampu (i) menjawab kebutuhan lingkungan pendukung, (ii) memegang prinsip-prinsip penyelenggaraan SPALD yang baik, (iii) mengatasi tantangan, baik yang berada dalam kewenangan pemerintah (internal) maupun yang berada di luar pemerintah (eksternal), (iv) mempertimbangkan faktor kesenjangan yang telah dibahas sebelumnya.

Kebijakan ini juga harus mempertimbangkan seluruh potensi sumber daya, dari pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan masyarakat (dunia usaha, rumah tangga, kelompok masyarakat, ini harus merepresentasikan kebutuhan seluruh pelaku pembangunan dan mencakup keseluruhan aspek:

- regulasi,
- kelembagaan,
- pendanaan,
- partisipasi masyarakat,
- aspek teknis,
- serta pemantauan dan evaluasi.

4.2.1 Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Kebijakan pengelolaan persampahan merupakan kebijakan untuk menjalankan strategi sebagaimana telah ditetapkan pada sub bab 4.1.1, dimana kebijakan pengelolaan persampahan harus memenuhi unsur multi aspek, yaitu: peraturan, kelembagaan, infrastruktur, perilaku masyarakat, dan pendanaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan persampahan;

Kebijakan pengelolaan persampahan dalam roadmap sanitasi Provinsi Gorontalo akan disesuaikan dengan kondisi eksisting, sehingga uraian kebijakan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.3
Kebijakan Sistem Pengelolaan Persampahan
Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Strategi	Kebijakan
1.	ASPEK PERATURAN DAN KEBIJAKAN	<u>Strategi-1</u> Penyusunan regulasi tingkat provinsi dan kabupaten mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Peningkatan komitmen Kepala Daerah terhadap peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan sampah
		<u>Strategi-2</u> Penyediaan mekanisme insentif bagi Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur Sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan	Peraturan terkait alokasi anggaran untuk pengelolaan persampahan minimal 5% dari APBD Provinsi
		<u>Strategi-3</u> Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan Sanitasi	Perbaharuan jasa pelayanan kebersihan dan persampahan yang sesuai dengan penggolongan jenis dan fungsi bangunan

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Strategi	Kebijakan
		oleh masyarakat/konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan sampah dengan menetapkan tarif jasa/retribusi layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berdasarkan klasifikasi pelanggan rumah tangga dan/atau pelanggan non-rumah tangga lainnya, serta melakukan tinjau ulang terkait penerapan tarif jasa/retribusi layanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	
		<u>Strategi-4</u> melengkapi dan merevisi peraturan terkait perundang-undangan di tingkat provinsi dan daerah terkait penanganan sampah dan pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	Penyusunan Peraturan terkait pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
		<u>Strategi-5</u> Menerapkan dan menegakkan peraturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	Penyusunan peraturan terkait sangsi/hukuman dan penghargaan/apresiasi/hadiah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga
2	ASPEK KELEMBAGAAN dan TATA KELOLA	<u>Strategi-1</u> Pengembangan sistem pengelolaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola terkait pengelolaan persampahan
		<u>Strategi-2</u> Pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan	Revisi dan penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terkait regulator

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Strategi	Kebijakan
		persampahan	dan operator pengelolaan persampahan di tingkat provinsi
		<u>Strategi-3</u> Penguatan peran dan kapasitas UPTD TPA Regional sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan persampahan	Training dan pelatihan untuk seluruh staf pengelola UPTD TPA Regional Talumelito
		<u>Strategi-4</u> Membentuk badan koordinasi pengelolaan sampah tingkat Provinsi dan peningkatan kerjasama antar OPD selain Pokja Sanitasi	Penyelarasan SOTK Dinas Provinsi terkait tugas dan wewenang dalam pengelolaan persampahan
		<u>Strategi-5</u> Menata fungsi Dinas/instansi pengelola sampah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kondisi daerah	Koordinasi tugas dan fungsi dinas/instansi sesuai kewenangan
3	ASPEK PENDANAAN YANG BERKELANJUTAN	<u>Strategi-1</u> Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat	Pengembangan kerjasama dan pola pendanaan para pihak yang terkait dalam pengelolaan persampahan
		<u>Strategi-2</u> Pengembangan sanitasi melalui sistem pembiayaan yang inovatif	Pembayaran secara umum seperti Pemerintah menetapkan biaya tertentu untuk sampah residu per rumah atau perluasan rumah. Sistem Fee/pembayaran diterapkan dengan maksud tujuan spesifik (contoh: biaya pembayaran integrasi untuk kulkas atau lampu).
		<u>Strategi-3</u> Fasilitasi pemerintah Provinsi untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain yang konsen terhadap pengelolaan persampahan	Penjajagan pilot proyek fasilitas pengolahan sampah yang modern dengan emisi asap yang minimal
		<u>Strategi-4</u>	Uji coba Teknologi pengolahan

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Strategi	Kebijakan
		Menciptakan wirausaha sanitasi di daerah yang memiliki potensi	sampah menjadi bahan bakar
		<u>Strategi-5</u> Fasilitasi wirausaha sanitasi agar mampu menciptakan produk yang sesuai dengan standar	Pembangunan bank sampah dan <i>upcycling</i> yang dapat mengubah sampah menjadi produk baru dengan nilai jual yang lebih tinggi
		<u>Strategi-6</u> Menerapkan dan mengembangkan skema investasi, dana operasional dan pemeliharaan dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	Kolaborasi metode pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan produsen produk
		<u>Strategi-7</u> Melaksanakan <i>extended producer responsibility</i>	Kebijakan untuk membuat produsen membantu memikul biaya untuk mengumpulkan, memindahkan, mendaur ulang, dan membuang produk di penghujung siklus hidup masa pakainya.
		<u>Strategi-8</u> Melaksanakan CSR	Kerjasama dengan Badan Usaha untuk inovasi skema pembiayaan pengelolaan sampah yang lebih adil, antara lain melalui Pembayaran berbasis volume (pembayaran sesuai dengan jumlah sampah yang dibuang). Hal ini lebih tepat dan adil karena membuat masyarakat berusaha mengurangi produksi sampah atau mengelola sampah sendiri
		<u>Strategi-9</u> Pengaturan kembali <i>tipping fee</i>	Penyusunan standarisasi pembiayaan seluruh kegiatan teknis pengelolaan sampah (mulai dari pengumpulan, pengangkutan, sampai pemrosesan akhir/pengolahan dengan teknologi) dan kegiatan

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Strategi	Kebijakan
			non teknis pengelolaan sampah (SDM, kantor administrasi, operasional/maintenance, biaya penyusutan). Standarisasi pembiayaan pengelolaan berupa range data proposional yang disesuaikan dengan kriteria seluruh kota/kabupaten dan teknologi pengolahan yang digunakan.
		<u>Strategi-10</u> Pengembangan Kerjasama dan Pola Pendanaan	Sistem deposit diperuntukkan untuk jenis sampah tertentu khususnya sampah kemasan (contoh: botol kaca, botol plastik) dimana konsumen perlu membayar lebih untuk kemasan ini saat pembelian, kemudian mengambil depositnya kembali saat membawa kembali kemasan kosong ke tempat pembelian. Tujuannya untuk mengurangi sampah yang dibuang sembarangan dan mempromosikan <i>reusable packaging/refillable</i> .
4	ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT	<u>Strategi-1</u> Pelaksanaan program perubahan perilaku terhadap pola kumpul angkut buang	Peningkatan partisipasi dan perubahan perilaku masyarakat terkait penanganan dan pengurangan sampah
		<u>Strategi-2</u> Penguatan program pemilahan sampah dalam skala rumah tangga	Model bauran pembiayaan dirancang untuk meningkatkan sistem persampahan dengan membuka jalan bagi modal komersial untuk berkontribusi dalam sistem ini.
		<u>Strategi-3</u> Penguatan program minimisasi dan daur ulang sampah rumah tangga dan sejenis sampah	Model berbasis utilitas ini mengandalkan tanggung jawab pemerintah Provinsi untuk menerapkan retribusi layanan pengumpulan sampah rumah

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Strategi	Kebijakan
		rumah tangga	tangga dan bisnis secara profesional (idealnya didukung dengan kebijakan nasional) sebagai sumber pendapatan untuk membayar biaya layanan.
		<u>Strategi-4</u> Penguatan kampanye pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	Fasilitasi sarana dan prasarana kampanye tingkat kabupaten/kota dalam program pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
5	ASPEK INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	<u>Strategi-1</u> Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi	Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
		<u>Strategi-2</u> Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi	Pemetaan lokasi-lokasi rencana TPS 3R, TPST, pusat daur ulang dan Bank Sampah dalam produk tata ruang
		<u>Strategi-3</u> Pengembangan konsep <i>resource recovery</i> dan <i>circular economy</i>	Implementasi pengurangan penggunaan sumber daya, perpanjangan daya guna produk dan material serta peningkatan daur ulang dan pemanfaatan kembali sisa produksi dan konsumsi (<i>creation, maintaining and recover</i>)
		<u>Strategi-4</u> Penyusunan panduan di tingkat provinsi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	Implementasi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga di wilayah kewenangan Provinsi
		<u>Strategi-5</u> Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi melalui kerjasama dengan universitas	Kerjasama dalam Fasilitas Pemulihan Material/ <i>Material Recovery Facility</i> (MRF) dan Fasilitas Pengolahan Perantara/ <i>Intermediate treatment Facility</i> (ITF)
		<u>Strategi-6</u> Pembangunan infrastruktur	Monitoring dan evaluasi infrastruktur sanitasi di wilayah kewenangan provinsi

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Strategi	Kebijakan
		Sanitasi	
		<u>Strategi-7</u> Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap atau <i>incremental approach</i>	Meningkatkan praktik efisiensi sumber daya, menerapkan model bisnis berkelanjutan, mengurangi dan mengelola sampah produksi, mengembangkan inovasi produk ramah lingkungan, dan memperluas praktik daur ulang dalam rantai pasok bisnis
		<u>Strategi-8</u> Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi untuk pengelolaan sampah	Melakukan riset dan pengembangan teknologi baru dengan sistem informasi dalam pengelolaan sampah
		<u>Strategi-9</u> Menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	Menyediakan pendanaan dan/atau pembiayaan yang memperhatikan aspek <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG).
		<u>Strategi-10</u> Meningkatkan pengurangan sampah pada tahapan implementasi	Kampanye dan publikasi informasi serta sebagai sarana untuk mengumpulkan <i>feedback</i> dari pemangku kepentingan lainnya.
		<u>Strategi-11</u> melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	Advokasi kebijakan, edukasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat, serta bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong regulasi yang mendukung praktik ekonomi sirkular
		<u>Strategi-12</u> Melaksanakan pilot proyek dalam pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan/pewadahan sampai pemrosesan akhir	Meningkatkan praktik efisiensi sumber daya, menerapkan model bisnis berkelanjutan, mengurangi dan mengelola sampah produksi, mengembangkan inovasi produk ramah lingkungan, dan memperluas praktik daur ulang

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Strategi	Kebijakan
			dalam rantai pasok bisnis.
		<u>Strategi-13</u> Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan kabupaten/kota	Inventarisasi sarana dan prasarana yang telah terbangun di wilayah kewenangan provinsi serta masing-masing kabupaten/kota
		<u>Strategi-14</u> meningkatkan cakupan pelayanan secara sederhana dan berkeadilan	Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah skala rumah tangga
		<u>Strategi-15</u> Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi	Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah skala perkotaan

Sumber : Hasil Analisis Konsultan RSP, Tahun 2024



Gambar 4.1
Hirarki dalam pengelolaan sampah (KLHK Republik Indonesia)

4.2.2 Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kebijakan pengelolaan air limbah domestik merupakan kebijakan untuk menjalankan strategi sebagaimana telah ditetapkan pada sub bab 4.1.1, dimana kebijakan pengelolaan air limbah domestik harus memenuhi unsur multi aspek, yaitu: peraturan, kelembagaan, infrastruktur, perilaku masyarakat, dan pendanaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan air limbah domestik;

Kebijakan pengelolaan air limbah dalam roadmap sanitasi Provinsi Gorontalo akan disesuaikan dengan kondisi eksisting, sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Tabel 4.4
Kebijakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Strategi	Kebijakan
1	ASPEK PERATURAN DAN KEBIJAKAN	<u>Strategi-1</u> Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;	Arah kebijakan ini adalah untuk melengkapi perangkat peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman
		<u>Strategi-2</u> Menyebarkan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;	Penyusunan sistem informasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik
		<u>Strategi-3</u> Menerapkan peraturan perundangan.	Menyusun aturan air limbah domestik (SPALDT dan SPALDS), skala kabupaten maupun Provinsi
		<u>Strategi-4</u> Memperkuat substansi dan penerapan peraturan	Menyusun Masterplan atau dokumen perencanaan lain terkait dengan air limbah baik sakala kabupaten/kota maupun

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Strategi	Kebijakan
		peundang-undangan sebagai payung hukum penyelenggaraan SPAL Domestik di Provinsi dan Implementasi Sumber Daya Manusia Sanitasi	lintas wilayah kabupaten/kota
		<u>Strategi-5</u> Menerapkan dan menegakkan peraturan tentang pengelolaan air limbah	Arah kebijakan ini adalah untuk melengkapi perangkat peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.
		<u>Strategi-6</u> Menyusun aturan yang mengikat pengembang perumahan sebagai partisipasi kepedulian terhadap sanitasi	Arah kebijakan ini adalah untuk penyusunan perangkat peraturan perundangan terkait kompensasi pengembang perumahan dalam pengelolaan air limbah domestik
	ASPEK KELEMBAGAAN dan TATA KELOLA	<u>Strategi-1</u> Meningkatkan tata kelola dan kualitas penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan yang mendorong partisipasi dan kolaborasi di daerah	Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi regulator dan operator di Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman
		<u>Strategi-2</u> Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat;	Menyiapkan lembaga yang mengelola air limbah dan melakukan pengawasan terhadap penegakan aturan tentang air limbah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
		<u>Strategi-3</u> Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah;	Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi regulator dan operator di provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman
		<u>Strategi-4</u> Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;	Kesesuaian dan keselarasan SOTK dinas/badan/lembaga tingkat Provinsi terkait pengelolaan air limbah domestik

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Strategi	Kebijakan
		<u>Strategi-5</u> Mendorong peningkatan kemauan politik (<i>political will</i>) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.	Koordinasi, kooperasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan di bidang pengelolaan air limbah domestik
		<u>Strategi-6</u> Peningkatan komitmen Kepala Dinas terkait dalam pengelolaan air limbah domestik	Mewujudkan prinsip kemitraan yang setara dalam rangka pengelolaan air limbah domestik
		<u>Strategi-7</u> Membentuk dan mengoptimalkan lembaga operator dan regulator	Peningkatan sumber daya manusia dengan program pelatihan yang berkesinambungan
	ASPEK PENDANAAN YANG BERKELANJUTAN	<u>Strategi-1</u> Meningkatkan alokasi pendanaan APBN/APBD Provinsi dan mengkonsolidasi potensi pembiayaan dan program prioritas pembangunan lain untuk pembangunan pengelolaan air limbah	Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan alokasi dana pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman melalui sistem pembiayaan dengan melakukan subsidi secara proporsional antara pemerintah pusat dan daerah untuk sistem pengelolaan <i>off site</i> .
		<u>Strategi-2</u> Mengembangkan dan memobilisasi sumber pembiayaan dari masyarakat dan swasta untuk pembangunan infrastruktur serta penyediaan akses dan layanan pengelolaan air limbah	Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan alokasi dana pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman melalui sistem pembiayaan dengan melakukan subsidi secara proporsional antara pemerintah pusat dan daerah untuk sistem pengelolaan <i>off site</i> .
		<u>Strategi-3</u> Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk	Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan alokasi dana pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Strategi	Kebijakan
		penyelenggaraan air limbah permukiman;	melalui sistem pembiayaan dengan melakukan subsidi secara proporsional antara pemerintah pusat dan daerah untuk sistem pengelolaan off site.
		<u>Strategi-4</u> Pembiayaan Bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama.	Pedoman dan arahan dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, dan pengelolaan dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman, baik bagi pemerintah pusat, maupun daerah, dunia usaha, swasta, dan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat
		<u>Strategi-5</u> Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.	Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
		<u>Strategi-6</u> Menyiapkan penganggaran guna pembangunan /pengadaan sarana dan prasarana air limbah dari berbagai fihak	Alokasi penganggaran dalam APBD Provinsi yang berfokus kepada lingkungan yang berkelanjutan
	ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT	<u>Strategi-1</u> Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPAL Domestik dan peningkatan akses sanitasi aman	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan SPAL Domestik
		<u>Strategi-2</u> Meningkatkan akses masyarakat	Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam rangka penyediaan prasarana

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Strategi	Kebijakan
		terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;	dan sarana pengelolaan air limbah di lingkungan permukiman
		<u>Strategi-3</u> Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat di Permukiman dengan SPAL D Terpusat berbasis institusi dan SPALD Terpusat berbasis masyarakat	Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan akses prasarana dan sarana air limbah melalui sistem setempat dan terpusat secara bertahap baik pada skala perkotaan maupun perdesaan, dengan prioritas untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
		<u>Strategi-4</u> Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;	Mendorong pihak pengembang perumahan dalam rangka prasarana dan sarana pengelolaan air limbah di lingkungan permukiman
		<u>Strategi-5</u> Menciptakan ekosistem berbasis inovasi melibatkan sektor swasta dan pelaku bisnis untuk memperkuat pasar terkait penyediaan layanan sanitasi aman di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota	Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha atau swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
		<u>Strategi-6</u> Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;	Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan akses prasarana dan sarana air limbah melalui sistem setempat dan terpusat secara bertahap baik pada skala perkotaan maupun perdesaan, dengan prioritas untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
		<u>Strategi-7</u> Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat di	Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Strategi	Kebijakan
		Kawasan perkotaan	pengelolaan air limbah permukiman terpusat
		<u>Strategi-8</u> Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya memiliki, menggunakan dan memelihara tangki septik bagi penyehatan lingkungan permukiman
		<u>Strategi-9</u> Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.	Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha atau swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
		<u>Strategi-10</u> Lebih sering melakukan komunikasi dan mengadakan program/kegiatan yang melibatkan swasta dan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di lingkungan permukiman	Kolaborasi program pengelolaan air limbah dengan pihak swasta
		<u>Strategi-11</u> Penyiapan tim yang rutin melakukan pemicuan dan promosi kesehatan	Program pemicuan dan promosi yang berkisinambungan
	ASPEK INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	<u>Strategi-1</u> Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi	Pelibatan pelaksana pembangunan infrastruktur dalam program perencanaan pembangunan infrastruktur sanitasi
		<u>Strategi-2</u> Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan	Plotting lokasi sanitasi dalam perencanaan tata ruang

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Strategi	Kebijakan
		sanitasi	
		<u>Strategi-3</u> Pengembangan konsep <i>resource recovery</i> dan <i>circular economy</i>	Penelitian untuk mengurangi konsumsi energi dalam pengolahan air limbah untuk pemulihan energi dari udara dan lumpur
		<u>Strategi-4</u> Penyusunan panduan di tingkat provinsi mengenai pengelolaan air limbah	Implementasi Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Operasional Prosedur dalam pengelolaan air limbah
		<u>Strategi-5</u> Pengembangan sumber daya manusia dan teknologi melalui kerjasama dengan universitas	Pola kerjasama peningkatan kemampuan SDM di bidang pengelolaan air limbah domestik dengan kolaborasi akademisi
		<u>Strategi-6</u> Pembangunan infrastruktur Sanitasi	Pendataan keberfungsian infrastruktur
		<u>Strategi-7</u> Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap atau <i>incremental approach</i>	Model pengembangan pengelolaan air limbah dengan sistem pada <i>software development</i> berdasarkan <i>requirement software</i> yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap
		<u>Strategi-8</u> Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi, yaitu <i>national water and sanitation information services</i> /layanan informasi air minum dan sanitasi nasional	Supporting program dengan teknologi yang mudah diaplikasikan dengan pola <i>open source</i>
		<u>Strategi-9</u> Menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Kawasan Strategis Provinsi	Tertatanya sistem pengelolaan air limbah pada kawasan strategis Provinsi
		<u>Strategi-10</u>	Program dan sistem informasi

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Aspek	Strategi	Kebijakan
		melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan air limbah	yang dapat diakses dengan mudah, murah dan cepat.
		<u>Strategi-11</u> Melaksanakan pilot proyek dalam pengelolaan air limbah dari sub sistem pengumpulan sampai pengolahan	Kerjasama dinas dengan instansi swasta ataupun BUMN yang kompeten dalam pengelolaan air limbah dari hulu ke hilir
		<u>Strategi-12</u> Optimalisasi prasarana dan sarana air limbah domestik kabupaten/kota	Meningkatkan layanan pengolahan air dengan sistem on-site, komunal dan off-site
		<u>Strategi-13</u> meningkatkan cakupan pelayanan secara sederhana dan berkeadilan	Peningkatan sarana prasarana pengelolaan limbah untuk masyarakat dengan teknologi sederhana dan menjangkau semua lapisan masyarakat
		<u>Strategi-14</u> Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi	Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana SPAL Domestik baik SPALDT dan SPALDs, sehingga sesuai dengan standar yang ditetapkan
		<u>Strategi-15</u> Menyelenggarakan perencanaan di bidang air limbah secara menyeluruh dan terintegrasi	Penyusunan Rencana Induk SPAL non Domestik di wilayah kewenangan provinsi

Sumber : Hasil Analisis Konsultan RSP, Tahun 2024



bab-5

RENCANA AKSI

PENGELOLAAN SANITASI

5.1 Skenario Pengelolaan

Rencana aksi percepatan pembangunan sanitasi permukiman ditujukan untuk mendukung strategi dan kebijakan penyelenggaraan sanitasi yang dirumuskan guna memenuhi standar pelayanan minimal, target akses layak dan aman pada tahun 2029.

Dalam kerangka ekonomi daerah, penyediaan layanan sanitasi bagi masyarakat merupakan salah satu sub sektor yang menjadi Urusan Wajib Pemerintah Provinsi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan sanitasi merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan layanan bagi masyarakat tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun dan menetapkan rencana aksi adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan skenario pengelolaan sanitasi sesuai dengan tujuan dan pengelolaan sanitasi
- b. Mengelompokkan rencana aksi sesuai hasil rumusan kebijakan yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) aspek pengelolaan sanitasi, yaitu:
 - (1) aspek kelembagaan;
 - (2) aspek regulasi;
 - (3) aspek infrastruktur;
 - (4) aspek peran serta masyarakat; dan
 - (5) aspek kerjasama dan pola pendanaan.
- c. Membagi kelompok rencana aksi tersebut sesuai Rencana Aksi dan lokasi, Perangkat Daerah, Pemangku kepentingan non OPD, Hasil yang diharapkan (Volume/penerima manfaat), Kebutuhan biaya (Juta rupiah) dan waktu pelaksanaan

Skenario pengelolaan sanitasi merupakan skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses layak dan aman untuk setiap tahun selama 5 tahun.

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Penentuan skenario pengelolaan disesuaikan dengan distribusi target capaian yang sudah ditetapkan dan dihitung pada bab sebelumnya, sehingga skenario pengelolaan sanitasi di Provinsi Gorontalo ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5-1
Skenario Pencapaian Sasaran Jangka Menengah
Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Komponen	Akses Sanitasi -Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
A.	Target Akses Sanitasi (air limbah domestik)					
1.	Layak	92,50%	94,38%	96,25%	98,13%	100,00%
2	Aman	4,88%	8,27%	11,22%	14,16%	17,27%
2.a	SPALD Setempat	4,03%	6,87%	9,31%	11,75%	14,33%
2.b	SPALD Terpusat	0,83%	1,41%	1,91%	2,41%	3,04%
2.b.1	<i>SPALD Terpusat perkotaan dan permukiman berbasis institusi</i>	0,66%	1,13%	1,53%	1,93%	2,43%
2.b.2	<i>SPALD Terpusat permukiman berbasis masyarakat</i>	0,13%	0,23%	0,31%	0,39%	0,49%
3	BABs	7,23%	5,52%	4,31%	3,11%	1,90%
B.	Target Akses Sanitasi persampahan)					
5	Rumah Tangga mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah	50,05%	56,62%	63,19%	69,75%	85,00%
5.a	Sampah residu tersisa di LUR (Lahan Urug Residu)	30,03%	32,77%	35,50%	38,23%	49,18%
5.b	Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	20,02%	23,85%	27,69%	31,53%	35,82%
5.b.1	sampah terdaur ulang	6,12%	7,58%	9,04%	10,51%	12,09%

Sumber : Hasil perhitungan berdasarkan capaian sanitasi eksisting

5.2 Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo

Perumusan rencana aksi dilakukan berdasarkan hasil analisis rekomendasi masing-masing aspek pengelolaan sanitasi sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya yang merujuk pada isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi, dan kebijakan;

5.3.1 Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan

Rencana Aksi Sanitasi pengelolaan persampahan di Provinsi Gorontalo disesuaikan dengan tujuan, sasaran dan kebijakan, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5-2
Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo (Pengelolaan Sampah)
Tahun 2025-2029

TUJUAN : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah di sumber, menurunkan timbulan sampah yang diangkut ke TPA, meningkatkan sampah yang diangkut ke pusat pengolahan sampah, meningkatkan sampah yang terolah menjadi bahan baku, meningkatkan sampah yang termanfaatkan menjadi energi

SASARAN : Rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah sebesar 62,98% pada Tahun 2029, sampah residu tersisa di LUR sebesar 34,79%, sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah = 31,52% dan sampah terdaur ulang = 12,79 % pada Tahun 2029

STRATEGI : Pemenuhan Akses aman dan layanan berkelanjutan

Kebijakan			Rencana Aksi
1.	ASPEK	STANDAR	DAN
	REGULASI		
a.	melengkapi dan merevisi peraturan terkait perundang-undangan di tingkat provinsi dan daerah terkait pengelolaan	1	Penyusunan peraturan pelaksanaan yang diperlukan sebagai bentuk penjabaran dari Undang-undang atau peraturan yang berlaku terkait

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kebijakan	Rencana Aksi
sampah, penanganan sampah dan pengurangan sampah	pengelolaan sampah di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota
	2 Penyusunan surat edaran gubernur tentang percepatan pengelolaan sampah
	3 Sinkronisasi produk hukum terkait pengelolaan sampah antar OPD Provinsi
Penyusunan sistem informasi b. pengelolaan persampahan Provinsi Gorontalo	1 Melengkapi dan merevisi produk hukum yang menghambat dalam pengelolaan sampah
	2 Penyusunan peraturan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan sanksi dalam pengelolaan dan pengolahan sampah
	3 Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pengalokasian dan pengaturan anggaran untuk pengelolaan sampah
	4 Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan EPR (<i>extended producer Responsibility</i>) atau kewajiban produsen pengelolaan sampah
	5 Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan CSR (<i>corporate social responsibility</i>) untuk pengelolaan sampah
Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif c. dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1 Penyusunan peraturan tentang kompensasi, insentif dan disinsentif untuk pengelolaan sampah
	2 Penyusunan peraturan tentang industri daur ulang dan pemasaran
	3 Pengembangan SPM dan NSPK dalam kegiatan pengelolaan sampah di tingkat provinsi dan daerah
d. Menerapkan dan menegakkan peraturan tentang pengelolaan	1 Sosialisasi produk hukum dalam bentuk desiminasi terkait

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kebijakan		Rencana Aksi
sampah		pengelolaan sampah melalui media komunikasi secara profesional dan kontinu
e. Penguatan penegakan hukum	2	Penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah secara konsisten
f. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1	menyempurnakan atau melengkapi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah
	2	Menerapkan dan mengembangkan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah
	3	pengembangan standar/kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan sampah
	4	pengembangan standar/kriteria sarana dan prasarana dalam pengurangan sampah
	5	pengembangan SOP dalam pengurangan sampah
2 ASPEK KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA		
a. Membentuk badan koordinasi pengelolaan sampah tingkat Provinsi dan peningkatan kerjasama antar OPD selain Pokja Sanitasi	1	Pembentukan badan koordinasi dengan penegasan tugas dan fungsi masing-masing terkait pengelolaan sampah
	2	Pembentukan badan koordinasi pengelolaan sampah provinsi
b. Menata fungsi Dinas/instansi pengelola sampah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kondisi daerah	1	Penyusunan nomen klatu pengelola sampah tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan indikator beban pengelolaan sampah provinsi/kabupaten/kota
c. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1	Penyusunan peran regulator dan operator dalam pengelolaan sampah
d. Peningkatan status dan kapasitas	1	Pembentukan kelembagaan

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kebijakan		Rencana Aksi	
institusi pengelola persampahan		pengelola sampah di masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku	
e.	Meningkatkan kordinasi dan kerjasama antar stakeholder	1	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan sampah
f.	Memisahkan fungsi /unit regulator dan operator	1	meningkatkan kapasitas leadership, kelembagaan dan SDM dalam upaya pengurangan sampah
g.	Peningkatan komitmen Kepala Daerah	1	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
		2	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
		3	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		4	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi
		5	koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan
		6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
h.	Meningkatkan kualitas SDM bidang persampahan	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
		2	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
		3	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
		4	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kebijakan	Rencana Aksi
	5 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
	6 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
	7 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3 ASPEK PENDANAAN YANG BERKELANJUTAN	
a. Menerapkan dan mengembangkan skema investasi, dana operasional dan pemeliharaan dalam pengurangan sampah	1 Penetapan standar biaya investasi, operasional dan pemeliharaan pengelolaan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir dalam RP/ton
	2 mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah sebesar minimal 2% dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota
b. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan provinsi serta daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1. Menglokasikan anggaran untuk pilot proyek pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan/pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten/Kota
	2 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran pengelolaan sampah
	3. pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan sampah
c. Melaksanakan extended producer responsibility	1 pemanfaatan program Extended Producer Responsibility (EPR)/kewajiban produsen dalam pengelolaan sampah
	2 Penyusunan dan penerapan peta jalan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah
	3 Pengaturan standarisasi produk daur ulang
d. Melaksanakan CSR	1 Pemanfaatan program corporate

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kebijakan		Rencana Aksi	
			social responsibility / (CSR) untuk pengelolaan sampah
		2	memperkuat komitmen dunia usaha dalam pengurangan sampah melalui penerapan tanggungjawab produsen yang diperluas
		3	memperkuat keterlibatan dunia usaha dalam pengurangan sampah melalui kemitraan dengan pemerintah
e.	Pengkajian ulang terkait <i>Tipping Fee</i> pada TPA Regional	1	Penetapan tipping fee sesuai dengan standar harga dalam pengelolaan sampah
f.	Pengembangan Kerjasama dan Pola Pendanaan	1	Fasilitasi Kerjasama Persampahan Lintas Kabupaten/kota
		2	Kerjasama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Permukiman
		3	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		4	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Infrastruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
		5	Fasilitasi Kersa Sama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
		6	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga
		7	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
4	ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT		
a.	Perubahan paradigma pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku	1	Perubahan pola pikir dan peningkatan kapasitas penyelenggara dalam pengelolaan sampah
b.	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	2	Melakukan perubahan pola pikir dalam pengelolaan sampah melalui program rekayasa sosial

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kebijakan		Rencana Aksi	
c.	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	3.	Pelatihan, training, seminar dan lomba inovasi pengelolaan sampah
d.	Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	4.	Kerjasama antar pelaku usaha dan stake holder pengelola sampah
		5	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat
		6	Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh
		7	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
		8	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
5	ASPEK INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI		
a	Menyusun Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah	1	Penyusunan rencana induk sistem pengelolaan sampah
		2	Penyusunan reviu rencana induk sistem pengelolaan sampah
		3	membangun sistem informasi pengurangan sampah
b	Meningkatkan pengurangan sampah pada tahapan implementasi	1	pengembangan standar kompetensi pelaksana kegiatan pengurangan sampah
		2	pengembangan standar kriteria sarana/prasarana dalam pengurangan sampah
		3	Pengembangan SOP dalam pengurangan sampah
c.	Mempercepat penyediaan dan pengoperasian infrastruktur yang	1	pembangunan sarana prasarana pengurangan sampah

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kebijakan	Rencana Aksi
berketahanan serta meningkatkan cakupan layanan sanitasi berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan	
	2 pembangunan sarana prasarana kegiatan pengurangan sampah secara individu
	3 penyediaan sarana prasarana kegiatan pengurangan sampah skala kawasan
	4 melakukan pemilahan, pewadahan dan pengolahan sampah di sumber
	5 menerapkan teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan sampah
	6 memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan sampah	1 penyusunan sistem perencanaan, implementasi, pengawasan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan sampah
	2 Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan
e. Melaksanakan pilot proyek dalam pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan/pewadahan sampai pemrosesan akhir	1 penyusunan kajian pilot proyek pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan sampai dengan pemrosesan akhir
f. Optimalisasi prasarana dan sarana persampahan di wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota	1 pelaksanaan pilot proyek sub sistem pewadahan sampai pemrosesan akhir di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango
g. meningkatkan cakupan pelayanan secara sederhana dan berkeadilan	1 Pembangunan dan pengoperasian pengolahan (ITF) serta TPA Regional di kawasan strategis nasional (KSN) oleh pemerintah pusat
h. Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi	1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
	2 Supervisi Pembangunan/

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kebijakan	Rencana Aksi
	Rehabilitasi/TPA/TPST/SPA Peningkatan Kewenangan Provinsi
	3 Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
	4 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
	5 Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
	6 Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan
	7 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional
i. Meningkatkan TPA Regional Talumelito	1 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/ TPST Regional
	2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
j. Mengembangkan TPA ke arah <i>sanitary alndfill/controlled landfill</i>	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional
	2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional
	3 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
k. Melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk aplikasi teknologi penanganan sampah yang tepat guna dan berwawasan lingkungan	1 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
	2 Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
	3 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

Sumber : Analisis Konsultan RSP, 2024

5.3.2 Rencana Aksi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Rencana Aksi Sanitasi pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Gorontalo disesuaikan dengan tujuan, sasaran dan kebijakan, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5-3
Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo (Pengelolaan Air Limbah Domestik)
Tahun 2025-2029

TUJUAN	:	Pencapaian akses aman Tahun 2030
SASARAN	:	Rumah tangga dengan akses layak sebesar 100,00%, akses aman sebesar 17,27%, SPALD Setempat sebesar 14,33%, SPALD Terpusat sebesar 3,04%, SPALD Terpusat berbasis institusi sebesar 2,43% dan SPALD Terpusat berbasis masyarakat sebesar 0,49%, BABs sebesar 1,90%, desa stop BABs sebesar 53% dan desa STBM sebesar 11,23% pada Tahun 2029
STRATEGI	:	Peningkatan sarana prasarana SPALD-T dan SPALD-S, perkuatan fungsi regulator dan operator, melengkapi perangkat peraturan, peningkatan alokasi dana pembangunan air limbah, akses dan peningkatan peran masyarakat dan swasta

Kebijakan		Rencana Aksi
1	ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT	
a.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;	1 Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan padat kumuh perkotaan yang belum terlayani dengan system pengelolaan air limbah terpusat;
b.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;	1 Merehabilitasi atau merevitalisasi serta mengekstensifikasi sistem yang ada (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/ IPLT);
c.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air	1 Menyelenggarakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) / CLTS (<i>Community Lead Total Sanitation</i>) di

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kebijakan	Rencana Aksi
limbah sistem terpusat di Permukiman dengan SPAL D Terpusat berbasis institusi dan SPALD Terpusat berbasis masyarakat	kawasan perdesaan;
	2 Mengoptimalkan kapasitas IPAL terpasang dan peningkatan operasional <i>sewerage</i> terpasang;
	3 Meningkatkan kapasitas pengolahan melalui pembangunan IPAL paket;
	4 Mengembangkan sistem setempat menjadi sistem terpusat secara bertahap di perkotaan dengan cara mengkombinasikan dan atau menambah dengan sistem yang telah ada secara bertahap.
d. Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;	1 Melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
e. Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.	1 Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman;
	2 Menyelenggarakan kegiatan percontohan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah;
	3 Menyelenggarakan sosialisasi kepada dunia usaha dan swasta mengenai potensi investasi di bidang pengelolaan air limbah permukiman;
	4 Mengembangkan pola investasi untuk penyelenggaraan pengelolaan system air limbah permukiman;
f. Menciptakan ekosistem berbasis inovasi melibatkan sektor swasta dan pelaku bisnis untuk memperkuat pasar terkait penyediaan	1 Memberikan kemudahan dan insentif kepada dunia usaha yang berpartisipasi di dalam pengelolaan air limbah seperti pemberian ijin usaha dan keringanan pajak..

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kebijakan	Rencana Aksi
layanan sanitasi aman di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota	
2 ASPEK STANDAR DAN REGULASI	
Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;	1 Menyiapkan undang-undang dan peraturan pendukungnya dalam pengelolaan air limbah permukiman;
	2 Penguatan substansi peraturan perundang-undangan penyelenggaraan SPAL Domestik yang ada sebagai payung hukum nasional pencapaian 30% akses aman 2030 namun sesuai target provinsi
	3 Penguatan kerangka regulasi (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Instruksi Kepala Daerah) sebagai pelaksanaan program di daerah
	4 Pengembangan NSPK untuk SPAL Domestik di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo
b. Menyebarluaskan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;	1 Mereview dan melengkapi Norma standar Pedoman dan Manual (NSPM) dalam pengelolaan air limbah permukiman;
c. Menerapkan peraturan perundangan.	1 Mereview Standar Pelayanan Minimal dalam pengelolaan air limbah permukiman;
	2 Melaksanakan bantuan teknis penyusunan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
	3 Mendorong dan melaksanakan bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana induk prasarana dan sarana air limbah di kawasan perkotaan dan perdesaan;
	4 Fasilitasi/pendampingan implementasi pemenuhan SPM sanitasi, khususnya sanitasi aman secara berjenjang dari

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kebijakan		Rencana Aksi	
		provinsi ke kabupaten/kota	
		5	Pemantauan implementasi pemenuhan SPM sanitasi di daerah
d.	Memperkuat substansi dan penerapan peraturan peundang-undangan sebagai payung hukum penyelenggaraan SPAL Domestik di Provinsi dan Implementasi Sumber Daya Manusia Sanitasi	1	Mensosialisasikan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
		2	Mengembangkan sistem informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
		3	Memberikan insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah dan Dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan pengelolaan air limbah permukiman;
		4	Mempersyaratkan pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat dikawasan permukiman baru bagi penyelenggara pembangunan Kawasan permukiman baru.
3	ASPEK KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA		
a.	Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat;	1	Memberikan pendampingan pembentukan kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah permukiman komunal;
b.	Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah;	1	Memberikan pelatihan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah serta pengelolaan air limbah permukiman komunal;
c.	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;	1	Mendorong terbentuknya unit yang mengelola prasarana dan sarana air limbah permukiman di daerah, antara lain berupa Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum dan Dinas;
d.	Mendorong peningkatan kemauan politik (political will)	1	Melaksanakan bantuan teknis penguatan kelembagaan pengelolaan

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kebijakan	Rencana Aksi
para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.	air limbah permukiman;
e. Meningkatkan tata kelola dan kualitas penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan yang mendorong partisipasi dan kolaborasi di daerah	1 Melaksanakan pelatihan kepada personil pengelola dibidang penyelenggaraan air limbah permukiman;
	2 Memfasilitasi koordinasi antar Lembaga dan antar daerah dalam kerjasama penyelenggaraan pengelolaan air limbah;
	3 Melaksanakan sosialisasi kepada lembaga eksekutif dan legislative mengenai pentingnya penyelenggaraan air limbah permukiman;
	4 Menyusun dan mensosialisasikan kisah sukses (<i>best practices</i>) tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman
4 ASPEK PENDANAAN YANG BERKELANJUTAN	
a. Meningkatkan alokasi pendanaan APBN/APBD Provinsi dan mengkonsolidasi potensi pembiayaan dan program prioritas pembangunan lain untuk pembangunan sanitasi	1 Memberikan dana stimulan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman untuk mendorong mobilisasi dana swadaya masyarakat;
b. Mengembangkan dan memobilisasi sumber pembiayaan dari masyarakat dan swasta untuk pembangunan infrastruktur serta penyediaan akses dan layanan	2 Mendorong peningkatan dan fasilitasi kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah;
c. Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman;	1 Pemerintah pusat memberikan investasi awal pembangunan system pengelolaan air limbah terpusat dan pengembangannya ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kebijakan	Rencana Aksi
d. Pembiayaan Bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama.	1 Peningkatan alokasi APBN/APBD untuk memenuhi target akses aman nasional (SDGs) dan provinsi sesuai target yang ditetapkan
	2 Penguatan forum konsolidasi pendanaan sanitasi di tingkat provinsi
	3 Pengembangan kerangka regulasi di tingkat provinsi sebagai dasar alokasi APBD untuk pemenuhan target akses aman
e. Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.	1 Mobilisasi pendanaan non APBD seperti bantuan keuangan/hibah provinsi, hibah pusat dan DAK serta sumber pendanaan non negara: swasta/dunia usaha, lembaga karitatif dan hibah mitra pembangunan
	2 Pendanaan APBD untuk pemenuhan kriteria kesiapan mengakses pendanaan non APBD
5 ASPEK INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	
a. Mempercepat penyediaan dan pengoperasian infrastruktur yang berketahanan serta meningkatkan cakupan layanan sanitasi berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan	1. Percepatan pembangunan sarana/prasarana akses sanitasi aman : IPLT, SPALD T permukiman berbasis institusi dan masyarakat, serta sarana pendukungnya di wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo
	2. Peningkatan insentif penyediaan sarana/prasarana sanitasi di tingkat rumah tangga
	3. Peningkatan pemanfaatan sarana/prasarana terbangun di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo
	4. Pembuatan integrasi penyediaan sanitasi aman dalam pelaksanaan program STBM, termasuk penyediaan dukungan bagi rumah tangga untuk terhubung dengan jaringan perpipaan (khususnya untuk kawasan padat penduduk di perkotaan) ataupun septik

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kebijakan	Rencana Aksi
	tank yang sesuai standar
	5. Pemanfaatan IoT (<i>internet of things</i>) dalam pengelolaan pemanfaatan infrastruktur sanitasi

Sumber : Analisis Konsultan RSP, 2024

5.3 Alokasi Rencana Aksi Sanitasi Provinsi Gorontalo

Berdasarkan outline penyusunan Laporan Roadmap Sanitasi Provinsi, Rencana Aksi yang telah disusun pada tabel 5.2 dan tabel 5.3, dialokasikan berdasarkan lokasi, penanggungjawab pelaksanaan, hasil yang diharapkan, kebutuhan biaya dan waktu pelaksanaan.

Alokasi rencana aksi roadmap sanitasi Provinsi Gorontalo dijelaskan pada tabel dibawah ini.

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 5-4
Alokasi Rencana Aksi Sanitasi Pengelolaan Persampahan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
1	Penyusunan peraturan pelaksanaan yang diperlukan sebagai bentuk penjabaran dari Undang-undang atau peraturan yang berlaku terkait pengelolaan sampah di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP	Pelaku usaha pengelolaan sampah non pemerintah	Tersusunnya peraturan tentang pelaksanaan pengelolaan sampah	0,00		0,00			
2	Penyusunan surat edaran gubernur tentang percepatan pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusunnya Surat Edaran Gubernur terkait percepatan pengelolaan sampah	0,00		0,00			
3	Sinkronisasi produk hukum terkait pengelolaan sampah antar OPD Provinsi	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Workshop dan Rapat Teknis terkait Kesepakatan	50,00		50,00			

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
					implikasi pengelolaan sampah antar OPD						
4	Melengkapi dan merevisi produk hukum yang menghambat dalam pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusunnya Surat Edaran Gubernur terkait faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan sampah	0,00			0,00		
5	Penyusunan peraturan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan sanksi dalam pengelolaan dan pengolahan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusunnya peraturan tentang pelaksanaan pengelolaan sampah	0,00		0,00			
6	Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pengalokasian dan pengaturan anggaran untuk pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang anggaran	100,00			100,00		

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
					pengelolaan sampah						
7	Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan EPR (<i>extended producer Responsibility</i>) atau kewajiban produsen pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusunnya peraturan tentang EPR	0,00			0,00		
8	Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan CSR (<i>corporate social responsibility</i>) untuk pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusunnya peraturan tentang CSR	0,00			0,00		
9	Penyusunan peraturan tentang kompensasi, insentif dan disinsentif untuk pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusunnya peraturan tentang kompensasi pengelolaan sampah	0,00			0,00		
10	Penyusunan peraturan tentang industri daur ulang dan pemasaran	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusunnya peraturan tentang IDU	0,00			0,00		

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerimaan manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
		alo			dan pemasaran hasil daur ulang sampah						
11	Pengembangan SPM dan NSPK dalam kegiatan pengelolaan sampah di tingkat provinsi dan daerah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusunnya petunjuk teknis perhitungan SPM dan NSPK pengelolaan sampah	90,00			90,00		
12	Sosialisasi produk hukum dalam bentuk desiminasi terkait pengelolaan sampah melalui media komunikasi secara profesional dan kontinu	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersosialisasinya produk hukum	50,00		50,00			
13	Penerapan sangsi hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah secara konsisten	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terlaksananya penerapan sangsi hukum dengan penyusunan peraturan dan implementasi	100,00		25,00	25,00	25,00	25,00

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
					ya						
14	menyempurnakan atau melengkapi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusunnya NSPK dalam pengurangan sampah	50,00		50,00			
15	Menerapkan dan mengembangkan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		terwujudnya pola insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah	0,00			0,00		
16	pengembangan standar/kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		terwujudnya pola yang teknologi ramah lingkungan dalam pengurangan sampah	0,00			0,00		
17	pengembangan standar/kriteria sarana dan prasarana dalam	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terwujudnya SOP sarana dan prasarana	50,00		50,00			

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	pengurangan sampah	alo			pengurangan sampah						
18	pengembangan SOP dalam penanganan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terwujudnya SOP penanganan sampah	50,00		50,00			
19	Pembentukan badan koordinasi dengan penegasan tugas dan fungsi masing-masing terkait pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terbentuknya badan koordinasi diantara pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah	0,00			0,00		
20	Pembentukan badan koordinasi pengelolaan sampah kabupaten/kota	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terbentuknya badan koordinasi pengelolaan sampah Kabupaten/kota	0,00			0,00		

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
21	Penyusunan nomen klatur pengelola sampah tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan indikator beban pengelolaan sampah provinsi/kabupaten/kota	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusunnya nomen klatur pengelolaan sampah sesuai beban kabupaten/kota	0,00		0,00			
22	Penyusunan peran regulator dan operator dalam pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terpisahnya peran pengelola persampahan	0,00		0,00			
23	Pembentukan kelembagaan pengelola sampah di masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terbentuknya 72 kelembagaan pengelola tingkat kelurahan	144,00		36,00	36,00	36,00	36,00
24	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terlatihnya SDM Pengelolaan sampah dengan program pelatihan dan	100,00		25,00	25,00	25,00	25,00

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerimaan manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
					bimbingan teknis						
25	meningkatkan kapasitas leadership, kelembagaan dan SDM dalam upaya pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Meningkatnya kapasitas 100 orang SDM pengurangan sampah	100,00		25,00	25,00	25,00	25,00
26	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusunnya dokumen Rencana Strategis dan Teknis Pengelolaan Persampahan Dalam Wilayah Kewenangan Provinsi	600,00		600,00			
27	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusunnya dokumen Rencana Kebijakan dan Teknis Pengelolaan Persampahan Regional	800,00			800,00		

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
28	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terevaluasinya kinerja dalam PPLH	250,00		62,50	62,50	62,50	62,50
29	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tertampungnya pengaduan terkait PPLH	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30	koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terselesaikannya kasus terkait PPLH	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terjalinya koordinasi dan evaluasi kebijakan dalam pengelolaan	100,00		25,00	25,00	25,00	25,00

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
					persampahan						
32	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa/Kelurahan	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terfasilitasinya 729 produk hukum desa/kelurahan terkait pengelolaan sampah	72,90		18,23	18,23	18,23	18,23
33	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terfasilitasinya petunjuk pelaksanaan pembangunan desa dalam pengelolaan sampah	364,50		91,13	91,13	91,13	91,13
34	Perancangan dan Pengembangan Sistem Pengolaan Persampahan pada kawasan Wisata Unggulan Provinsi	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP, Dinas Pariwisata		Tersusunnya dokumen perencanaan ODTW Unggulan Provinsi	600,00			600,00		

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
35	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Strategis Kawasan Pariwisata Provinsi	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP, Dinas Pariwisata		Tersusunnya peraturan terkait destinawi wisata yang berkelanjutan	0,00		0,00	0,00		
36	Penetapan standar biaya investasi, operasional dan pemeliharaan pengelolaan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir dalam RP/ton	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusunnya peraturan terkait biaya investasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir	100,00			100,00		
37	mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah sebesar minimal 2% dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Teralokasikan 2% pengelolaan sampah dari APBD Provinsi	100,00		25,00	25,00	25,00	25,00
38	Menglokasikan anggaran untuk pilot proyek pengelolaan sampah dari sub sistem	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terimplementasinya pilot proyek pengelolaan sampah	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerimaan manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	pemilahan/pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten/Kota										
39	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Termonitornya pelaksanaan penggunaan anggaran	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40	pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Termonitornya dana desa dalam pengelolaan sampah	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
41	pemanfaatan program <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR)/kewajiban produsen dalam pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Teraplikasinya peraturan tentang EPR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42	Penyusunan dan penerapan peta jalan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusunnya peta jalan produsen dalam pengurangan	300,00			300,00		

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
					sampah						
43	Pengaturan standarisasi produk daur ulang	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Teraplikasikannya peraturan tentang Produk Daur Ulang Sampah	0,00		0,00			
44	Pemanfaatan program corporate social responsibility / (CSR) untuk pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Teraplikasikannya peraturan tentang CSR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
45	memperkuat komitmen dunia usaha dalam penanganan sampah melalui penerapan tanggungjawab produsen yang diperluas	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusunnya komitmen dengan dunia usaha terkait penanganan sampah	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
46	memperkuat keterlibatan dunia usaha dalam pengurangan sampah melalui kemitraan dengan pemerintah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusunnya komitmen dengan dunia usaha terkait pengurangan sampah	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerimaan manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
47	Penetapan tipping fee sesuai dengan standar harga dalam pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusunnya nota kesepakatan tipping fee pengelolaan sampah	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
48	Fasilitasi Kerjasama Persampahan Lintas Kabupaten/kota	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terfasilitasinya kerjasama persampahan lintas kabupaten/kota	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
49	Kerjasama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Permukiman	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dalam lingkungan permukiman pada wilayah kewenangan provinsi	1.000,00		250,00	250,00	250,00	250,00
50	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST	Provinsi	DPUPR-PKP		Tertanganinya sampah di TPA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	Regional	Gorontalo			Regional melalui kerjasama dengan Badan Usaha						
51	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Infrastruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terwujudnya koordinasi terkait infrastruktur pengelolaan sampah	0,00		0,00			
52	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terwujudnya fasilitasi kerjasama	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
53	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terwujudnya fasilitasi kerjasama	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
54	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terwujudnya fasilitasi kerjasama	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
55	Perubahan pola pikir dan peningkatan kapasitas penyelenggara dalam pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Peningkatan pola pikir penyelenggara dalam pengelolaan sampah	50,00		12,50	12,50	12,50	12,50
56	Melakukan perubahan pola pikir dalam pengelolaan sampah melalui program rekayasa sosial	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Peningkatan pola pikir dalam pengelolaan sampah	50,00		12,50	12,50	12,50	12,50
57	Pelatihan, training, seminar dan lomba inovasi pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup		Terwujudnya lomba inovasi pengelolaan sampah	300,00		75,00	75,00	75,00	75,00
58	Kerjasama antar pelaku usaha dan stake holder pengelola sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP	Pelaku daur ulang sampah	Terwujudnya kerjasama pengelolaan sampah	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
59	Penyelenggaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP, Dinas Kesehatan		Terlaksananya promosi kesehatan dan PHBS	150,00		37,50	37,50	37,50	37,50
60	Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP, Dinas PPPA		Terlaksananya penyadaran publik melalui kegiatan seminar, diskusi dan workshop	100,00		25,00	25,00	25,00	25,00
61	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP, Dinas PPPA		Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan	50,00			50,00		
62	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP, Dinas PPPA		Teradvokasinya kebijakan dan pendampingan pengelolaan sampah	50,00		12,50	12,50	12,50	12,50
63	Penyusunan rencana induk	Provinsi	DPUPR-		Terlaksananya	400,00			400,00		

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	sistem pengelolaan sampah	i Gorontalo	PKP		penyusunan RISPS						
64	Penyusunan reviu rencana induk sistem pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terlaksananya reviu penyusunan RISPS	100,00					100,00
65	membangun sistem informasi pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusunnya sistem informasi pengurangan dan penanganan sampah	250,00		62,50	62,50	62,50	62,50
66	pengembangan standar kompetensi pelaksana kegiatan pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terlaksananya bimbingan teknis pengurangan sampah	100,00		25,00	25,00	25,00	25,00
67	pengembangan standar kriteria sarana/prasarana dalam pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terlaksananya bimbingan teknis pengurangan sampah	100,00		25,00	25,00	25,00	25,00
68	Pengembangan SOP dalam	Provinsi	DPUPR-		Tersusunnya	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo	PKP		SOP pengurangan sampah						
69	pembangunan sarana prasarana pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terlaksananya pembangunan 100 unit PDU di wilayah kewenangan Provinsi	150,00		37,50	37,50	37,50	37,50
70	pembangunan sarana prasarana kegiatan pengurangan sampah secara individu	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana individual	2.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00
71	penyediaan sarana prasarana kegiatan pengurangan sampah skala kawasan	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana skala kawasan strategis provinsi	3.000,00		750,00	750,00	750,00	750,00
72	melakukan pemilahan, pewadahan dan pengolahan sampah di	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terlaksananya evaluasi dan monitoring pengelolaan	200,00		50,00	50,00	50,00	50,00

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerimaan manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	sumber				sampah di sumber						
73	menerapkan teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terlaksananya teknologi tepat guna dalam pengurangan sampah	50,00		12,50	12,50	12,50	12,50
74	memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		terwujudnya keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah dengan program pengurangan sampah skala kewilayahan (RW)	2.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00
75	penyusunan sistem perencanaan, implementasi, pengawasan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusunya dokumen sistem perencanaan dan e-monev	200,00		200,00			

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	sampah				pelaksanaan pengelolaan sampah						
76	Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Rehabilitasi IPL TPA Regional Talumelito	3.500,00			1.750,00	1.750,00	
77	penyusunan kajian pilot proyek pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan sampai dengan pemrosesan akhir	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusnya dokumen pengelolaan sampah hulu hilir	150,00			150,00		
78	pelaksanaan pilot projec sub sistem pewadahan sampai pemrosesan akhir di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terlaksananya program pilot proyek pengelolaan sampah hulu hilir	1.500,00				1.500,00	
79	Pembangunan dan pengoperasian pengolahan (ITF) serta TPA Regional di kawasan strategis nasional (KSN) oleh pemerintah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terlaksananya pembangunan ITF	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerimaan manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	pusat										
80	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terlaksananya pembangunan TPS 3 R untuk mendukung 38% sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	94.197,86		21.441,90	25.084,97	28.807,64	32.611,24
81	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terlaksananya supervisi pembangunan TPST/TPS 3R di wilayah kewenangan Provinsi	6.593,85		1.500,93	1.755,95	2.016,53	2.282,79
82	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terbangunnya TPST di wilayah kewenangan Provinsi	5.000,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
83	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terlaksananya rehabilitasi TPA Kewenangan Provinsi	1.000,00		250,00	250,00	250,00	250,00
84	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terlaksananya peningkatan TPST dan TPS 3R dalam wilayah kewenangan provinsi	1.500,00		375,00	375,00	375,00	375,00
85	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terwujudnya penambahan sarana pengangkutan sampah setiap kabupaten/kotaa	2.500,00		625,00	625,00	625,00	625,00
86	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terwujudnya penambahan luas lahan landfill TPA Regional Talumelito	15.000,00		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
87	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/ TPST Regional	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Teranggarkannya pembiayaan operasi dan pemeliharaan TPA Regional	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
88	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terwujudnya koordinasi terkait penanganan sampah	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
89	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terlaksananya proses koordinasi dan sinkronisasi sarana prasarana TPS Regional	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersedianya angkutan sampah untuk pelayanan regional dan kabupaten/kot a	793.050,56		164.262,73	190.754,79	217.824,61	245.481,84

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerimaan manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
91	Pengembangan pengelolaan sampah (penanganan dan pengurangan sampah) di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP, Dinas Pariwisata	Pelaku usaha pariwisata	Tersedianya dokumen penanganan dan pengurangan sampah di KSP Provinsi Gorontalo	400,00		100,00	100,00	100,00	100,00
92	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terlaksananya proses pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00
93	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terlaksananya proses pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah pada destinasi wisata Provinsi	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00

Sumber : Hasil Analisis Konsultan RSP, 2024

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Tabel 5-5
Alokasi Rencana Aksi Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
1	Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan padat kumuh perkotaan yang belum terlayani dengan system pengelolaan air limbah terpusat;	Kawasan Kumuh Kota Gorontalo sesuai Perwali Kota Gorontalo No. 23 Tahun 2022	DPUPR-PKP, Dinas Kesehatan		Terbangunnya SPAL Domestik terpusat skala permukiman berbasis masyarakat dengan pelayanan 500 KK .	4.500,00		1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
2	Merehabilitasi atau merevitalisasi serta mengekstensifikasi sistem yang ada (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/ IPLT);	IPLT Kwandang, IPLT Limboto Barat, IPLT Dulupi, IPLT Kota Utara	DPUPR-PKP, UPTD Air Limbah, DLH Kota Gorontalo	BPPW Gorontalo	Optimalnya keberfungsian IPLT di 4 lokasi	4.000,00		2.000,00	2.000,00		
3	Menyelenggarakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) / CLTS (<i>Community Lead Total Sanitation</i>) di kawasan perdesaan;	Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yakni di Boalemo, Gorontalo, dan Gorontalo Utara	DPUPR-PKP, Dinas Kesehatan		Menurunnya kejadian diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan pelaku dengan	3.500,00		875,00	875,00	875,00	875,00

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
					pembangunan wc dan septik tank yang memenuhi standar untuk 1000 KK						
4	Mengoptimalkan kapasitas IPAL terpasang dan peningkatan operasional <i>sewerage</i> terpasang;	Lamu, MolingkapotoPalopo, Marisa Selatan dan Hulawa	DPUPR-PKP	BPPW Gorontalo	Berfungsinya SPALD Terpusat di 5 lokasi	1.750,00		350,00	1.400,00		
5	Meningkatkan kapasitas pengolahan melalui pembangunan IPAL paket;	KSP dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu Kawasan Marisa dan	DPUPR-PKP	BPPW Gorontalo	Terbangunnya IPAL Paket dan Pendukungnya dalam lingkungan KSP	1.050,00			350,00	350,00	350,00

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
		Kawasan Randangan Kabupaten Pohuwato			sebanyak 1500 KK						
6	Mengembangkan sistem setempat menjadi sistem terpusat secara bertahap di perkotaan dengan cara mengkombinasikan dan atau menambah dengan sistem yang	PKW Kecamatan Tibawa dan PKL Kecamatan Limboto	DPUPR-PKP	BPPW Gorontalo	Terbangunnya SPAL Domestik terpusat skala permukiman berbasis masyarakat dengan pelayanan 500 KK .	4.500,00			2.250,00	2.250,00	

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	telah ada secara bertahap.										
7	Melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;	Kabupaten/kota	DPUPR-PKP, Dinas Kesehatan		Tersampainya tujuan pengelolaan air limbah kepada OPD Kabupaten/kota	300,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
8	Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air	Kabupaten/kota	DPUPR-PKP, Dinas Kesehatan		Tersosialisasinya peraturan dan petunjuk teknis penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman	729,00	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	limbah permukiman;				n di 657 desa dan 72 Kelurahan di Provinsi Gorontalo						
9	Menyelenggarakan kegiatan percontohan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah;	3 (tiga) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yakni di Boalemo, Gorontalo, dan Gorontalo Utara,	DPUPR-PKP		Perwujudan Kawasan dengan pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat	3.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10	Menyelenggarakan sosialisasi kepada dunia usaha dan swasta	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Gorontalo Kota-	DPUPR-PKP	BPPW Gorontalo	Tersosialisasinya potensi investasi bidang pengelolaan air	100,00		100,00			

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	mengenai potensi investasi di bidang pengelolaan air limbah permukiman;	Limboto			limbah						
1 1	Mengembangkan pola investasi untuk penyelenggaraan pengelolaan system air limbah permukiman;	Kabupaten/kota	DPUPR-PKP		Terealisasi lainnya kerjasama terkait pola investasi dengan pendanaan non pemerintah	0,00					
1 2	Memberikan kemudahan dan insentif kepada dunia usaha yang berpartisipasi	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan dalam	100,00		100,00			

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	di dalam pengelolaan air limbah seperti pemberian ijin usaha dan keringanan pajak..	Kota-Limboto			acara workshop pemangku kepentingan air limbah domestik						
13	Menyiapkan undang-undang dan peraturan pendukungnya dalam pengelolaan air limbah permukiman;	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Penyusunan peraturan terkait SPAL DT berbasis institusi dan masyarakat	90,00			90,00		
14	Penguatan substansi peraturan perundang-undangan penyelenggara	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terwujudnya penguatan substansi perundang-undangan	0,00					

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp $\times 10^6$)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	aan SPAL Domestik yang ada sebagai payung hukum nasional pencapaian 30% akses aman 2030 namun sesuai target provinsi				terkait pengelolaan air limbah domestik						
15	Penguatan kerangka regulasi (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Instruksi Kepala	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Tersusunya peraturan terkait pengelolaan air limbah domestik	0,00					

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	Daerah) sebagai pelaksanaan program di daerah										
16	Pengembangan NSPK untuk SPAL Domestik di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terlaksananya pengembangan SNPK	0,00					
17	Mereview dan melengkapi Norma standar Pedoman dan Manual (NSPM) dalam pengelolaan air limbah	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP	BPPW Gorontalo	Tersusunnya studi review NSPK bidang pengelolaan air limbah domestik	300,00			300,00		

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	permukiman;										
18	Melaksanakan bantuan teknis penyusunan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;	Kabupaten/kota	DPUPR-PKP	BPPW Gorontalo	Terlaksananya Bantek untuk kabupaten/kota	50,00		50,00			
19	Mendorong dan melaksanakan bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana induk prasarana	Kabupaten/kota	DPUPR-PKP		Terlaksananya bantek penyusunan Rencana Induk SPAL Domestik Kabupaten/kota	50,00		50,00			

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	dan sarana air limbah di kawasan perkotaan dan perdesaan;										
20	Fasilitasi/pendampingan implementasi pemenuhan SPM sanitasi, khususnya sanitasi aman secara berjenjang dari provinsi ke kabupaten/kota	Kabupaten/kota	DPUPR-PKP		Terlaksananya pendampingan di 6 lokasi	90,00		22,50	22,50	22,50	22,50
21	Pemantauan implementasi pemenuhan SPM sanitasi	Kabupaten/kota	DPUPR-PKP		Terdatanya SPM sanitasi di 6 lokasi	60,00		15,00	15,00	15,00	15,00

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	di daerah										
22	Mensosialisasikan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;	Kabupaten/kota	DPUPR-PKP	BPPW Gorontalo	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan dalam acara workshop pemangku kepentingan air limbah domestik	50,00		50,00			
23	Mengembangkan sistem informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;	Kabupaten/kota	DPUPR-PKP	BPPW Gorontalo	Tersusunnya sistem informasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik	300,00			300,00		

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
24	Memberikan insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah dan Dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan pengelolaan air limbah permukiman;	Kabupaten/kota	DPUPR-PKP		tersusunnya peraturan terkait pola insentif dan insentif pengelolaan air limbah domestik di provinsi Gorontalo	0,00					
25	Mempersyaratkan pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat di kawasan permukiman	Kawasan strategis provinsi	DPUPR-PKP		tersusunnya peraturan terkait pembangunan SPALD terpusat di kawasan permukiman baru	25,00		25,00			

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	baru bagi penyelenggara pembangunan Kawasan permukiman baru.										
26	Memberikan pendampingan pembentukan kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah permukiman komunal;	Kabupaten/kota	DPUPR-PKP, Dinas Kesehatan		Terbentuknya KSM di 50 desa	50,00		25,00	25,00		
27	Memberikan pelatihan penyelenggaraan	Kabupaten/kota	DPUPR-PKP, Dinas Kesehatan	BPPW Gorontalo	Penyelenggara SPAL domestik terlatih di	729,00		182,25	182,25	182,25	182,25

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	pembangunan prasarana dan sarana air limbah serta pengelolaan air limbah permukiman komunal;		an		657 desa dan 72 Kelurahan di Provinsi Gorontalo						
28	Mendorong terbentuknya unit yang mengelola prasarana dan sarana air limbah permukiman di daerah, antara lain berupa Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah,	Kota Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango	DPUPR-PKP		Terselenggaranya Sosialisasi UPTD pengelola air limbah	150,00		150,00			

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	Badan Layanan Umum dan Dinas;										
29	Melaksanakan bantuan teknis penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah permukiman;	Kabupaten/kota	DPUPR-PKP	BPPW Gorontalo	Terselenggaranya Bantek kelembagaan 5 kabupaten dan 1 kota	250,00		125,00	125,00		
30	Melaksanakan pelatihan kepada personil pengelola dibidang penyelenggaraan air limbah permukiman;	Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo	DPUPR-PKP	BPPW Gorontalo	Terselenggaranya pelatihan UPTD Air Limbah	75,00		75,00			

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
31	Memfasilitasi koordinasi antar Lembaga dan antar daerah dalam kerjasama penyelenggaraan pengelolaan air limbah;	Kabupaten/kota	DPUPR-PKP		Terwujudnya Kesepakatan bersama dalam pengelolaan air limbah	20,00			20,00		
32	Melaksanakan sosialisasi kepada lembaga eksekutif dan legislative mengenai pentingnya penyelenggaraan air limbah permukiman;	Kabupaten/kota	DPUPR-PKP, Dinas Kesehatan		Trealisasikannya sosialisasi pemangku kepentingan pengelolaan air limbah domestik	600,00		150,00	150,00	150,00	150,00

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
33	Menyusun dan mensosialisasikan kisah sukses (<i>best practices</i>) tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman	Kabupaten/kota	DPUPR-PKP	BPPW Gorontalo	Terselenggaranya seminar penyelenggaraan best practices	50,00		50,00			
34	Memberikan dana stimulan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman untuk mendorong mobilisasi	Kabupaten/kota	DPUPR-PKP		Teralokasikan dana stimulan untuk desa/kelurahan dengan pengelolaan air limbah domestik terbaik	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp $\times 10^6$)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	dana swadaya masyarakat;										
35	Mendorong peningkatan dan fasilitasi kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah;	Kabupaten/kota	DPUPR-PKP	BPPW Gorontalo	Tercapainya Nota kesepahaman dan kesepakatan kerjasama antar pemerintah provinsi dan badan usaha						
36	Pemerintah pusat memberikan investasi awal pembangunan system pengelolaan air limbah	Kawasan Strategis Propinsi dan wilayah kewenangan provinsi	DPUPR-PKP	BPPW Gorontalo							

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	terpusat dan pengembangan lainnya ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.										
37	Peningkatan alokasi APBN/APBD untuk memenuhi target akses aman nasional (SDGs) dan provinsi sesuai target yang ditetapkan	Kabupaten/kota	DPUPR-PKP								
38	Penguatan forum konsolidasi	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP								

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	pendanaan sanitasi di tingkat provinsi										
39	Pengembangan kerangka regulasi di tingkat provinsi sebagai dasar alokasi APBD untuk pemenuhan target akses aman	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP	BPPW Gorontalo							
40	Mobilisasi pendanaan non APBD seperti bantuan keuangan/hibah provinsi, hibah pusat	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terselesaikannya aturan dan kelengkapan usulan pembangunan limbah domestik di 6 lokasi	50,00		25,00	25,00		

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	dan DAK serta sumber pendanaan non negara: swasta/dunia usaha, lembaga karitatif dan hibah mitra pembangunan										
41	Pendanaan APBD untuk pemenuhan kriteria kesiapan mengakses pendanaan non APBD	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terselesaikannya RC usulan pembangunan pengelolaan air limbah di 6 lokasi	300,00		100,00	100,00	100,00	
42	Percepatan pembangunan sarana/prasar	wilayah kewenangan provinsi dan	DPUPR-PKP		Terbangunnya 2,43% SPAL D Terpusat	30.503,44		7.625,86	7.625,86	7.625,86	7.625,86

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	ana akses sanitasi aman : IPLT, SPALD T permukiman berbasis institusi serta sarana pendukungnya	kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo			dari 358.653 KK berbasis institusi di kabupaten/kota pada tahun 2029						
43	Percepatan pembangunan sarana/prasarana akses sanitasi aman : IPLT, SPALD T permukiman berbasis masyarakat, serta sarana pendukungnya	wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terbangunnya 0,49% SPALD Terpusat berbasis masyarakat dari 358.653 KK di kabupaten/kota pada tahun 2029	6.150,90		1.537,72	1.537,72	1.537,72	1.537,72

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	a										
44	Peningkatan insentif penyediaan sarana/prasarana sanitasi di tingkat rumah tangga	wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terbangunnya IPAL Skala permukiman pada 61.939 KK (17,27% akses aman) pada Tahun 2029	92.908,50		23.227,13	23.227,13	23.227,13	23.227,13
45	Peningkatan pemanfaatan sarana/prasarana terbangun di seluruh kabupaten/kota di Provinsi	wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Peningkatan Desa Stop BABS (SBS) sebesar 53% pada Tahun 2029	7.290,00		1.822,50	1.822,50	1.822,50	1.822,50

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	Gorontalo										
46	Pembuatan integrasi penyediaan sanitasi aman dalam pelaksanaan program STBM, termasuk penyediaan dukungan bagi rumah tangga untuk terhubung dengan jaringan perpipaan (khususnya untuk kawasan	wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP		Terbebasnya provinsi Gorontalo dari BABs dengan pembangunan septik tank individual pada 3.157 KK (9,38%)	100.959,00		25.239,75	25.239,75	25.239,75	25.239,75

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)
Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No.	Rencana Aksi	Lokasi	Perangkat Daerah	Pemangku Kepentingan Non OPD	Hasil yang diharapkan (volume/penerima manfaat)	Kebutuhan Biaya (Rp x 10 ⁶)	Waktu Pelaksanaan				
							2025	2026	2027	2028	2029
	padat penduduk di perkotaan) ataupun septik tank yang sesuai standar										
47	Pemanfaatan IoT (<i>internet of things</i>) dalam pengelolaan pemanfaatan infrastruktur sanitasi	Provinsi Gorontalo	DPUPR-PKP, Diskominfo		Terbangunnya sistem informasi infrastruktur sanitasi yang terintegrasi dengan sistem informasi provinsi	800,00			800,00	800,00	800,00

Sumber : Hasil Analisis Konsultan RSP, 2024



bab-6

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN INDIKASI PENDANAAN

6.1 Penyesuaian Rencana Aksi Terhadap Kodefikasi dan Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikasi Pendanaan

Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikasi pendanaan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain pengaturan tentang kewenangan, nomenklatur, dll;

Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikasi pendanaan dilakukan dengan cara menginput rencana aksi yang telah disusun sebelumnya ke dalam tabel sesuai kodefikasi dan nomenklatur perencanaan daerah sebagaimana diatur dalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemurakhiran kualifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pembangunan dan keuangan daerah, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini

Tabel 6.1
Kodifikasi dan Nomen Klatur

Kode					Program Dan Kegiatan	Satuan
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI						
1	03				Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1	03	04			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan	

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kode					Program Dan Kegiatan	Satuan
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					Pengelolaan Persampahan Regional	
1	03	04	1.01	0009	Pembinaan Pengembangan TPA/ TPST / SPA / TPS 3R/TPS Kabupaten/kota	Kabupaten/kota
1	03	04	1.01	0010	Peningkatan TPA / TPST / SPA	TON/HARI
1	03	04	1.01	0011	Optimalisasi TPA / TPST / SPA	unit
1	03	04	1.01	0012	Fasilitasi Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/kota	Kabupaten/kota
1	03	04	1.01	0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	TON/HARI
1	03	04	1.01	0014	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota	orang
1	03	04	1.01	0015	Peningkatan kapasitas kelembagaan sistem pengelolaan persampahan	lembaga
1	03	04	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	dokumen
1	03	04	1.01	0017	Penyediaan sarana pendukung TPA/TPST/SPA	unit
1	03	05			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan	

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kode					Program Dan Kegiatan	Satuan
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					Sistem Air Limbah Domestik Regional	
1	03	05	1.01	0010	Pembinaan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/kota	Kabupaten/kota
1	03	05	1.01	0011	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	m3/hari
1	03	05	1.01	0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	unit
1	03	05	1.01	0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	m3/hari
1	03	05	1.01	0014	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	orang
1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	dokumen
1	03	05	1.01	0016	Fasilitasi Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kabupaten/kota
1	03	05	1.01	0017	Peningkatan kapasitas kelembagaan Sistem Pengelolaan	lembaga

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kode					Program Dan Kegiatan	Satuan
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
					Air Limbah Domestik (SPALD)	
1	03	05	1.01	0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	unit
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	
1	03	07	1.01	0005	Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Provinsi	TON/HAR I
1	03	07	1.01	0006	Pembangunan TPA di Kawasan Strategis Provinsi	TON/HAR I
1	03	07	1.01	0007	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	TON/HAR I
1	03	07	1.01	0008	Peningkatan TPS di Kawasan Strategis Provinsi	TON/HAR I
1	03	07	1.01	0009	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi	rumah tangga
1	03	07	1.01	0010	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	TON/HAR I
1	03	07	1.01	0011	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	m3/hari

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kode					Program Dan Kegiatan	Satuan
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	03	07	1.01	0012	Peningkatan TPA di Kawasan Strategis Provinsi	TON/HAR I
1	03	07	1.01	0013	Pembangunan TPST di Kawasan Strategis Provinsi	TON/HAR I
1	03	07	1.01	0014	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	m3/hari
1	03	07	1.01	0015	Pembangunan SPA di Kawasan Strategis Provinsi	TON/HAR I
1	03	07	1.01	0016	Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi	TON/HAR I
1	03	07	1.01	0017	Peningkatan TPS 3 R di Kawasan Strategis Provinsi	TON/HAR I
1	03	07	1.01	0018	Peningkatan TPST di Kawasan Strategis Provinsi	TON/HAR I
1	03	07	1.01	0019	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	m3/hari
1	03	07	1.01	0020	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	unit
1	03	07	1.01	0021	Peningkatan SPA di Kawasan Strategis Provinsi	TON/HAR I
1	03	07	1.01	0022	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	rumah tangga

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Kode					Program Dan Kegiatan	Satuan
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	03	07	1.01	0023	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	unit
1	03	07	1.01	0025	Optimalisasi TPA di Kawasan Strategis Provinsi	unit
1	03	07	1.01	0028	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS 3 R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	SR
1	03	07	1.01	0032	Optimalisasi TPS di Kawasan Strategis Provinsi	unit
1	03	07	1.01	0033	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di kawasan Strategis Provinsi	m3/hari
1	03	07	1.01	0034	Optimalisasi TPS 3R di Kawasan Strategis Provinsi	unit
1	03	07	1.01	0035	Optimalisasi TPST di Kawasan Strategis Provinsi	unit
1	03	07	1.01	0036	Optimalisasi SPA di Kawasan Strategis Provinsi	unit
1	03	07	1.01	0037	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis	unit

Sumber : Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024

6.2 Penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikasi Pendanaan

Hasil penyesuaian rencana aksi terhadap kodefikasi dan nomenkatur tersebut, akan diperoleh pengelompokan program, kegiatan, dan sub kegiatan;

Berdasarkan pengelompokan tersebut kemudian tuangkan ke dalam Tabel 6.4 yang terdapat dalam lampiran 4 form-3 (file excel) seperti uraian berikut ini;

Tabel 6.2
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikasi Pendanaan
Road Map Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan
			Jumla h Pend duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani														PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT	
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SISTEM PENGELOLAA N AIR LIMBAH DOMESTIK																							
A.	ASPEK STANDAR DAN REGULASI																							
1	Pembinaan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan padat kumuh perkotaan yang belum terlayani dengan system pengelolaan air limbah terpusat;	Kawasan Kumuh Kota Gorontalo sesuai Perwali Kota Gorontalo No. 23 Tahun 2022	2.500	206,77 ha	KK		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00	18.000,00						
2	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	IPLT Kwandang, IPLT Limboto Barat, IPLT Dulupi, IPLT Kota Utara			unit		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		2.000,00	2.000,00			4.000,00		4.000,00					
3	Pembinaan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) / CLTS (Community	Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yakni di Boalemo,	3.000		orang		1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	3.000,00		1.166,67	583,33	1.166,67	583,33	3.500,00		3.500,00					

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan	
			Jumla h Pendu duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani													PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT		
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029								Jumlah
	Lead Sanitation) di kawasan perdesaan;	Gorontalo, dan Gorontalo Utara																						
4	Optimalisasi IPAL dan peningkatan operasional sewerage terpasang;	Lamu, Molingkapot oPalopo, Marisa Selatan dan Hulawa			unit		1,00	2,00	1,00	1,00	5,00		350,00	700,00	350,00	350,00	1.750,00	350	1.400,00					
5	Pembangunan IPAL paket	KSP dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu Kawasan Marisa dan Kawasan Randangan Kabupaten Pohuwato	4.500		m3/hari		500,00	500,00	500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00		4.500,00						
6	Optimalisasi SPALD-S menjadi SPALD-T secara bertahap di perkotaan dengan cara mengkombinasikan dan atau menambah dengan sistem yang telah ada secara bertahap.	PKW Kecamatan Tibawa dan PKL Kecamatan Limboto	500		unit		100,00	100,00	100,00	200,00	500,00		350,00	350,00	350,00	700,00	1.750,00		1.750,00					

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan	
			Jumla h Pendu duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani														PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT		
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029	Jumlah								
7	Sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;	Kabupaten/kota	1.000		kab/kota		2,00	1,00	2,00	1,00	6,00		100,00	50,00	100,00	50,00	300,00	300,00							
8	Pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman;	Kabupaten/kota	2.000		kab/kota		2,00	1,00	2,00	1,00	6,00		200,00	100,00	200,00	100,00	600,00	600,00							
9	Pembinaan kegiatan percontohan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah;	3 (tiga) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yakni di Boalemo, Gorontalo, dan Gorontalo Utara,			kawas an			3,00			3,00			300,00			300,00	300,00							
10	Sosialisasi kepada dunia usaha dan swasta mengenai potensi investasi di bidang pengelolaan air limbah permukiman;	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Gorontalo Kota-Limboto			kawas an			2,00			2,00			200,00			200,00	200,00							

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan	
			Jumla h Pend duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani													PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT		
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029								Jumlah
11	Pembinaan pola investasi untuk penyelenggaraa n pengelolaan system air limbah permukiman;	Kabupaten/k ota			kab/k ota		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	Sosialisasi kemudahan dan insentif kepada dunia usaha yang berpartisipasi di dalam pengelolaan air limbah seperti pemberian ijin usaha dan keringanan pajak..	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Gorontalo Kota-Limboto			kawas an		2,00				2,00		100,0 0				100,00	100,00						
B	ASPEK KELEMBAGAA N DAN TATA KELOLA										0,00													
13	Penyusunan peraturan pendukungnya dalam pengelolaan air limbah permukiman;	Provinsi Gorontalo			doku men			1,00			1,00			90,00			90,00	90,00						
14	Penguatan substansi peraturan perundang- undangan penyelenggaraa n SPAL Domestik yang ada sebagai	Provinsi Gorontalo			doku men		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan	
			Jumla h Pend duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani													PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT		
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029								Jumlah
	payung hukum nasional pencapaian 30% akses aman 2030 namun sesuai target provinsi																							
15	Penguatan kerangka regulasi (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Instruksi Kepala Daerah) sebagai pelaksanaan program di daerah	Provinsi Gorontalo			doku men		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
16	Pengembangan NSPK untuk SPAL Domestik di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo			doku men		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
17	Review dan melengkapi Norma standar Pedoman dan Manual (NSPM) dalam pengelolaan air limbah permukiman;	Provinsi Gorontalo			doku men			1,00			1,00			300,00			300,00	300,00						

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan	
			Jumla h Pendu duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani													PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT		
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029								Jumlah
18	Sosialisasi dan bantuan teknis penyusunan peraturan daerah dalam penyelenggaraa n pengelolaan air limbah permukiman;	Kabupaten/k ota			kab/k ota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	240,00						
19	Bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana induk prasarana dan sarana air limbah di kawasan perkotaan dan perdesaan;	Kabupaten/k ota			kab/k ota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	240,00						
20	Fasilitasi / pendampingan implementasi pemenuhan SPM sanitasi, khususnya sanitasi aman secara berjenjang dari provinsi ke kabupaten/kota	Kabupaten/k ota			kab/k ota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	240,00						
21	Pemantauan implementasi pemenuhan SPM sanitasi di daerah	Kabupaten/k ota			kab/k ota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	240,00						

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan	
			Jumla h Pendud uk terlay ani	Luas Wila yah terla yani														PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT		
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029	Jumlah								
22	Sosialisasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraa n pengelolaan air limbah permukiman;	Kabupaten/k ota			kab/k ota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	240,00							
23	Penyusunan sistem informasi tentang penyelenggaraa n pengelolaan air limbah permukiman;	Kabupaten/k ota			doku men				250, 00	250,00				250,00		250,00	250,00								
24	Pembinaan terkait insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah dan Dunia usaha/swasta yang menyelenggara kan pengelolaan air limbah permukiman;	Kabupaten/k ota			kelom pok		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
25	Sosialisasi pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat dikawasan permukiman baru bagi penyelenggara pembangunan Kawasan	Kawasan strategis provinsi			kab/k ota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	240,00							

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan
			Jumla h Pend duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani														PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT	
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029	Jumlah							
	permukiman baru.																							
C	ASPEK PENDANAAN YANG BERKELANJUT AN										0,00													
26	Sosialisasi/Pend ampingan pembentukan kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah permukiman komunal;	Kabupaten/k ota			kab/k ota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	240,00						
27	Pelatihan penyelenggaraa n pembangunan prasarana dan sarana air limbah serta pengelolaan air limbah permukiman komunal;	Kabupaten/k ota			kab/k ota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	240,00						

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan		
			Jumla h Pend duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani													PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT			
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029								Jumlah	
28	Pembentukan unit yang mengelola prasarana dan sarana air limbah permukiman di daerah, antara lain berupa Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum dan Dinas;	Kota Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango			kab/kota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	240,00							
29	Sosialisasi/bantuan teknis penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah permukiman;	Kabupaten/kota			kab/kota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	240,00							
30	Pelatihan personil pengelola dibidang penyelenggaraa n air limbah permukiman;	Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara , Kabupaten Boalemo			orang		50,00	50,00	50,00	50,00	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	400,00							
31	Sosialisasi dan koordinasi antar Lembaga dan antar daerah dalam kerjasama penyelenggaraa n pengelolaan air limbah;	Kabupaten/kota			kab/kota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	240,00							

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan	
			Jumla h Pend duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani														PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT		
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029	Jumlah								
32	sosialisasi kepada lembaga eksekutif dan legislative mengenai pentingnya penyelenggaraa n air limbah permukiman;	Kabupaten/k ota			kab/k ota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	600,00							
33	Sosialisasi kisah sukses (<i>best practices</i>) tentang penyelenggaraa n pengelolaan air limbah permukiman	Kabupaten/k ota			orang			50,00			50,00			75,00			75,00	75,00							
D	ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT										0,00														
34	Optimalisasi dana stimulan dalam penyelenggaraa n pengelolaan air limbah permukiman untuk mendorong mobilisasi dana swadaya masyarakat;	Kabupaten/k ota			kab/k ota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		125,00	125,00	125,00	125,00	500,00	500,00							
35	Fasilitasi kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam penyelenggaraa n prasarana dan	Kabupaten/k ota			kab/k ota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan	
			Jumla h Pend duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani													PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT		
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029								Jumlah
	sarana air limbah;																							
36	Pembangunan awal system pengelolaan air limbah terpusat dan pengembangannya ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.	Kawasan Strategis Propinsi dan wilayah kewenangan provinsi			m3/h ari			100,00			100,00			15.000,00			15.000,00	4.500,00	10500					
37	Peningkatan alokasi APBN/APBD untuk memenuhi target akses aman nasional (SDGs) dan provinsi sesuai target ynag ditetapkan	Kabupaten/k ota			kab/k ota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
38	Penguatan forum konsolidasi pendanaan sanitasi di tingkat provinsi	Provinsi Gorontalo			kab/k ota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan	
			Jumla h Pend duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani													PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT		
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029								Jumlah
39	Pengembangan kerangka regulasi di tingkat provinsi sebagai dasar alokasi APBD untuk pemenuhan target akses aman	Provinsi Gorontalo			kab/k ota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
40	Mobilisasi pendanaan non APBD seperti bantuan keuangan/hibah provinsi, hibah pusat dan DAK serta sumber pendanaan non negara: swasta/dunia usaha, lembaga karitatif dan hibah mitra pembangunan	Provinsi Gorontalo			kab/k ota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
41	Pendanaan APBD untuk pemenuhan kriteria kesiapan mengakses pendanaan non APBD	Provinsi Gorontalo			kab/k ota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
E	ASPEK INFRASTRUKT UR DAN TEKNOLOGI										0,00													

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan	
			Jumla h Pendu duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani														PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT		
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029	Jumlah								
42	Terbangunnya 2,43% SPAL D Terpusat dari 358.653 KK berbasis institusi di kabupaten/kota pada tahun 2029	wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo	2223,6687		unit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00		8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	35.000,00		35.000,00						
43	Terbangunnya 0,49% SPAL D Terpusat berbasis masyarakat dari 358.653 KK di kabupaten/kota pada tahun 2029	wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo	448,3941		unit		448,00	448,00	448,00	448,00	1.792,00		1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	6.272,00		6.272,00						
44	Terbangunnya IPAL Skala permukiman pada 61.939 KK (17,27% akses aman) pada Tahun 2029	wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo			unit		50,00	50,00	50,00	50,00	200,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00		6.000,00						
45	Peningkatan Desa Stop BABS (SBS) sebesar 53% pada Tahun 2029	wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo			desa		20,00	20,00	18,00	18,00	76,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00							
46	Terbebasnya provinsi Gorontalo dari BABs dengan pembangunan septik tank individual pada	wilayah kewenangan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo			unit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	157,00	3.157,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	549,50	11.049,50	11.049,50							

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan	
			Jumla h Pendu duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani													PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT		
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029								Jumlah
	3.157 KK (9,38%)																							
47	Pemanfaatan IoT (<i>internet of things</i>) dalam pengelolaan pemanfaatan infrastruktur sanitasi	Provinsi Gorontalo			doku men			1,00			1,00			800,00	800,00	800,00	2.400,00	2.400,00						
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah											0,00	45.119,67	62.901,33	45.569,67	41.985,83	195.576,50							
2	PENGOLAHAN PERSAMPAHAN																							
A.	ASPEK STANDAR DAN REGULASI																							
1	Penyusunan peraturan pelaksanaan yang diperlukan sebagai bentuk penjabaran dari Undang-undang atau peraturan yang berlaku terkait pengelolaan sampah di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota	Provinsi Gorontalo			dok		1,00				1,00		100,00				100,00	100,00						

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan	
			Jumla h Pendud uk terlay ani	Luas Wila yah terla yani													PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT		
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029								Jumlah
2	Penyusunan surat edaran gubernur tentang percepatan pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo			dok		1,00				1,00		100,00				100,00							
3	Sinkronisasi produk hukum terkait pengelolaan sampah antar OPD Provinsi	Provinsi Gorontalo			dok		1,00				1,00		100,00				100,00							
4	Revisi produk hukum yang menghambat dalam pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo			dok		1,00				1,00		100,00				100,00							
5	Penyusunan peraturan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerapan sangsi dalam pengelolaan dan pengolahan sampah	Provinsi Gorontalo			dok		1,00				1,00		100,00				100,00							
6	Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pengalokasian dan pengaturan anggaran untuk	Provinsi Gorontalo			dok		1,00				1,00		100,00				100,00							

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan	
			Jumla h Pendud uk terlay ani	Luas Wila yah terla yani													PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT		
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029								Jumlah
	pengelolaan sampah																							
7	Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan EPR (<i>extended producer Responsibility</i>) atau kewajiban produsen pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo			dok			1,00			1,00			100,00			100,00	100,00						
8	Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan CSR (<i>corporate social responsibility</i>) untuk pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo			dok			1,00			1,00			100,00			100,00	100,00						
9	Penyusunan peraturan tentang kompensasi, insentif dan disinsentif untuk pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo			dok			1,00			1,00			100,00			100,00	100,00						

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan		
			Jumla h Pendu duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani													PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT			
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029								Jumlah	
10	Penyusunan peraturan tentang industri daur ulang dan pemasaran	Provinsi Gorontalo			dok			1,00			1,00			100,00			100,00	100,00							
11	Pengembangan SPM dan NSPK dalam kegiatan pengelolaan sampah di tingkat provinsi dan daerah	Provinsi Gorontalo			dok			1,00			1,00			100,00			100,00	100,00							
12	Sosialisasi produk hukum dalam bentuk desiminasi terkait pengelolaan sampah melalui media komunikasi secara profesional dan kontinu	Provinsi Gorontalo			dok				1,00		1,00			50,00			50,00	50,00							
13	Penerapan sangsi hukum terhadap pelangar peraturan perundang-undangan pengelolaan sampah secara konsisten	Provinsi Gorontalo			dok				1,00		1,00			50,00			50,00	50,00							
14	Penyempurnaa n atau melengkapi norma, standar, prosedur dan	Provinsi Gorontalo			dok				1,00		1,00			50,00			50,00	50,00							

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan	
			Jumla h Penduk terlay ani	Luas Wila yah terla yani													PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT		
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029								Jumlah
	kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah																							
15	Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disintensif dalam pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo			dok				1,00		1,00				50,00		50,00	50,00						
16	pengembangan standar/kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo			dok				1,00		1,00				50,00		50,00	50,00						
17	pengembangan standar/kriteria sarana dan prasarana dalam pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo			dok				1,00		1,00				50,00		50,00	50,00						
18	pengembangan SOP dalam penanganan sampah	Provinsi Gorontalo			dok				1,00		1,00				50,00		50,00	50,00						
B	ASPEK KELEMBAGAA N DAN TATA KELOLA																							

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan	
			Jumla h Pend duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani													PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT		
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029								Jumlah
19	Pembentukan badan koordinasi dengan penegasan tugas dan fungsi masing-masing terkait pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo			unit		1,00				1,00		60,00				60,00	60,00						
20	Pembentukan badan koordinasi pengelolaan sampah kabupaten/kota	Provinsi Gorontalo			unit			1,00			1,00			60,00			60,00	60,00						
21	Penyusunan nomen klatur pengelola sampah tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan indikator beban pengelolaan sampah provinsi/kabupa ten/kota	Provinsi Gorontalo			dok			1,00			1,00			90,00			90,00	90,00						
22	Penyusunan peran regulator dan operator dalam pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo			dok				1,00		1,00			90,00			90,00	90,00						

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan		
			Jumla h Pendu duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani													PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT			
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029								Jumlah	
23	Pembentukan kelembagaan pengelola sampah di masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku	Provinsi Gorontalo			unit			1,00			1,00			100,00			100,00	100,00							
24	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo			orang		50,00	50,00	50,00	50,00	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	400,00							
25	meningkatkan kapasitas leadership, kelembagaan dan SDM dalam upaya pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo			orang		50,00	50,00	50,00	50,00	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	400,00							
26	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Provinsi Gorontalo			doku men		1,00				1,00		600,00				600,00	600,00							
27	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Provinsi Gorontalo			doku men			1,00			1,00			800,00			800,00	800,00							

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan		
			Jumla h Pend duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani													PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT			
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029								Jumlah	
28	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Provinsi Gorontalo									0,00		62,50	62,50	62,50	62,50	250,00	250,00							
29	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Provinsi Gorontalo									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
30	koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Provinsi Gorontalo									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air	Provinsi Gorontalo									0,00		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00							

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan	
			Jumla h Pend duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani														PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT		
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029	Jumlah								
	Minum, Limbah dan Sanitasi																								
32	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa/Kelurahan	Provinsi Gorontalo									0,00		18,23	18,23	18,23	18,23	72,90	72,90							
33	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Provinsi Gorontalo									0,00		91,13	91,13	91,13	91,13	364,50	364,50							
34	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Sistem Pengolaan Persampahan pada kawasan Wisata Unggulan Provinsi	Provinsi Gorontalo									0,00			600,00			600,00	600,00							
35	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Provinsi Gorontalo									0,00		0,00	0,00			0,00	0,00							

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan
			Jumla h Pendu duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani													PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT	
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029							
C	ASPEK PENDANAAN YANG BERKELANJUT AN										0,00												
36	Penetapan standar biaya investasi, operasional dan pemeliharaan pengelolaan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir dalam RP/ton	Provinsi Gorontalo									0,00			100,00			100,00	100,00					
37	mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah sebesar minimal 2% dari APBD Provinsi/Kabup aten/Kota	Provinsi Gorontalo									0,00		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00					
38	Menglokasikan anggaran untuk pilot proyek pengelolaan sampah dari sub sistem pemilahan/pew adahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan	Provinsi Gorontalo									0,00		125,00	125,00	125,00	125,00	500,00	500,00					

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan
			Jumla h Pend duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani														PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT	
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029	Jumlah							
	akhir sampah di Kabupaten/Kot a																							
39	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
40	pemanfaatan dana desa untuk pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
41	pemanfaatan program <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR)/kewajiban produsen dalam pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42	Penyusunan dan penerapan peta jalan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo						1,00			1,00			300,00			300,00	300,00						
43	Pengaturan standarisasi produk daur ulang	Provinsi Gorontalo									0,00		0,00				0,00	0,00						

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan	
			Jumla h Pendu duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani													PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT		
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029								Jumlah
44	Pemanfaatan program corporate social responsibility / (CSR) untuk pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
45	memperkuat komitmen dunia usaha dalam penanganan sampah melalui penerapan tanggungjawab produsen yang diperluas	Provinsi Gorontalo									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
46	memperkuat keterlibatan dunia usaha dalam pengurangan sampah melalui kemitraan dengan pemerintah	Provinsi Gorontalo									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
47	Penetapan tipping fee sesuai dengan standar harga dalam pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
48	Fasilitasi Kerjasama Persampahan Lintas Kabupaten/kota	Provinsi Gorontalo									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan	
			Jumla h Penduk duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani														PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT		
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029	Jumlah								
49	Kerjasama Penyediaan/ Pengelolaan PSU Permukiman	Provinsi Gorontalo			orang		50,0 0	50,00	50,0 0	50,0 0	200,00		250,0 0	250,00	250,00	250,00	1.000,0 0	500		500					
50	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Provinsi Gorontalo									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
51	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Infrastruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Provinsi Gorontalo									0,00		0,00				0,00	0,00							
52	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kot a	Provinsi Gorontalo									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
53	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga	Provinsi Gorontalo									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
54	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Provinsi Gorontalo									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
D	ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT										0,00														

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan	
			Jumla h Pendu duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani														PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT		
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029	Jumlah								
55	Perubahan pola fikir dan peningkatan kapasitas penyelenggara dalam pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo			orang		10,00	10,00	10,00	10,00	40,00		12,50	12,50	12,50	12,50	50,00	50,00							
56	Melakukan perubahan pola fikir dalam pengelolaan sampah melalui program rekayasa sosial	Provinsi Gorontalo			orang		10,00	10,00	10,00	10,00	40,00		12,50	12,50	12,50	12,50	50,00	50,00							
57	Pelatihan, training, seminar dan lomba inovasi pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo			paket						0,00		75,00	75,00	75,00	75,00	300,00	300,00							
58	Kerjasama antar pelaku usaha dan stake holder pengelola sampah	Provinsi Gorontalo									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
59	Penyelenggaraa n promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	Provinsi Gorontalo									0,00		37,50	37,50	37,50	37,50	150,00	150,00							
60	Penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	Provinsi Gorontalo									0,00		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00							

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan	
			Jumla h Penduk terlay ani	Luas Wila yah terla yani													PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT		
					SATU AN	20 25	2026	2027	2028	2029	Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029								Jumlah
61	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Provinsi Gorontalo									0,00			50,00			50,00	50,00						
62	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Provinsi Gorontalo									0,00		12,50	12,50	12,50	12,50	50,00	50,00						
E	ASPEK INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI										0,00													
63	Penyusunan rencana induk sistem pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo			doku men			1,00			1,00			400,00			400,00	400,00						
64	Penyusunan reuiu rencana induk sistem pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo			doku men					1,00	1,00					100,00	100,00	100,00						
65	membangun sistem informasi pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo			doku men			1,00			1,00			150,00			150,00	150,00						

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan
			Jumla h Pend duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani														PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT	
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029	Jumlah							
66	pengembangan standar kompetensi pelaksana kegiatan pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo			orang		50,00	50,00	50,00	50,00	200,00		25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00						
67	pengembangan standar kriteria sarana/prasarana dalam pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo			doku men			1,00			1,00			25,00			25,00	25,00						
68	Pengembangan SOP dalam pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo			doku men		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	200,00						
69	pembangunan sarana prasarana pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo			unit		50,00	50,00	50,00	50,00	200,00		37,50	37,50	37,50	37,50	150,00	150,00	-	-	-	-	-	
70	pembangunan sarana prasarana kegiatan pengurangan sampah secara individu	Provinsi Gorontalo			unit		50,00	50,00	50,00	50,00	200,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00						
71	penyediaan sarana prasarana kegiatan pengurangan sampah skala kawasan	Provinsi Gorontalo			unit		50,00	50,00	50,00	50,00	200,00		750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00	3.000,00						
72	melakukan pemilahan, pewadahan dan pengolahan	Provinsi Gorontalo			unit		50,00	50,00	50,00	50,00	200,00		50,00	50,00	50,00	50,00	200,00	200,00						

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan
			Jumla h Pendu duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani														PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT	
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029	Jumlah							
	sampah di sumber																							
73	menerapkan teknologi ramah lingkungan yang tepat guna dalam pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo			unit		50,0 0	50,00	50,0 0	50,0 0	200,00		12,50	12,50	12,50	12,50	50,00	50,00						
74	memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah	Provinsi Gorontalo			unit		50,0 0	50,00	50,0 0	50,0 0	200,00		500,0 0	500,00	500,00	500,00	2.000,0 0	2.000,0 0						
75	penyusunan sistem perencanaan, implementasi, pengawasan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan sampah	Provinsi Gorontalo			doku men		1,00				1,00		200,0 0				200,00	200,00						
76	Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan	Provinsi Gorontalo			unit				1,00		1,00				2.000,0 0		2.000,0 0	2.000,0 0						
77	penyusunan kajian pilot proyek pengelolaan sampah dari sub sistem	Provinsi Gorontalo			doku men			1,00			1,00			150,00			150,00	150,00						

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan
			Jumla h Pendu duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani														PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT	
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029	Jumlah							
	pemilahan sampai dengan pemrosesan akhir																							
78	pelaksanaan pilot projec sub sistem pewadahan sampai pemrosesan akhir di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango	Provinsi Gorontalo			kab/k ota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		600,0 0	600,00	600,00	600,00	2.400,0 0		2.400,0 0					
79	Penyusunan studi pengolahan sampah dengan ITF di kawasan strategis nasional (KSN)	Provinsi Gorontalo			doku men			1,00			1,00			500,00			500,00							
80	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Provinsi Gorontalo									0,00		21.44 1,90	25.084, 97	28.807, 64	32.611, 24	107.94 5,75	32383,7 2571	75.562, 03					
81	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Provinsi Gorontalo			ton/h ari					120, 00	120,00					300,00	300,00	300,00						
82	Pembangunan TPA	TPA Talumelito			m3/h ari		600, 00				600,00		1.250, 00	1.250,0 0	1.250,0 0	1.250,0 0	5.000,0 0		5.000,0 0					

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan
			Jumla h Pend duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani														PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT	
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029	Jumlah							
	Kewenangan Provinsi																							
83	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	TPA Talumelito			unit		1,00				1,00		1.000, 00				1.000,0 0		1.000,0 0					
84	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi (alat berat)	TPA Lanuo			unit			1,00			1,00			1.000,0 0			1.000,0 0							
85	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan (alat berat)	TPA Talumelito			unit				1,00		1,00				3.000,0 0		3.000,0 0		3.000,0 0					
86	Optimalisasi Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	TPA Talumelito			m3/h ari			175.20 0,00			175.20 0,00			43.800, 00			43.800, 00		43.800, 00					
87	Pembangunan TPS 3 R di kawasan strategis Provinsi kapasitas 20 ton/hari	Provinsi Gorontalo			ton/h ari		20,0 0	30,00	40,0 0	50,0 0	140,00		12.00 0,00	18.000, 00	24.000, 00	30.000, 00	84.000, 00		84.000, 00					
88	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Provinsi Gorontalo			kab/k ota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		300,0 0	300,00	300,00	300,00	1.200,0 0	1.200,0 0						

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh							Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan	
			Jumla h Penduduk terlayani	Luas Wila yah terlayani														PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT		
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029	Jumlah								
89	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional	Provinsi Gorontalo			kab/kota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00	1.200,00							
90	Pengadaan truk sampah	Provinsi Gorontalo			unit		3,00	3,00	3,00	3,00	12,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	9.000,00		9.000,00						
91	Pengembangan pengelolaan sampah (penanganan dan pengurangan sampah) di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Provinsi Gorontalo			kab/kota		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00		300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00	1.200,00							
92	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (bin sampah terpilah 4x50L)	Provinsi Gorontalo			unit		50,00	50,00	50,00	50,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	800,00							
93	Pengadaan Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah dalam Pengelolaan	Provinsi Gorontalo			unit		50,00	50,00	50,00	50,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	800,00							

NO MOR	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DETAIL LOKASI (Kab/Kota)	Estimasi Outcome		Kebutuhan Penanganan menyeluruh						Indikasi Biaya (juta rupiah)						Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)						Cata tan
			Jumla h Pendu duk terlay ani	Luas Wila yah terla yani													PROV	APBN	DAK	SWAST A/CSR	ZIS WAF	MASYAR AKAT	
					SATU AN	Volume					Total Volum e	20 25	2026	2027	2028	2029							
	Destinasi Pariwisata Provinsi (bin sampah terpilah 4x50L)																						
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Pengelolaan Persampahan										0, 00	44.19 8,75	100.00 6,82	66.544 ,49	71.308 ,09	282.05 8,15	54.296, 13	225.76 2,03	500 ,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sanitasi										0, 00	89.31 8,41	162.90 8,16	112.11 4,16	113.29 3,92	477.63 4,65	54.296, 13	225.76 2,03	500 ,00	0,00	0,00	0,00	



bab-7

PENUTUP

ROADMAP SANITASI PROVINSI (RSP)

Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 yang telah disusun, diharapkan menjadi rujukan bagi semua pemangku kepentingan baik bagi unsur pemerintah daerah maupun unsur diluar Pemerintah Daerah Gorontalo yang memfokuskan sumber daya pelaksanaan pembangunan pada peningkatan pencapaian pembangunan sanitasi di Provinsi Gorontalo sehingga secara signifikan sumber daya yang dikerahkan dapat bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo guna mengakses layanan sanitasi yang layak.

Implementasi Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo sebagai bentuk operasional yang lebih mendetail terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi di Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 dan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045, memberikan arah kepada perangkat daerah terkait pelaksanaan pembangunan sanitasi di Provinsi Gorontalo untuk mengembangkan program kegiatan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam roadmap sanitasi Provinsi Gorontalo sebagai bentuk pelaksanaan peran Provinsi Gorontalo dalam membina dan memfasilitasi pencapaian pembangunan sanitasi di wilayahnya sesuai dengan kondisi eksisting pembangunan sanitasi provinsi.